



**PERATURAN BUPATI NOMOR 24
TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2026**



BAPPEDA
KABUPATEN LABUHANBATU
2025

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 24 TAHUN 2025

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

3. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomoe 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencanaan

penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pemerintah tahunan daerah.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah pada Tahun 2026.
- (2) Penyusunan RKPD Tahun 2026 bertujuan:
 - a. menciptakan kepastian kebijakan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026;
 - b. merumuskan rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2026;
 - c. merumuskan program prioritas pembangunan daerah;
 - d. memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan; dan
 - e. menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target indikator kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun Anggaran 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan strategi daerah, pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaan Tahun 2026, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB IV SISTEMATIKA RKPD

Pasal 4

(1) Penjabaran RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dengan sistematika:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- g. BAB VII : PENUTUP

(2) Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD

Pasal 5

Penyusunan RKPD Tahun 2026 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045, rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional.

Pasal 6

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan KUA, PPAS dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Tahun 2026 dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 8 September 2025

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

MAYA HASMITA

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor : 24 Tahun 2025

Tanggal : 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

HASAN HERI RAMBE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 disusun berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan Tahun 2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan strategis yang memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah serta target capaian dan indikator pembangunan selama setahun. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 dilaksanakan melalui pendekatan : 1) Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah; 2) Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang; 3) Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi; 4) Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi mengakomodasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5) Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah.

Kami ucapkan terimakasih dengan harapan dokumen ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4. Maksud dan Tujuan	I-11
1.5. Sistematika	I-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-1
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam	II-6
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-7
2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II-7
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas	II-11
2.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II-15
2.1.7 Demografi	II-16
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-25
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-25
2.2.2 Kesehatan Untuk Semua	II-34
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-36
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-40
2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-42
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	II-43
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-48

2.3.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-49
2.3.2	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.....	II-50
2.3.3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru.....	II-58
2.3.4	Transformasi Digital	II-59
2.3.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-61
2.3.6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-64
2.3.7	Stabilitas Ekonomi Makro.....	II-66
2.4	Aspek Pelayanan Umum	II-69
2.4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.....	II-69
2.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial.....	II-71
2.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-72
2.4.4	Layanan Urusan Wajib Dasar	II-75
2.4.5	Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II-85
2.4.6	Urusan Pilihan.....	II-97
2.4.7	Penunjang Pemerintah.....	II-102
2.5	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan.....	II-106
2.5.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-114
2.6	Rekapitulasi Rata – Rata Capaian Kinerja Program dan Keuangan Standar Pelayanan Minimal Triwulan 1 2025.....	II-116
BAB	III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025	III-1
3.1.2	Perkiraan Capaian Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2026	III-10
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2026	III-11
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-11
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-20
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-27

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1 Tujuan dan sasaran Pembangunan	VI-1
4.1.1 Visi	VI-1
4.1.2 Misi	VI-2
4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu.....	VI-7
4.3 Prioritas dan sasaran Pembangunan Tahun 2026.....	VI-19
4.3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun	
4.3.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025	VI-26
4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026	VI-27
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah	V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VI-1
..	VI-1
6.1. Perjanjian Kinerja	VI-2
BAB VII PENUTUP.....	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Administrasi Kecamatan Labuhanbatu.....	2
Tabel 2.2	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Station Klimatologi Kabupaten Labuhanbatu.....	5
Tabel 2.3	Penggunaan Lahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023	6
Tabel 2.4	Capaian Indikator Ketahanan Air	10
Tabel 2.5	Capaian Indikator Pengelolaan Sampah.....	14
Tabel 2.6	Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Menurut Kelompok Umur.....	16
Tabel 2.7	Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Menurut Kecamatan	17
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu	18
Tabel 2.9	Distribusi Penduduk Kabupaten Labuhanbatu (Jiwa/Km ²)	19
Tabel 2.10	Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Usia	21
Tabel 2.11	Proyeksi Penduduk menurut Kecamatan	22
Tabel 2.12	Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Menurut Kecamatan	23
Tabel 2.13	Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan	24
Tabel 2.14	Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha.....	26
Tabel 2.15	Distribusi PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha	28
Tabel 2.16	Literasi dan Numerasi Kabupaten Labuhanbatu.....	38
Tabel 2.17	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.....	39
Tabel 2.18	Capaian Indikator Jasa Keuangan	57
Tabel 2.19	Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Labuhanbatu	60

Tabel 2.20	Indikator Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.....	61
Tabel 2.21	Realisasi Investasi PMDN menurut Sektor	62
Tabel 2.22	Inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 menurut Kelompok Pengeluaran.....	68
Tabel 2.23	Capaian Indikator Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.....	69
Tabel 2.24	Capaian Indikator Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial.....	71
Tabel 2.25	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu.....	72
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Pendidikan	77
Tabel 2.27	Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Labuhanbatu.....	78
Tabel 2.28	Jumlah Dokter di Kabupaten Labuhanbatu.....	79
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Kesehatan.....	79
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	82
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	83
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Urusan Sosial	84
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja	85
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	86
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Urusan Pangan.....	87
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	88
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	90
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	91
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan	92

Tabel 2.42	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika.....	93
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.....	93
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal.....	94
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga	95
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan	96
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan.....	96
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan.....	97
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Pariwisata.....	98
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan.....	99
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Urusan Pertanian	100
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan	101
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian	102
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan	103
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Urusan Keuangan.....	103
Tabel 2.56	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan	104
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan	105
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah.....	106
Tabel 2.59	Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025	107
Tabel 2.60	Rekapitulasi Rata-Rata Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Labuhanbatu.....	109
Tabel 2.61	Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2021-2026.....	115
Tabel 3.1	PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga konstan 2010 Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah).....	3

Tabel 3.2	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020-2024 (persen)	4
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Persen).....	5
Tabel 3.4	PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024	7
Tabel 3.5	Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020-2024.....	8
Tabel 3.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 – 2024 (%).....	8
Tabel 3.7	Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020-2024	10
Tabel 3.8	Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 s.d. Tahun 2027	12
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 s.d. tahun 2027	26
Tabel 3.10	Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2027	28
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 mengacu pada RPJMD 2025 - 2029	8
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu mengacu pada RPJMD 2025-2029.....	12

Tabel 4.3	Matriks Keterkaitan Misi, Program Hasil Terbaik Cepat dan Kegiatan Strategis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026.....	37
Tabel 5.1	Rekapitulasi Pagu Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Labuhanbatu.....	1
Tabel 5.2	Dukungan Kabupaten Labuhanbatu terhadap PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.....	4
Tabel 5.3	Dukungan Program Daerah Kabupaten Labuhanbatu terhadap 17 (tujuh belas) Progam Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026	7
Tabel 6.1	Benchmarking Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten Labuhabatu 2021-2024	2
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029.....	4
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Labuhanbatu.....	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Alur Penyusunan RKPD	3
Gambar 1.2	Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	10
Gambar 1.3	Kedudukan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	11
Gambar 2.1	Peta Administratif Kabupaten Labuhanbatu.....	2
Gambar 2.2	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu	9
Gambar 2.3	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%).....	10
Gambar 2.4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin).....	12
Gambar 2.5	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman.....	13
Gambar 2.6	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu (2024)	16
Gambar 2.7	Piramida Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024.....	21
Gambar 2.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Dan Nasional (%).....	26
Gambar 2.9	Pdrb Per Kapita Kabupaten Labuhanbatu (Rp Juta)	31
Gambar 2.10	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Dan Nasional (Maret).....	32
Gambar 2.11	Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Dan Nasional (Poin) (Maret)	33
Gambar 2.12	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Dan Nasional (Agustus)	34
Gambar 2.13	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Dan Nasional	35
Gambar 2.14	Usia Harapan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Dan Nasional	36
Gambar 2.15	Prevalensi Stunting Kabupaten Labuhanbatu	37
Gambar 2.16	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Dan Nasional	39
Gambar 2.17	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Dan Nasional	40

Gambar 2.18 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	43
Gambar 2.19 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Labuhanbatu	46
Gambar 2.20 Indeks Perlindungan Anak (Poin)	47
Gambar 2.21 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Labuhanbatu	48
Gambar 2.22 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Labuhanbatu	49
Gambar 2.23 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Labuhanbatu	50
Gambar 2.24 Angka Ketergantungan (Per 100 Penduduk)	52
Gambar 2.25 Rasio Pdrb Sektor Industri Pengolahan (%).....	54
Gambar 2.26 Rasio Pdrb Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum (%)	55
Gambar 2.27 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Labuhanbatu	56
Gambar 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Labuhanbatu	57
Gambar 2.29 Indeks Inovasi Daerah (Poin)	58
Gambar 2.30 Persentase Desa Mandiri (%).....	68
Gambar 2.31 Rasio Pajak Terhadap Pdrb (%)	69
Gambar 2.32 Angka Kriminalitas Kabupaten Labuhanbatu	76
Gambar 2.33 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Labuhanbatu	78
Gambar 2.34 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Labuhanbatu	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026, merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun ke-dua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Labuhanbatu. Oleh karena itu, RKPD kabupaten disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 baik dalam hal perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasinya terintegrasi dengan RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, rancangan awal rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam rangka penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi

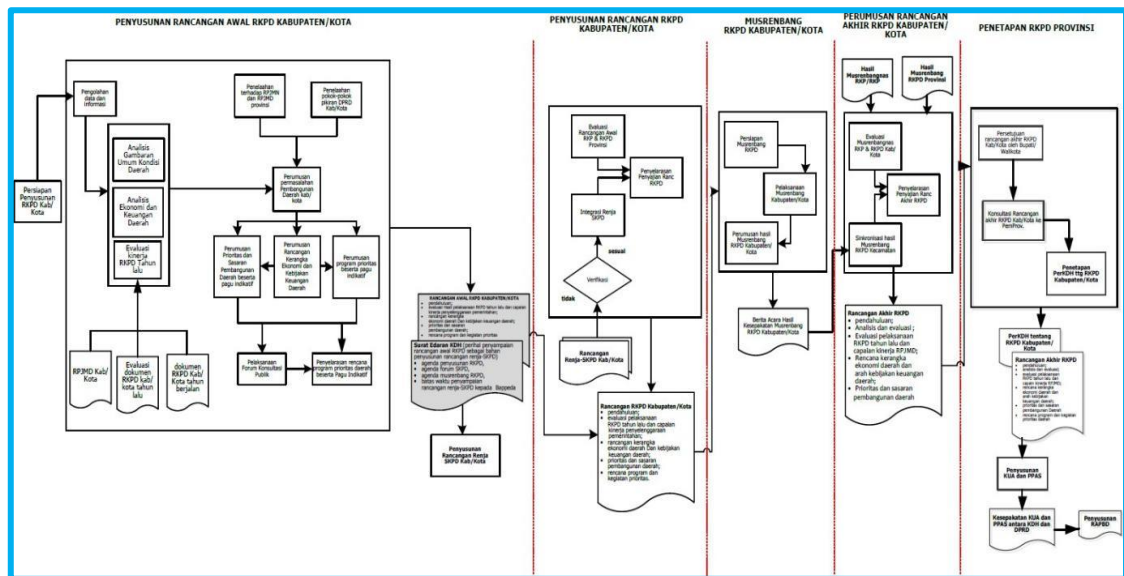
dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026, yang dalam prosesnya dimulai dengan rancangan awal RKPD Tahun 2026 dibuat lebih implementatif melalui pendekatan *top-down*, *bottom-up*, partisipatif, politik, dan teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 menjadi sangat penting karena menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Oleh karena itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja.

Tahap penyusunan RKPD mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi :

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD
- c. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
- d. Penyusunan rancangan RKPD
- e. Pelaksanaan musrenbang RKPD
- f. Perumusan rancangan akhir RKPD
- g. Penetapan RKPD

Secara diagramatis, skema alur penyusunan RKPD dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini.



Gambar 1.1 Skema Alur Penyusunan RKPD

Secara umum, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Periode Tahun 2025-2029;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang indikator kinerjanya dirumuskan dengan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan memperhatikan waktu yang ada;
3. RKPD merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara melalui penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kebijakan *money follow program*, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD;
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, dapat diketahui sejauh mana

capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

1.2 Dasar Hukum

Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Program Strategis Nasional, dan pedoman penyusunan RKPD, secara umum, penyusunan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 juga merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan RANWAL RKPD PROVSU TAHUN 2026 Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021sebagaiman telah diubah terakhir Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2045; (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);

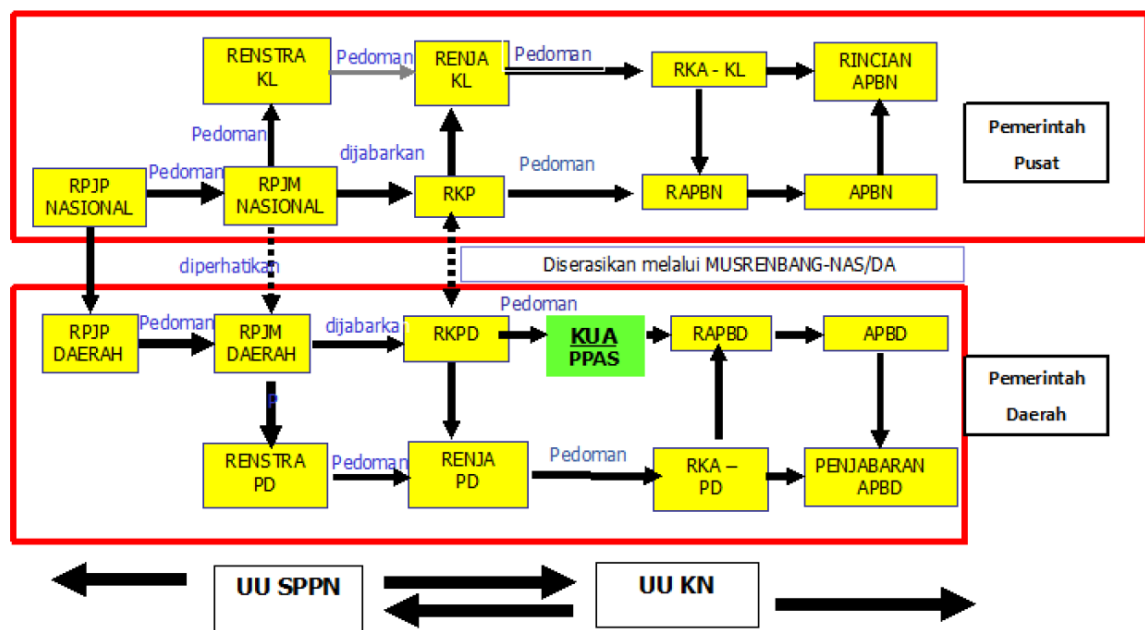
28. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 1).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 Nomor 8).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik vertikal maupun horizontal. Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi dasar penyusunan Rencana

Kerja seluruh Perangkat Daerah, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan RAPBD. Oleh karena itu, RKPD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik sebagai pengendali, output sinkronisasi, ataupun sebagai turunan dari dokumen perencanaan lainnya.

Secara umum, hubungan antara RKPD dengan dokumen lain yang relevan, disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 1.2 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Mengacu pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

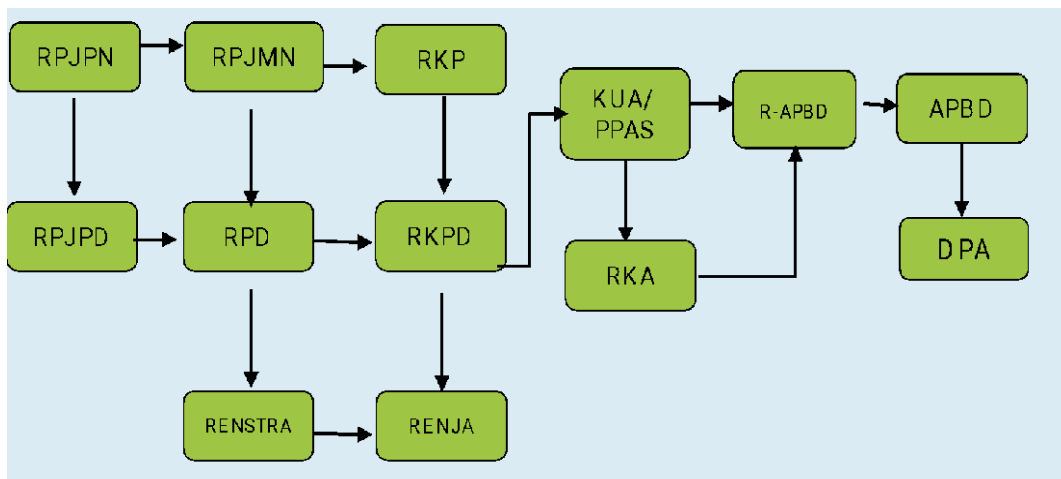
- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang didalamnya memuat arah pembangunan daerah.
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.

- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

Perlu dijelaskan bahwa rumusan isu, tujuan dan program dalam RKPD harus sinkron dengan RPJMD sesuai dengan tahun pelaksanaan, oleh karena itu KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagai dokumen yang terintegrasi dan sinkron dengan RPJMD, secara langsung mempengaruhi rumusan isu, tujuan dan program dalam RKPD. Selain itu, program dan kegiatan pada RKPD juga harus sejalan dengan pola ruang dan struktur ruang yang ditetapkan dalam RTRW khususnya pada Kawasan strategis, Kawasan lindung, Kawasan rawan bencana, dan lain-lain.

Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD, program strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, dan RKPD provinsi. Selanjutnya RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD, rancangan PPAS, serta menjadi pedoman dalam proses penyusunan Rancangan APBD. Dokumen RKPD juga menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan rancangan Renja PD. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan bersinergi dengan proses penyusunan Renja PD.

Selain itu kedudukan RKPD tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Kedudukan RKPD Kabupaten Labuhanbatu secara lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1.3 Kedudukan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 disusun dengan maksud menentukan arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026. Adapun tujuannya adalah:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2026;
3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan nasional dan antara provinsi dengan kabupaten/kota.
4. Menjadi salah satu acuan penting dalam proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Namun perlu dijelaskan bahwa, pengintegrasian dalam RKPD khususnya dengan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai dasar perencanaan yang partisipatif, guna memastikan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan publik, menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan proses perencanaan yang berjenjang dan tepat sasaran.

1.5 Sistematika

Sistematika Rancangan Awal RKPD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2026 disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD/RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD/RPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penyusunan RKPD Kabupaten Labuhanbatu.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran

penyusunan dokumen RKPD bagi daerah

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1 Kondisi Umum Daerah.

Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RKPD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang

bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPD provinsi/kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

3.3 Arah Kebijakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran pembangunan menengah yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 – 2026

4.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.

Suatu prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPD) Tahun 2025 berisi Tema, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPD Provinsi Sumatera utara dan RPJMN.

BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

5.1 Rencana Kerja

Memuat Rencana Program dan Kegiatan pembangunan daerah

beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2025.

5.2 Pendanaan Daerah

Memuat rekapitulasi dan usulan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dengan sumber dana APBD Provinsi, Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Alokasi Khusus, Corporate Social Responsibility.

5.3 Dukungan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaannya terhadap Perencanaan Tematik

Memuat program, kegiatan, sub kegiatan beserta pagu anggaran untuk mendukung Perencanaan Tematik di Kabupaten Labuhanbatu.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama.

BAB VII Penutup

BAB II

KONDISI UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran mengenai kondisi letak, tata ruang, dan kependudukan di suatu daerah.

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

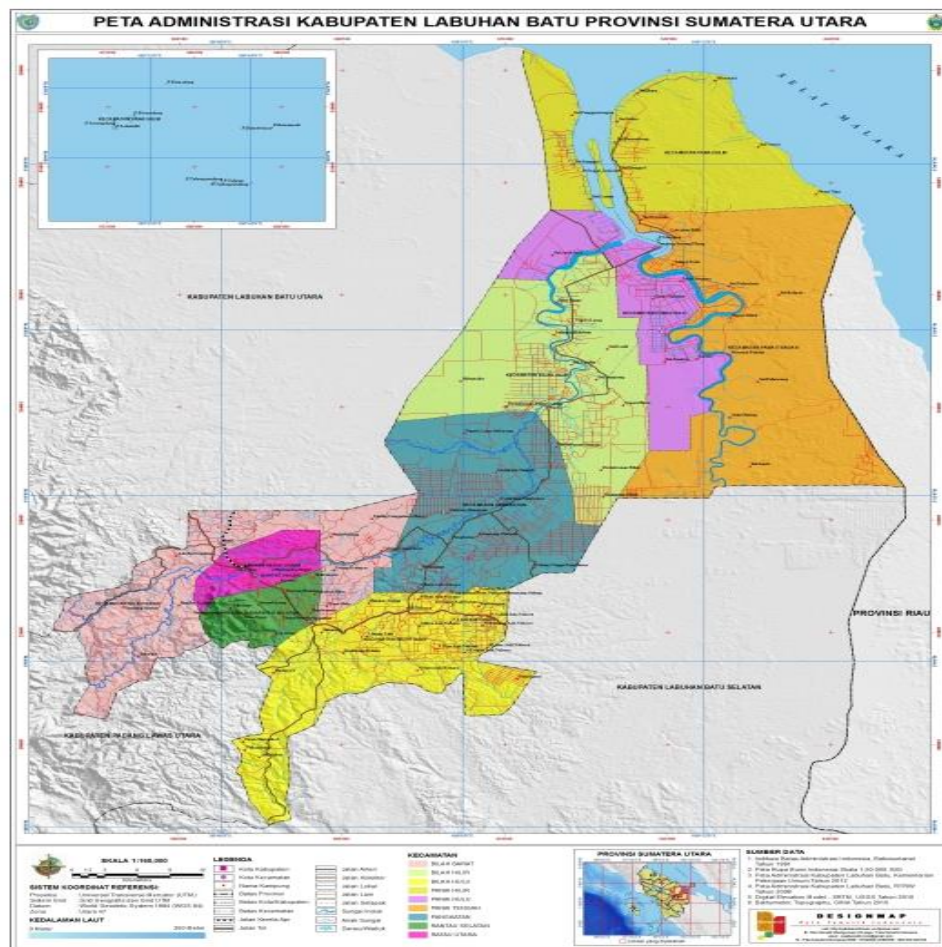
Aspek geografi meliputi gambaran mengenai lokasi, potensi pengembangan, dan kerentanan terhadap bencana pada wilayah perencanaan, untuk mengetahui karakteristik fisik wilayah yang sedang direncanakan.

A Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Labuhanbatu memiliki luas wilayah 2772.257 ha atau 2.772,57 km². Batas wilayah Kabupaten Labuhanbatu secara administratif adalah:

- Sebelah Utara Labuhanbatu berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas Utara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Peta administrasi Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: RTRW Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu dibagi atas wilayah pesisir dan non pesisir pantai dengan kode wilayah 12.10.02 dan memiliki total luas wilayah 2.772,57 ha atau 277.257 km². Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 9 kecamatan, 23 kelurahan, dan 75 desa. Berikut adalah rincian data administrasi wilayah Kabupaten Labuhanbatu

Tabel 2.1 Administrasi Kecamatan Labuhanbatu

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
			(Km ²)	(%)	Kelurahan	Desa
1	Bilah Hulu	Aek Nabara	385,02	13,89	24	24
2	Pangkatan	Pangkatan	271,13	9,78	7	7
3	Bilah Barat	Janji	291,05	10,50	10	10
4	Bilah Hilir	Negeri Lama	472,26	17,03	13	11
5	Panai Hulu	Tanjung Sarang Elang	225,98	8,15	7	7

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah	
6	Panai Tengah	Labuhan Bilik	584,56	21,08	10	9
7	Panai Hilir	Sei Berombang	391,13	14,10	8	7
8	Rantau Selatan	Sioldengan	60,20	2,17	9	-
9	Rantau Utara	Rantauprapat	91,24	3,29	10	-
Kabupaten Labuhanbatu			2.772,57	100	98	75

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Panai Tengah adalah kecamatan terluas dengan persentase luasan 21,08 persen dari total luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Kecamatan Bilah Hilir sebesar 17,03 persen, dan Panai Hilir sebesar 14,10 persen.

B Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Labuhanbatu terletak pada koordinat antara 1°41'-2°44' Lintang Utara (LU) dan 99°33'-100°22' Bujur Timur (BT) dan berada pada ketinggian 0-700 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu terletak pada kawasan Pantai Timur pulau Sumatera. Selain itu juga mempunyai posisi yang sangat strategis karena dilintasi jalur antar provinsi dan berada di persimpangan antara Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

C Kondisi Topografi

Kondisi topografi wilayah dapat dilihat dari dua jenis, yaitu ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Berdasarkan ketinggian lahan, Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari daerah dataran rendah dan perbukitan, wilayah yang terletak pada ketinggian 0-10 m di atas permukaan laut (DPL) seluas 172,770 (67,45%), 11-25 m di atas permukaan laut (DPL) seluas 72,697 ha (28,38%), 26-100 m di atas permukaan laut (DPL) seluas 49,67 ha (0,02%) dan lebih dari 100 m di atas permukaan laut (DPL) seluas 10,621 ha (4,15%).

Wilayah Kabupaten Labuhanbatu berada pada kemiringan antara 0-2% seluas 224.886 ha (87,80%), kemiringan antara 2-15% seluas 13.738 ha (5,36%), kemiringan antara 15-40% seluas 12.537

ha (4,89%) dan lebih dari 40% seluas 4,977 ha (1,94%). Kondisi kemiringan lahan ini berpengaruh terhadap pengembangan pembangunan fisik maupun perencanaan strategis lainnya.

D Kondisi Geologi

Kondisi geologi wilayah Kabupaten Labuhanbatu terdiri atas tekstur tanah halus seluas 205.404 ha (80,19%) dan tekstur tanah sedang seluas 50.734 ha (19,81%). Wilayah dengan kedalaman efektif antara 30-60 cm mencapai 69.019 ha (26,95%), kedalaman 60-90 cm mencapai 98.026 ha (38,27%), lebih dari 90 cm seluas 10.800 ha (4,22%) dan lahan gambut seluas 78.293 ha (30,57%). Kondisi geologi Labuhanbatu menurut jenisnya terdiri dari Alluvial seluas 115.519 ha (45,10%), Pasir Kerikil seluas 70.800 ha (27,64%), Batu Pasir seluas 31.051 ha (12,12%) dan Jenis lainnya seluas 38.767 ha (15,14%). Sedangkan menurut jenis tanah terdiri atas potsolik seluas 61.237 ha (23,91%), organosol seluas 180.936 ha (70,64%) dan jenis lainnya seluas 13.965 ha (5,45%).

E Kondisi Hidrologi

Kabupaten Labuhanbatu terdiri atas sungai besar dan sungai kecil. Dua Sungai besar, yaitu sungai Barumun dan Sungai Bilah dengan lebar 16m-250m, sedangkan sungai kecil adalah sebagai anak sungai. Muara dari kedua sungai besar tersebut adalah Selat Malaka dengan debit 97-195 m/det. Dengan kondisi ini, maka wilayah Labuhanbatu memiliki daerah tergenang secara periodik seluas $\pm$ 151,208 ha atau 59,03% dan daerah yang tergenang terus menerus atau rawa seluas $\pm$ 5,210 ha atau 2,03%. Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai besar/utama di Kabupaten Labuhanbatu tersebut, yaitu:

1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Barumun meliputi wilayah Kecamatan Panai Tengah.
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bilah meliputi Kecamatan Bilah

Barat, Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah Hulu, Pangkatan, Bilah Hilir, Panai Hulu dan Panai Hilir.

Wilayah Labuhanbatu memiliki daerah yang tergenang secara periodik seluas $\pm 151,208$ ha atau 59,03% dan daerah yang tergenang terus menerus atau daerah rawa seluas $\pm 5,210$ ha atau 2,03 persen. Berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten Labuhanbatu yaitu Sungai Barumon dan Sungai Bilah dengan lebar antara 16 m - 250 m, diperkirakan debit sungai tersebut di atas adalah 97 - 195 m/det.

F Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi dapat diamati dari berbagai hal, beberapa di antaranya adalah curah hujan, suhu, dan kelembaban. Kabupaten Labuhanbatu termasuk daerah yang beriklim tropis, yang memiliki 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Secara umum rata-rata temperatur di Kabupaten Labuhanbatu adalah 28,60 dengan suhu maksimum 36,50 C dan suhu minimum 20,40 C. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Labuhanbatu didominasi pada bulan Januari, September dan Oktober seperti halnya wilayah lain di Pulau Sumatera. Selama tahun 2023, rata-rata hari hujan di Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 15,83 hari per bulan dengan rata-rata curah hujan 297,108 mm per bulan. Sedangkan, kelembaban rata-rata 77,93 persen dengan kelembaban tertinggi pada sore hari dan terendah pada pagi hari.

Tabel 2.2 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Station Klimatologi Kabupaten Labuhanbatu

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max
Januari/January	21,0	28,4	35,2	52,0	77,4	99,0
Februari/February	21,4	28,1	34,3	54,0	80,2	100,0
Maret/March	21,7	29,3	35,9	50,0	75,8	100,0
April/April	22,0	29,4	35,4	50,0	75,7	99,0
Mei/May	21,8	29,9	35,9	51,0	75,9	99,0
Juni/June	20,8	28,9	36,0	43,0	77,8	100,0

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
Juli/ <i>July</i>	21,8	29,9	36,5	44,0	73,6	99,0
Agustus/ <i>August</i>	21,7	29,2	36,5	44,0	76,6	99,0
September/ <i>September</i>	21,4	28,9	35,4	49,0	76,2	99,0
Oktober/ <i>October</i>	22,2	28,2	35,4	52,0	81,2	100,0
November/ <i>November</i>	22,0	28,1	34,4	55,0	81,0	100,0
Desember/ <i>December</i>	20,4	26,9	33,7	58,0	83,8	99,0

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

G Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Labuhanbatu meliputi kawasan lindung dan budidaya disesuaikan dengan RT/RW Kabupaten Labuhanbatu yang diatur dalam PERDA Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035.

Tabel 2.3 Penggunaan Lahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023

No.	Guna Lahan	Luas (Ha)
1	Kawasan Perumahan	1.371
2	Kawasan Perdagangan dan Jasa	53,97
3	Kawasan Lindung	3.215
4	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Labuhanbatu diarahkan kepada pengembangan kawasan budidaya. Pengembangan kawasan budidaya diarahkan kepada Kawasan Peruntukkan Pertanian, Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit, Kawasan Perkebunan Karet, Kawasan Budidaya Perikanan, Kawasan Peruntukkan Industri, Kawasan Peruntukkan Permukiman dan Kawasan Peruntukkan Lainnya.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia. Dalam lingkup RTRW Kabupaten Labuhanbatu, pengarahan

kawasan budidaya diarahkan untuk:

- Memberikan arahan pola ruang kawasan budidaya secara optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan
- Memberikan arahan untuk menentukan prioritas pola ruang antara kegiatan budidaya yang berlainan
- Memberikan arahan bagi perubahan jenis pola ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu ke jenis lainnya.

Dalam RTRW Kabupaten Labuhanbatu, penentuan kawasan budidaya didasarkan pada:

- Kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelumnya dan menjadi limitasi bagi penetapan kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Labuhanbatu
- Kriteria kawasan budidaya menurut pedoman penyusunan rencana tata ruang
- Hasil analisis kesesuaian lahan

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan konsep fundamental dalam mewujudkan keseimbangan dinamis antara pembangunan berkelanjutan dan pelestarian ekosistem. Konstruksi ini melampaui pendekatan konvensional pengelolaan lingkungan, menciptakan paradigma holistik yang mengintegrasikan secara sistematis kepentingan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlangsungan ekologis. Pendekatan komprehensif ini mensyaratkan pemahaman mendalam tentang kapasitas sistem alamiah dalam menyerap berbagai intervensi pembangunan, mengatur mekanisme regenerasi sumber daya alam, serta menjaga keseimbangan komponen ekosistem.

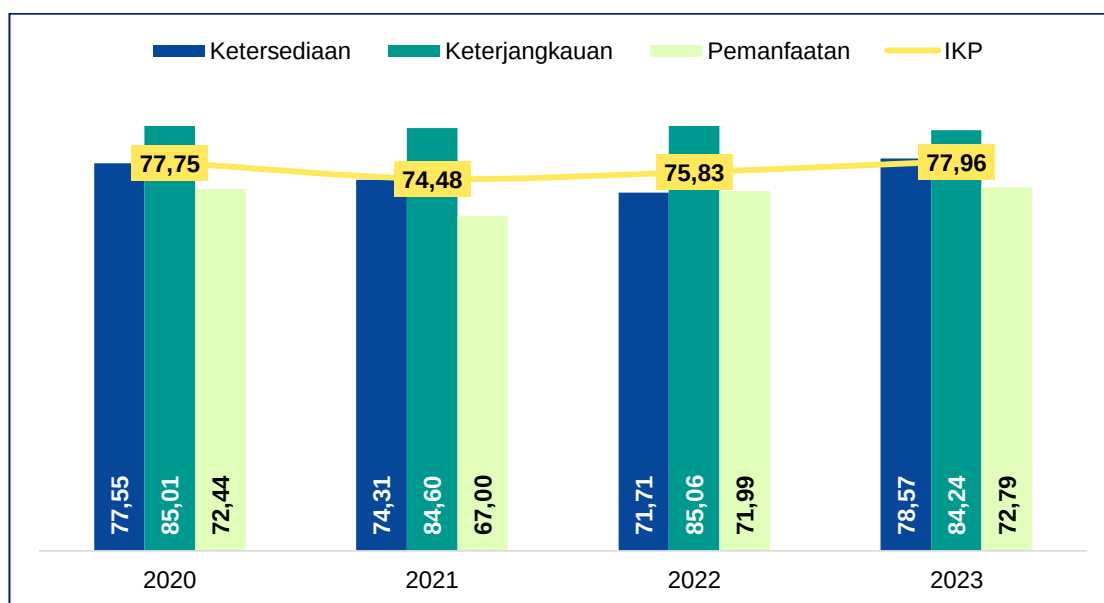
2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan sistem infrastruktur nasional

yang berkelanjutan, tangguh, dan berkeadilan. Konstruksi ketahanan ini tidak sekadar fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan mentransformasi paradigma pengelolaan sumber daya strategis menjadi ekosistem yang terintegrasi, inovatif, dan berbasis potensi lokal. Pendekatan komprehensif ini mensyaratkan redesain sistemik dalam tata kelola energi, sumber daya air, dan sistem pangan, yang tidak hanya menjamin ketersediaan, melainkan menciptakan mekanisme produksi, distribusi, dan pemanfaatan yang efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan.

A Pangan

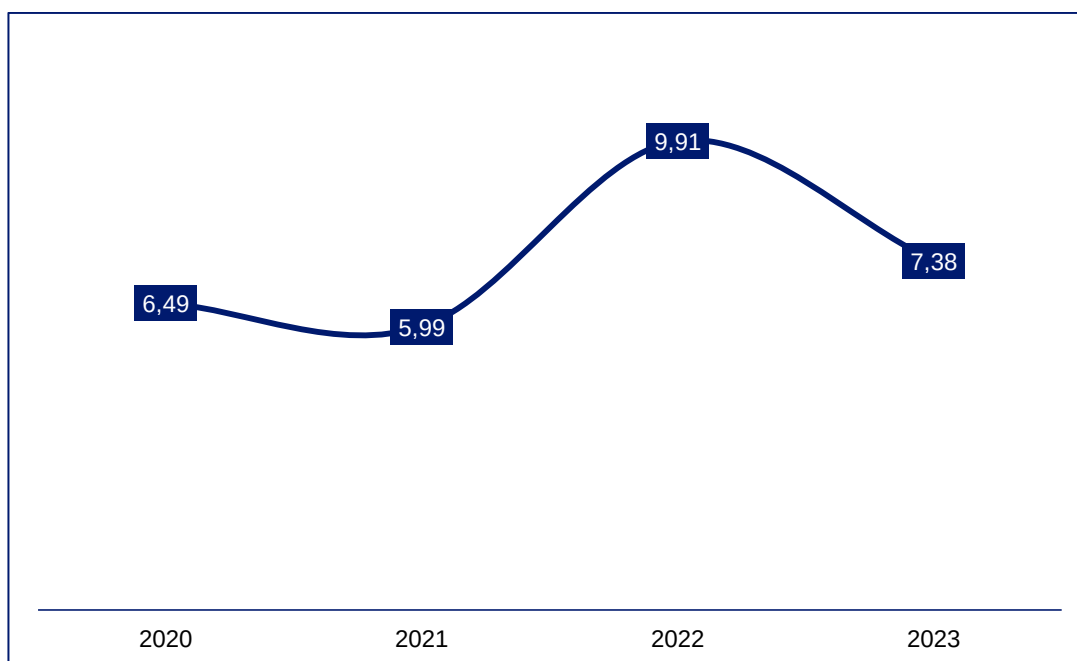
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator yang mengukur ketahanan pangan suatu daerah dengan menggunakan 3 aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan pada Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Gambar 2.2 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: Badan Pangan Nasional

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu cenderung meningkat dari 77,75 poin pada tahun 2020 menjadi 77,96 poin pada tahun 2023. Begitu juga dengan komponen penyusunnya, baik dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan cenderung meningkat selama tahun 2019 hingga 2023. Namun, perlu diperhatikan juga apakah distribusi pangan dapat dijangkau dan dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Untuk melihat kecukupan konsumsi pangan masyarakat, maka dapat dilihat dari indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*), yaitu indikator yang mengukur persentase penduduk suatu wilayah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi makanan minimum untuk hidup aktif dan sehat.



Gambar 2.3 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)

Sumber: BPS

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Labuhanbatu cenderung meningkat dari 6,49 persen pada tahun 2020 menjadi 7,38 persen pada tahun 2023. Jika dilihat jumlah penduduknya, maka terdapat sebanyak 37.907 orang yang belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsinya. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menjaga ketersediaan dan

kestabilan harga pangan agar seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangannya.

B Listrik

Listrik adalah energi yang dihasilkan dari konversi sumber daya primer (batubara, gas, energi terbarukan, dll.) menjadi daya listrik melalui pembangkit, lalu didistribusikan untuk menyalakan peralatan, industri, dan infrastruktur. Ketersediaan listrik menjadi penting karena menyangkut aktivitas seluruh masyarakat.

C Air

Air merupakan sumber daya alam berbentuk cair yang digunakan untuk konsumsi langsung (minum, sanitasi), pertanian, industri, dan ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa air sangat dibutuhkan oleh kelangsungan hidup masyarakat sehingga pemerintah harus bisa memastikan ketersediaan air yang cukup.

Tabel 2.4 Capaian Indikator Ketahanan Air

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	0,30	0,30	0,30	0,30	N/A
Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman (%)	10,12	10,32	10,68	11,00	N/A

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Siperindu

Kapasitas Air Baku selama tahun 2020-2023 sebanyak 0,30 m³/detik, di mana hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi penambahan kapasitas air untuk Kabupaten Labuhanbatu. Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman mengalami peningkatan dari 10,12 persen pada tahun 2020 menjadi 11,00 persen pada tahun 2024. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat hanya sekitar 11 persen rumah tangga saja yang memperoleh air minum yang aman untuk dikonsumsi, sementara mayoritas belum memperolehnya. Pemerintah perlu memastikan jaringan distribusi air yang aman kepada masyarakat agar seluruh

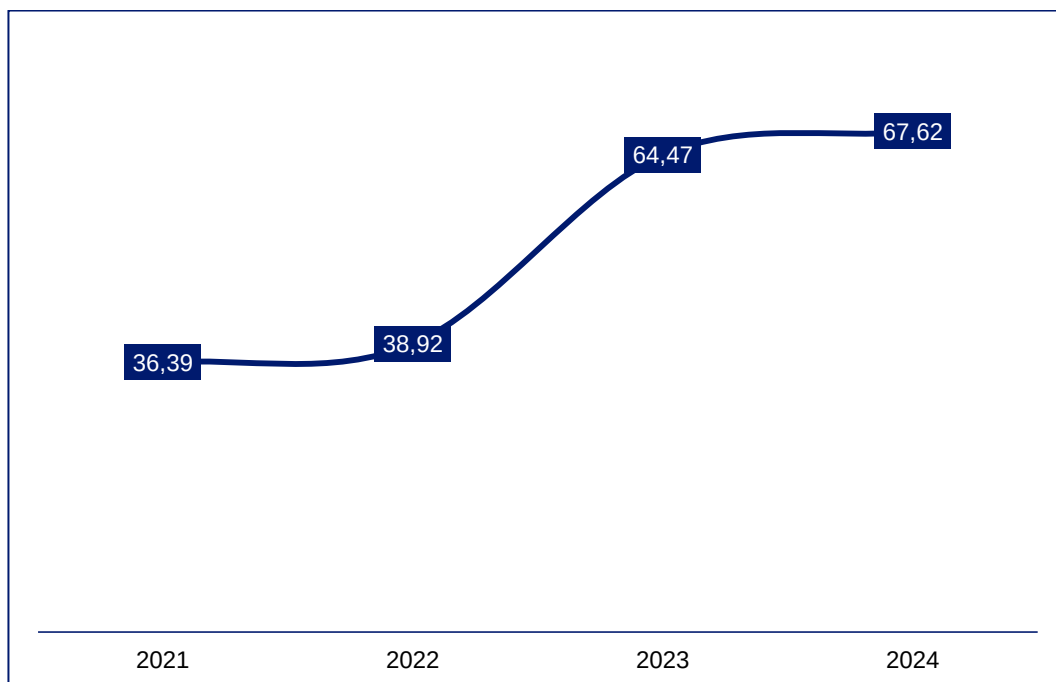
masyarakat dapat memperoleh air minum aman, di mana hal ini penting karena menyangkut kesehatan masyarakat.

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan Hidup Berkualitas merujuk pada kondisi alam yang mampu mendukung kehidupan secara berkelanjutan, ditandai dengan udara bersih, air yang layak konsumsi, ekosistem yang seimbang, serta minimnya polusi dan kerusakan alam. Lingkungan seperti ini tidak hanya menjamin kesehatan manusia tetapi juga menjaga keanekaragaman hayati dan kestabilan iklim. Untuk mencapai lingkungan hidup yang berkualitas, maka pemerintah perlu menerapkan pembangunan berkelanjutan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, konservasi energi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga alam. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus berkolaborasi menerapkan kebijakan ramah lingkungan, teknologi hijau, dan gaya hidup berkelanjutan demi mewujudkan lingkungan hidup yang sehat untuk generasi saat ini dan mendatang.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator komposit yang mengukur tingkat kualitas lingkungan suatu wilayah berdasarkan parameter udara, air, tutupan lahan, dan kualitas ekosistem. IKLH dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai alat evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan berkelanjutan.



Gambar 2.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)

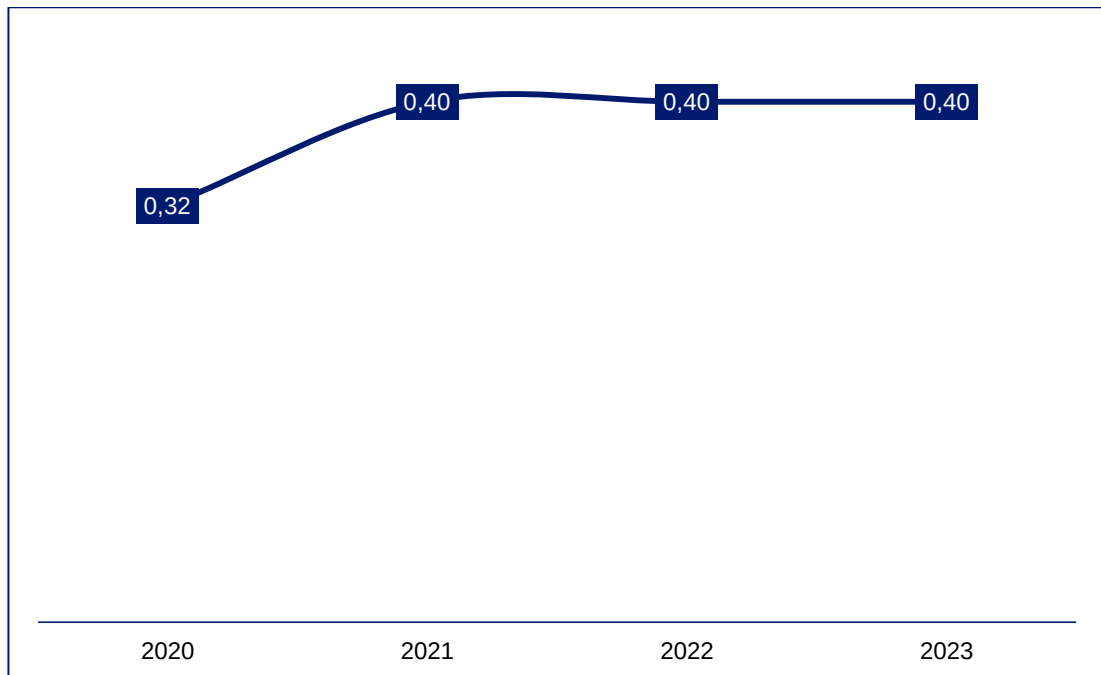
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari 36,39 poin pada tahun 2021 menjadi 67,62 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas udara, air, dan tutupan lahan di Kabupaten Labuhanbatu semakin membaik. Namun perlu diingat bahwa hal ini masih menunjukkan banyak hal yang perlu diperhatikan terkait kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu mengelola lingkungannya dengan menurunkan polusi udara, memanfaatkan energi baru terbarukan, serta mengelola persampahan agar tidak mencemari lingkungan sehingga memitigasi potensi munculnya penyakit tertentu kepada masyarakat.

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman mengacu pada proporsi penduduk yang menggunakan fasilitas sanitasi dasar yang memenuhi standar kesehatan, seperti jamban dengan tangki septik yang terhubung ke sistem pengolahan limbah atau sarana sanitasi lain yang memisahkan kontak manusia dengan kotoran secara efektif. Akses ini sangat penting untuk mencegah penyebaran

penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kolera, atau *stunting* akibat kontaminasi tinja.



Gambar 2.5 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Labuhanbatu hanya mencapai 0,40 persen hingga tahun 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah karena akan berakibat bagi kesehatan masyarakatnya. Pemerintah harus mendorong peningkatan akses sanitasi aman melalui berbagai program, seperti pembangunan infrastruktur sanitasi berkelanjutan yang inklusif terutama ke daerah-daerah yang terpencil.

Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah pelepasan gas-gas ke atmosfer yang memiliki sifat menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah dari matahari. Gas-gas ini kemudian memerangkap panas di atmosfer Bumi, menyebabkan efek yang dikenal sebagai Efek Rumah Kaca. Setiap daerah dituntut untuk mengurangi emisi GRK melalui penggunaan energi baru terbarukan, bahan bakar ramah lingkungan, dan pelaksanaan pembangunan hijau

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan proses terpadu yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir limbah dengan prinsip mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang (3R). Pengelolaan dimulai dari pemisahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga, dilanjutkan dengan pengumpulan terjadwal menggunakan armada khusus, kemudian diangkut ke tempat pengolahan seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Metode pengolahannya beragam, mulai dari composting untuk sampah organik, daur ulang plastik/kertas hingga teknologi modern seperti *waste to energy*. Capaian kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Capaian Indikator Pengelolaan Sampah

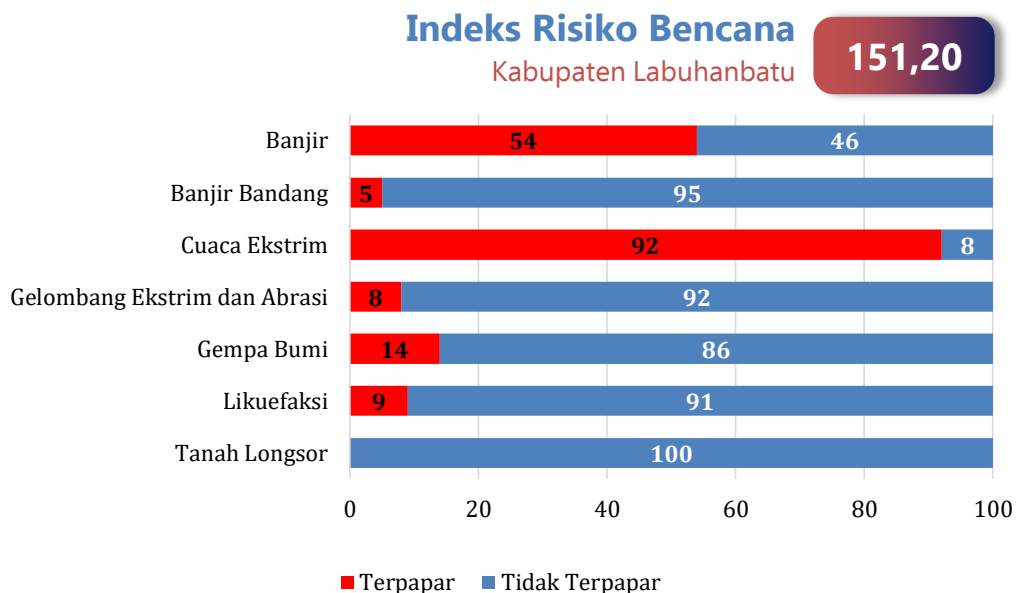
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15,40	22,90	24,90	15,30	N/A
Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	0,65	0,90	1,70	2,00	N/A

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten Labuhanbatu sebesar 15,40 persen pada tahun 2020 menurun menjadi 15,30 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah masih belum optimal. Proporsi RT dengan layanan penuh pengumpulan sampah meningkat dari 0,65 persen pada tahun 2020 menjadi 2,00 persen pada tahun 2023. Indikator ini merupakan rumah tangga yang telah menghasilkan sampah dan mendapatkan layanan pengumpulan sampah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah di Kabupaten Labuhanbatu.

2.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bencana dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam mau pun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Berdasarkan sumber dan penyebabnya, bencana dapat dibagi dua, yaitu bencana alam dan bencana non alam. Yang termasuk dalam bencana alam adalah segala jenis bencana yang sumber, perilaku dan faktor penyebab/pengaruhnya berasal dari alam. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung api, kekeringan, angin ribut dan tsunami adalah contoh-contoh bencana alam.



Gambar 2.6 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu (2024)

Sumber: BNPB

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Labuhanbatu pada tahun

2024 sebesar 124,98 poin dengan kategori tinggi. Secara spesifik, bencana yang paling berdampak pada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu adalah cuaca ekstrim yang berdampak pada 92 persen masyarakat Labuhanbatu, kemudian Banjir yang berdampak pada 54 persen masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia, Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 mengalami 13 kejadian bencana yang terdiri dari 4 kejadian banjir dan 9 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kejadian banjir tersebut disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan banjir di beberapa wilayah dan diperparah oleh luapan air sungai. Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh cuaca ekstrim sehingga menyebabkan kebakaran di beberapa wilayah.

2.1.7 Demografi

Demografi adalah studi tentang penduduk yang dilihat dari ukuran (jumlah), struktur/komposisi, persebaran keruangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur dan persebaran penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi di suatu wilayah tertentu.

A Jumlah dan Struktur Penduduk

Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Struktur penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang disajikan berikut ini didasarkan pada kelompok umur.

Tabel 2.6 Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Menurut Kelompok Umur

Kelompok Usia	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	47.326	47.394	47.658	48.200	48.660
5-9	48.068	48.243	48.581	47.450	47.300
10-14	46.273	46.487	46.896	47.100	47.350
15-19	46.787	46.784	47.051	46.120	45.940
20-24	45.128	44.876	44.759	45.639	45.870
25-29	44.751	45.004	45.388	44.500	44.280

Kelompok Usia	2020	2021	2022	2023	2024
30-34	40.714	41.162	41.746	42.879	43.510
35-39	37.389	37.927	38.617	38.840	39.390
40-44	33.596	34.198	34.891	35.500	36.090
45-49	28.509	29.223	30.060	31.198	32.040
50-54	23.083	23.744	24.498	25.760	26.740
55-59	18.881	19.552	20.304	20.630	21.290
60-64	14.336	14.954	15.641	16.310	16.950
65-69	9.631	10.214	10.806	11.520	12.140
70-74	5.068	5.562	6.114	6.840	7.440
75+	4.359	4.658	5.014	5.160	5.610
Total	493.899	499.982	508.024	513.646	520.600

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel tersebut, kelompok umur penduduk terbanyak adalah 0-4 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 48.660 jiwa, kemudian kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 47.300 jiwa, dan penduduk usia 10-14 tahun sebanyak 47.350 jiwa. Sementara, penduduk paling sedikit pada kelompok umur 75+ tahun sebanyak 5.610 jiwa, kemudian 70-74 tahun sebanyak 7.440 jiwa, dan kelompok umur 65-69 tahun sebanyak 12.149 jiwa. Penduduk usia produktif di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 sebanyak 352.100 jiwa dan penduduk usia non produktif sebanyak 168.500 jiwa. Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan distribusinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Menurut Kecamatan

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Distribusi (%)
Bilah Hulu	64.416	64.949	65.729	66.516	67.134	12,90
Pangkalan	37.766	38.229	38.841	39.285	39.796	7,65
Bilah Barat	39.953	40.422	41.049	41.521	42.041	8,08
Bilah Hilir	59.370	60.094	61.053	61.751	62.550	12,02
Panai Hulu	38.028	38.359	38.836	39.299	39.679	7,62
Panai Tengah	41.143	41.767	42.557	43.027	43.703	8,40
Panai Hilir	42.761	43.300	44.008	44.509	45.102	8,66
Rantau Selatan	73.977	75.395	77.126	77.936	79.452	15,26
Rantau Utara	96.485	97.467	98.825	99.982	101.088	19,42
Total	493.899	499.982	508.024	513.826	520.545	100,00

Sumber: BPS

Berdasarkan data dari BPS dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak berada pada Kecamatan Rantau Utara sebanyak 101.088 jiwa atau sebesar 19,42 persen dari total penduduk, kemudian Kecamatan Rantau Selatan sebanyak 79.452 orang atau sebesar 15,26 persen dari total penduduk, dan Kecamatan Bilah Hulu sebanyak 67.134 orang atau sebesar 12,90 persen dari total penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk, terutama wilayah yang padat penduduk perlu menjadi perhatian bagi pemerintah agar menyediakan fasilitas publik yang memadai sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

B Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan dalam dokumen ini adalah metode geometrik.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Bilah Hulu	-1,30	0,83	1,20	1,20	0,93
Pangkatan	10,50	1,23	1,60	1,14	1,30
Bilah Barat	-4,01	1,17	1,55	1,15	1,25
Bilah Hilir	12,12	1,22	1,60	1,14	1,29
Panai Hulu	-6,42	0,87	1,24	1,19	0,97
Panai Tengah	-0,46	1,52	1,89	1,10	1,57
Panai Hilir	13,35	1,26	1,64	1,14	1,33
Rantau Selatan	-8,19	1,92	2,30	1,05	1,95
Rantau Utara	-3,40	1,02	1,39	1,17	1,11
Total	-0,06	1,23	1,61	1,14	1,31

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

Secara total, laju pertumbuhan penduduk relatif meningkat dari -0,06 persen pada tahun 2020 menjadi 1,31 persen pada tahun

2024. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk terbesar berada pada Kecamatan Rantau Selatan sebesar 1,95 perse, sementara laju pertumbuhan penduduk terendah berada pada Kecamatan Bilah Hulu sebesar 0,93 persen.

C Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk menggambarkan seberapa banyak jumlah penduduk pada satu satuan luas dari suatu wilayah. Dari 9 Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, Pada tahun 2024, jumlah penduduk Labuhanbatu sebanyak 520.545 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 203,23 jiwa per km².

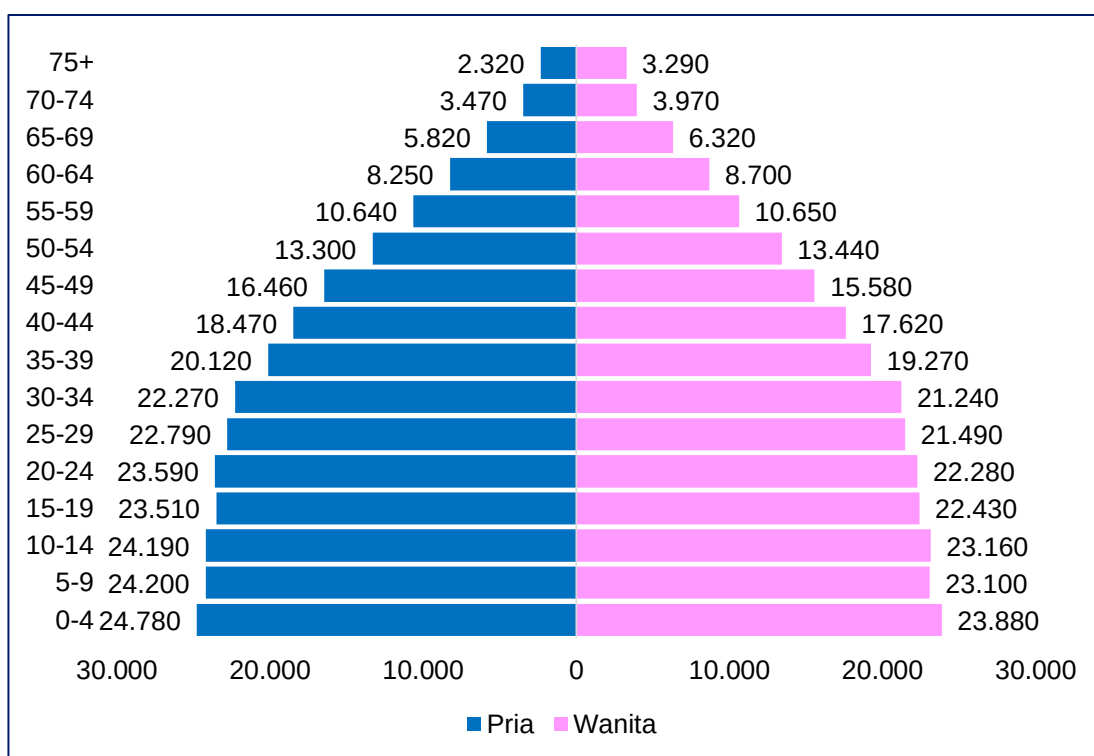
Tabel 2.9 Distribusi Penduduk Kabupaten Labuhanbatu (Jiwa/Km²)					
Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Bilah Hulu	219,68	221,50	224,16	226,84	228,95
Pangkalan	106,24	107,54	109,27	110,52	111,95
Bilah Barat	196,83	199,14	202,23	204,56	207,12
Bilah Hilir	137,80	139,48	141,71	143,33	145,18
Panai Hulu	137,63	138,83	140,55	142,23	143,60
Panai Tengah	85,05	86,34	87,97	88,95	90,34
Panai Hilir	125,02	126,60	128,67	130,13	131,87
Rantau Selatan	1.150,14	1.172,19	1.199,10	1.211,69	1.235,26
Rantau Utara	857,87	866,60	878,68	888,97	898,80
Total	192,83	195,20	198,34	200,61	203,23

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

Kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat berada pada Kecamatan Rantau Selatan sebanyak 1.235,26 jiwa/km² dan Rantau Utara sebanyak 898,80 jiwa/km². Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah perlu memastikan apakah fasilitas yang tersedia sudah memenuhi kebutuhan setiap penduduknya, terutama di wilayah yang padat penduduk. Pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan tempat tinggal, terutama di wilayah yang sangat padat penduduk.

D Piramida Penduduk

Piramida penduduk adalah suatu representasi grafis yang menggambarkan komposisi penduduk suatu wilayah berdasarkan usia dan jenis kelamin pada suatu waktu tertentu. Priamida penduduk tersusun dari dua diagram batang yang saling berlawanan, di mana sumbu vertikal mewakili kelompok usia (dari muda di bagian bawah hingga tua di bagian atas), dan sumbu horizontal mewakili jumlah atau persentase populasi, dengan sisi kiri untuk populasi laki-laki dan sisi kanan untuk populasi perempuan.



Gambar 2.7 Piramida Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

Piramida Penduduk Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 membentuk pola ekspansif yang menandakan bahwa angka kelahiran di Kabupaten Labuhanbatu meningkat dan penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk lansia. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa penduduk pria dan wanita relatif seimbang pada setiap kelompok usia. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu harus memastikan bahwa pembangunan yang

dilakukan memenuhi kebutuhan penduduk pada setiap kelompok usia. Fasilitas pendidikan harus tersedia mengingat angka kelahiran yang cukup tinggi, begitu juga fasilitas kesehatan agar seluruh masyarakat dapat merasakannya, serta memastikan ketersediaan lapangan kerja ke depannya untuk memenuhi tenaga kerja yang kemungkinan akan meningkat di masa mendatang.

E Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Usia

Proyeksi penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Usia

Kelompok Usia	2025	2026	2027	2028	2029
0–4	50.671	50.906	51.135	51.351	51.556
5–9	46.701	47.129	47.660	48.295	49.032
10–14	46.753	46.604	46.453	46.311	46.180
15–19	46.469	46.372	46.293	46.227	46.155
20–24	45.953	45.930	45.879	45.811	45.756
25–29	44.660	44.719	44.828	44.960	45.087
30–34	43.528	43.677	43.744	43.768	43.797
35–39	40.535	41.012	41.493	41.951	42.343
40–44	36.895	37.466	38.004	38.521	39.044
45–49	32.320	33.056	33.765	34.448	35.104
50–54	27.012	27.771	28.563	29.369	30.173
55–59	22.117	22.722	23.344	23.996	24.680
60–64	17.477	18.044	18.587	19.115	19.652
65–69	12.397	12.952	13.535	14.136	14.719
70–74	8.038	8.473	8.877	9.272	9.677
75+	5.517	5.952	6.428	6.927	7.435
Total	527.043	532.785	538.590	544.458	550.390

Sumber: BPS (diolah, 2024)

Penduduk Kabupaten Labuhanbatu diproyeksikan meningkat dari 527.043 jiwa pada tahun 2025 menjadi 550.390 jiwa pada tahun 2029 atau meningkat sebanyak 23.347 jiwa selama 5 tahun.

F Proyeksi Penduduk menurut Kecamatan

Proyeksi penduduk Kabupaten Labuhanbatu menurut kecamatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan data historis

jumlah penduduk, Total Fertility Rate (TFR), Age Specific Fertility Rate (ASFR), dan usia harapan hidup. Hasil proyeksi penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Proyeksi Penduduk menurut Kecamatan

Kecamatan	2025	2026	2027	2028	2029
Bilah Hulu	68.252	68.996	69.747	70.507	71.276
Pangkalan	40.266	40.704	41.148	41.597	42.048
Bilah Barat	42.585	43.049	43.518	43.992	44.472
Bilah Hilir	63.351	64.041	64.739	65.444	66.157
Panai Hulu	40.319	40.758	41.202	41.651	42.105
Panai Tengah	44.113	44.594	45.080	45.571	46.068
Panai Hilir	45.642	46.139	46.642	47.150	47.664
Rantau Selatan	79.952	80.824	81.704	82.594	83.494
Rantau Utara	102.563	103.680	104.810	105.952	107.106
Total	527.043	532.785	538.590	544.458	550.390

Sumber: BPS (diolah, 2024)

Penduduk Kabupaten Labuhanbatu diproyeksikan meningkat dari 527.043 orang pada tahun 2025 menjadi 550.390 orang pada tahun 2029. Penduduk paling banyak berada pada Kecamatan Rantau Utara sebanyak 107.106 orang, sementara penduduk paling sedikit berada pada Kecamatan Pangkalan sebanyak 42.048 orang. Dengan adanya proyeksi ini, diharapkan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menjadikannya sebagai landasan untuk perencanaan pembangunan selama 5 tahun ke depan agar setiap kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat terpenuhi dengan baik.

G Proyeksi Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan

Proyeksi kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu merupakan banyaknya penduduk persatuan luas yang digunakan sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk. Kepadatan penduduk diproyeksikan berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan luas wilayah masing-masing kecamatan.

Hasil proyeksi kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

Tabel 2.12 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Menurut Kecamatan

Kecamatan	2025	2026	2027	2028	2029
Bilah Hulu	68,252	68,996	69,747	70,507	71,276
Pangkalan	40,266	40,704	41,148	41,597	42,048
Bilah Barat	42,585	43,049	43,518	43,992	44,472
Bilah Hilir	63,351	64,041	64,739	65,444	66,157
Pantai Hulu	40,319	40,758	41,202	41,651	42,105
Pantai Tengah	44,113	44,594	45,080	45,571	46,068
Pantai Hilir	45,642	46,139	46,642	47,150	47,664
Rantau Selatan	79,952	80,824	81,704	82,594	83,494
Rantau Utara	102,563	103,680	104,810	105,952	107,106
Total	527,043	532,785	538,590	544,458	550,390

Sumber: BPS (diolah, 2024)

Kepadatan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu diproyeksikan meningkat dari 527,043 jiwa/km² pada tahun 2025 menjadi 550,390 jiwa/km² pada tahun 2029. Pada tahun 2029 penduduk terpadat berada pada Kecamatan Rantau Utara sebanyak 107,106 jiwa/km². Kemudian di Kecamatan Rantau Selatan sebanyak 83,494 jiwa/km², serta di Kecamatan Bilah Hulu sebanyak 71,276 jiwa/km². Sementara, proyeksi kepadatan terkecil terjadi di Kecamatan Pangkalan sebesar 42,048 jiwa/km², kemudian kecamatan Pantai Hulu sebesar 42,105 jiwa/km², serta Kecamatan Bilah Barat sebesar 44,472 jiwa/km².

H Proyeksi Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan

Proyeksi penduduk di Kabupaten Labuhanbatu menurut jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki di suatu wilayah. Sedangkan proyeksi penduduk menurut rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang berusia

produktif dengan penduduk yang berusia non produktif. Hasil proyeksi penduduk menurut jenis kelamin dan rasio ketergantungan di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
Laki-Laki	269.246	269.733	272.587	275.470	278.383
Perempuan	257.797	263.052	266.003	268.989	272.008
Sex Ratio	104,44	102,54	102,47	102,41	102,34
0-14	144.125	144.639	145.248	145.957	146.768
15-64	356.966	360.769	364.500	368.166	371.791
65+	25.952	27.377	28.840	30.335	31.831
Dependency Ratio	47,65	47,68	47,76	47,88	48,04

Sumber: BPS (diolah, 2024)

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki meningkat sebanyak 9.137 jiwa dalam waktu 5 tahun. Sementara penduduk perempuan meningkat lebih besar, yaitu sebanyak 14.211 jiwa. Namun, secara total pada tahun 2029 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 278.383 jiwa lebih besar dibandingkan penduduk perempuan sebanyak 272.008 jiwa. Berdasarkan kondisi tersebut, maka sex ratio diproyeksikan menurun dari 104,44 per 100 penduduk menjadi 102,34 per 100 penduduk. Artinya jumlah penduduk laki-laki dan perempuan semakin seimbang.

Angka ketergantungan adalah rasio yang menunjukkan jumlah individu dalam kelompok usia non-produktif (biasanya dianggap sebagai anak-anak dan lansia) dibandingkan dengan jumlah individu dalam kelompok usia produktif (dewasa yang bekerja). Angka ini digunakan untuk mengukur beban ekonomi yang ditanggung oleh populasi usia kerja dalam mendukung populasi yang tidak bekerja. Angka ketergantungan diproyeksikan meningkat dari 47,65 per 100 orang penduduk pada tahun 2025 menjadi 48,08 per 100 orang penduduk. Angka ini relatif stabil selama 5 tahun, dimana hal ini menunjukkan hingga tahun 2029 terdapat kurang lebih sebanyak 48

orang penduduk non produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

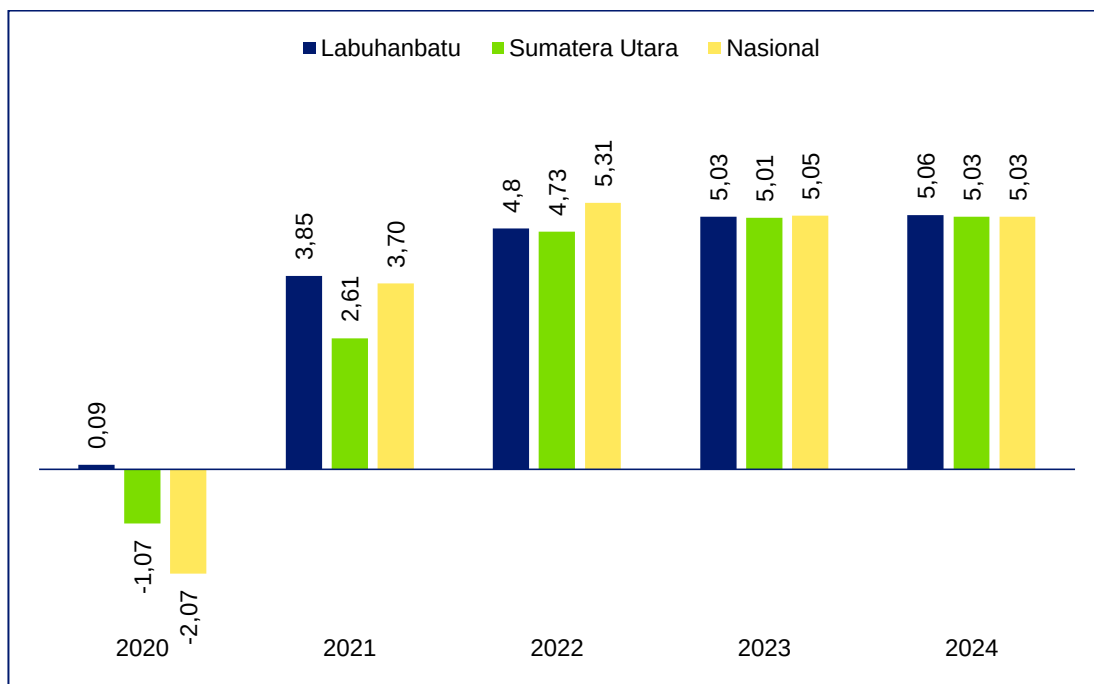
Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi di mana kebutuhan dasar terpenuhi, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, listrik, air bersih, perumahan layak, serta stabilitas ekonomi. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidup, sosial, dan lingkungan.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, memiliki stabilitas finansial, dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Konsep ini melampaui sekadar pertumbuhan PDB, dengan menekankan pada pemerataan, ketahanan, dan kualitas hidup masyarakat.

A Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran yang menggambarkan tingkat perubahan output ekonomi suatu negara atau daerah dalam periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam persentase. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan melihat perubahan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari satu periode ke periode berikutnya. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Gambar 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (%)

Sumber: BPS

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu meningkat pasca covid-19 dari 0,09 persen pada tahun 2020 menjadi 5,05 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu dimulai sejak pandemi covid mampu mengungguli pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dan nasional, namun sejak tahun 2022 hingga 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu lebih rendah dibandingkan nasional. Pada tahun 2024, Kabupaten Labuhanbatu berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Labuhanbatu mampu mendorong produktivitas sektor-sektor perekonomiannya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan	3,20	6,30	7,31	4,70	4,27

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Perikanan					
Pertambangan dan Penggalian	-1,23	8,99	6,04	3,29	4,02
Industri Pengolahan	-0,61	3,21	3,31	4,54	2,99
Pengadaan Listrik dan Gas	5,35	3,09	5,81	3,60	4,55
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,21	2,26	5,62	6,75	3,31
Konstruksi	-5,72	2,99	0,60	6,21	6,11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,40	3,28	5,07	6,85	9,03
Transportasi dan Pergudangan	-2,10	-0,97	8,66	5,70	4,05
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,44	-0,16	7,59	5,47	5,41
Informasi dan Komunikasi	4,74	4,46	6,87	4,07	4,52
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,73	2,56	3,65	3,89	3,24
Real Estate	1,49	0,25	5,21	3,08	6,36
Jasa Perusahaan	0,76	-0,62	4,99	3,85	3,66
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,03	0,39	-0,09	3,89	9,43
Jasa Pendidikan	2,96	1,29	3,91	3,42	8,48
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,37	-1,30	2,70	4,85	6,23
Jasa Lainnya	-3,61	3,33	7,04	5,37	6,58
Laju Pertumbuhan	0,09	3,85	4,80	5,03	5,06

Sumber: BPS

Pada tahun 2024 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu paling besar berasal dari Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, yaitu sebesar 9,43 persen, kemudian Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,03 persen, kemudian Jasa Pendidikan sebesar 8,48 persen. Sementara, sektor perekonomian dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah adalah Sektor Industri Pengolahan sebesar 2,99 persen, kemudian Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,24 persen, dan Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,31 persen.

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha pada Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Distribusi PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha

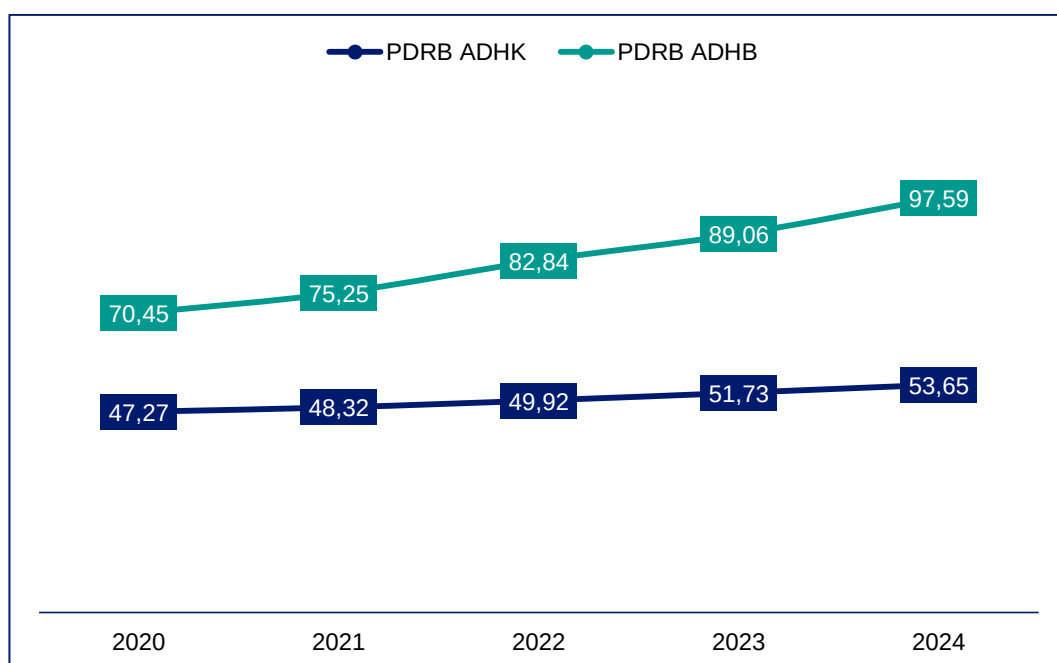
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,43	25,86	26,99	27,96	29,22
Pertambangan dan Penggalian	0,65	0,67	0,68	0,68	0,64
Industri Pengolahan	34,73	34,70	34,24	33,76	32,25
Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	8,60	8,32	8,05	8,17	7,78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,81	17,50	17,59	17,57	17,81
Transportasi dan Pergudangan	1,79	1,68	1,70	1,73	1,67
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,43	1,32	1,31	1,28	1,23
Informasi dan Komunikasi	0,70	0,69	0,68	0,65	0,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,16	1,12	1,11	1,08	1,02
Real Estate	2,81	2,67	2,55	2,38	2,24
Jasa Perusahaan	0,18	0,17	0,17	0,17	1,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,22	2,98	2,68	2,46	2,44
Jasa Pendidikan	1,83	1,71	1,63	1,54	1,52
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,47	0,43	0,41	0,40	0,38
Jasa Lainnya	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
Distribusi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS

Sektor yang berkontribusi paling besar bagi perekonomian Kabupaten Labuhanbatu adalah Sektor Industri pengolahan sebesar 32,25 persen pada tahun 2024. Namun, kontribusi sektor ini cenderung menurun selama 5 tahun terakhir. Kemudian, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kontributor terbesar kedua, di mana pada tahun 2024 mencapai 29,22 persen dan kontribusinya meningkat selama 5 tahun terakhir. Sektor perekonomian dengan kontribusi terbesar ketiga adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang pada tahun 2024 mencapai 17,81 persen, namun kontribusi sektor ini cenderung menurun selama 5 tahun terakhir. Hal ini perlu diperhatikan bagi pemerintah, terutama pada Sektor Industri Pengolahan karena setiap daerah didorong untuk melakukan hilirisasi

produk agar mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah, namun sektor terkait justru mengalami penurunan kontribusi terhadap perekonomian. Pemerintah perlu memperhatikan faktor yang menjadi masalah pada industri dan mendorong pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, serta menarik investor untuk membangun industri di daerah.

Untuk melihat perkembangan pendapatan masyarakat secara makro, dapat dinilai dari PDRB Per Kapita. PDRB Per Kapita adalah ukuran yang melihat berapa besar PDRB yang dihasilkan oleh setiap masyarakat dalam satu waktu. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.9 PDRB Per Kapita Kabupaten Labuhanbatu (Rp Juta)

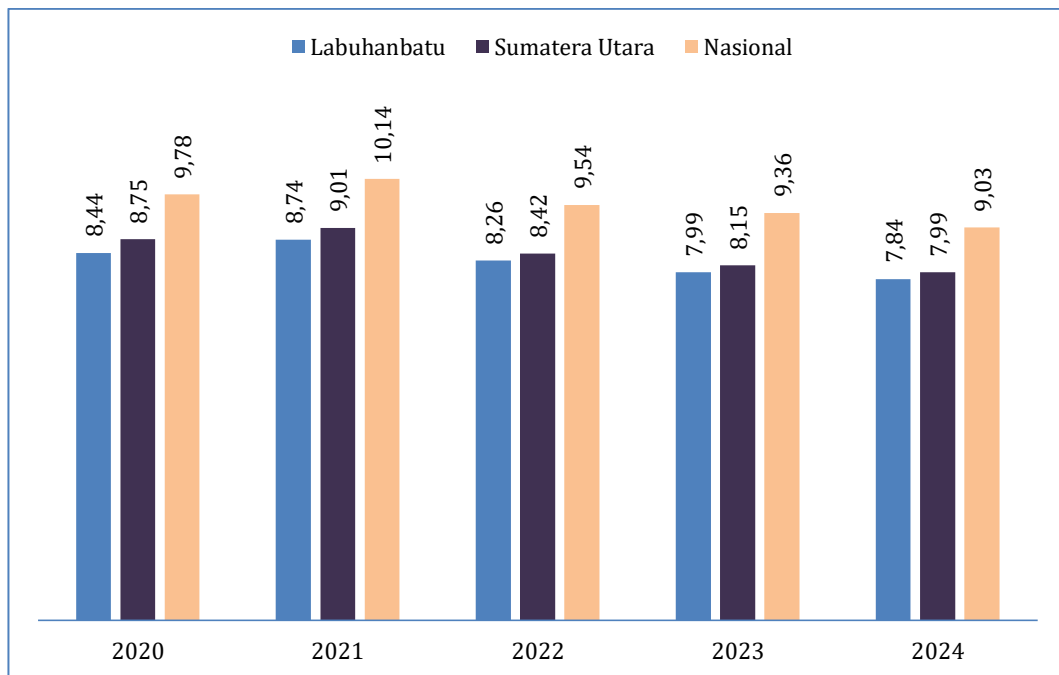
Sumber: BPS

PDRB Per Kapita baik ADHB maupun ADHK mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa secara umum pendapatan setiap masyarakat mengalami peningkatan, di mana hal ini menunjukkan bahwa perekonomian setiap masyarakat semakin membaik. Namun, perlu diperhatikan bahwa indikator ini memasukkan seluruh penduduk pada usia berapa pun ke dalam

perhitungannya. Pemerintah juga perlu memperhatikan terkait ketimpangan pendapatan antar masyarakat untuk memastikan pendapatan yang meningkat tersebut dirasakan oleh masyarakat secara inklusif atau hanya pada kalangan tertentu saja.

B Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tingkat kemiskinan diukur dari berapa banyak penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Gambar 2.10 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Maret)

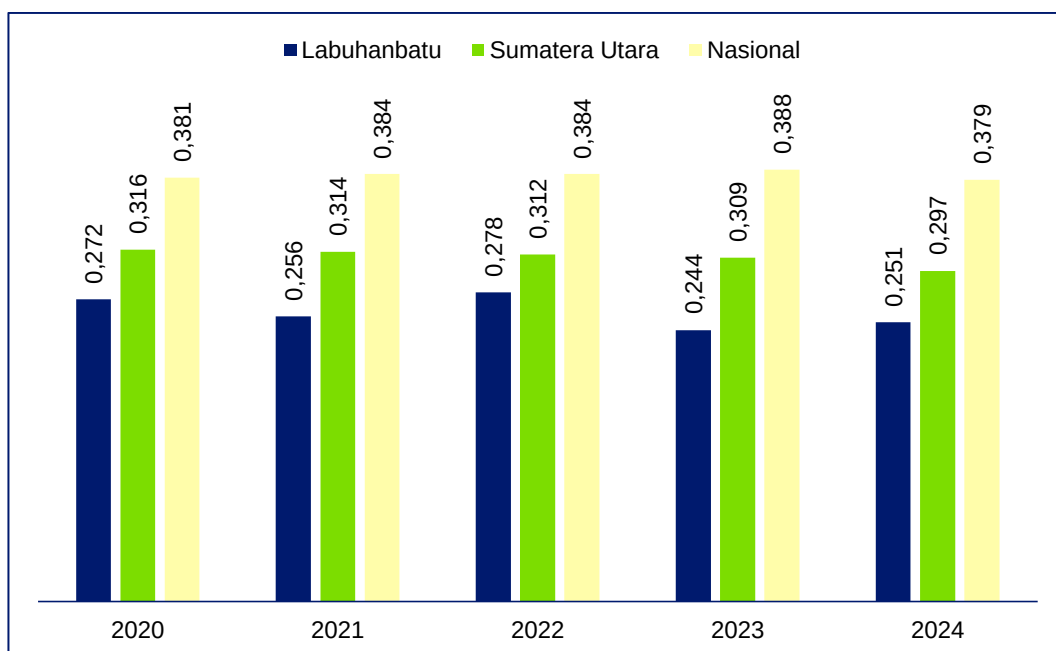
Sumber: BPS

Tingkat kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu cenderung menurun dari 8,44 persen pada tahun 2020 menjadi 7,84 persen pada tahun 2024. Capaian ini bahkan lebih baik dibandingkan provinsi dan nasional yang masih berada di sekitar angka 8 persen.

Namun, angka tersebut sebenarnya masih tergolong tinggi. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu mengevaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan mengingat masih tingginya angka kemiskinan. Pemerintah perlu mengidentifikasi penduduk miskin secara menyeluruh dan permasalahannya sehingga bantuan yang diberikan menjadi tepat sasaran dan membantu menangani permasalahan kemiskinannya.

C Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator makro ekonomi menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah dengan mengukur ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan di suatu wilayah tertentu, dengan kata lain indeks ini mengukur ketimpangan antar penduduk berpendapatan rendah dengan penduduk berpendapatan tinggi. Hasil perhitungan berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati satu maka semakin parah ketimpangan di wilayah tersebut.



Gambar 2.11 Indeks Gini Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Poin) (Maret)

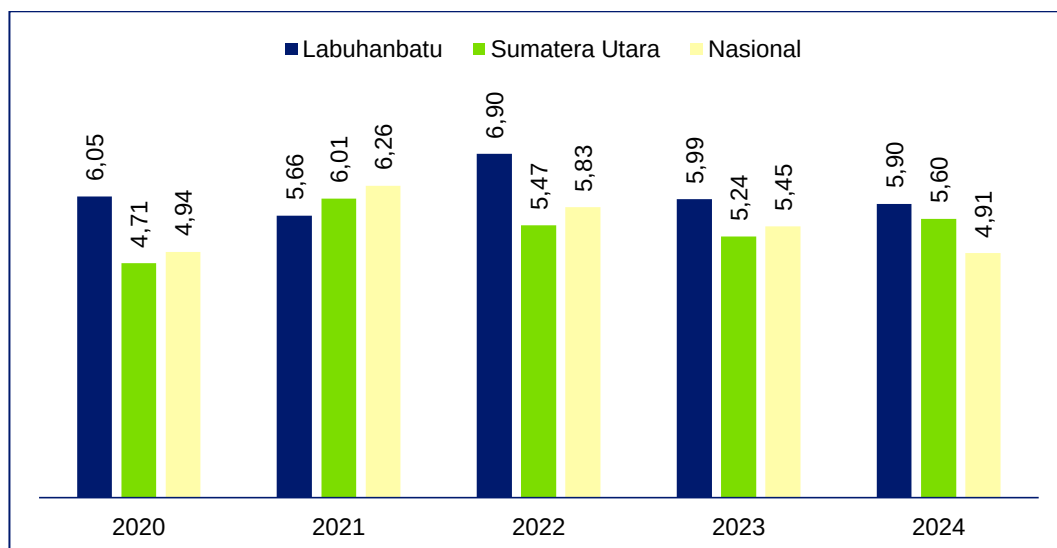
Sumber: BPS

Dilihat dari gambar di atas, Indeks Gini Kabupaten

Labuhanbatu menurun dan tetap berada di bawah 0,4. Capaian ini lebih baik dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pada kurun waktu 5 tahun terakhir ketimpangan di kabupaten Labuhanbatu masih relatif rendah, di mana distribusi pendapatan cukup merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.

D Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Labuhanbatu menurun dari tahun 2020-2024 dengan jumlah pengangguran yang fluktuatif. Tingkat pengangguran terbuka memberikan gambaran tentang sejauh mana individu-individu dalam populasi usia kerja mengalami pengangguran dan mencari kerja. TPT adalah indikator penting dalam menganalisis kesehatan pasar tenaga kerja dan kondisi ekonomi suatu wilayah.



Gambar 2.12 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Agustus)

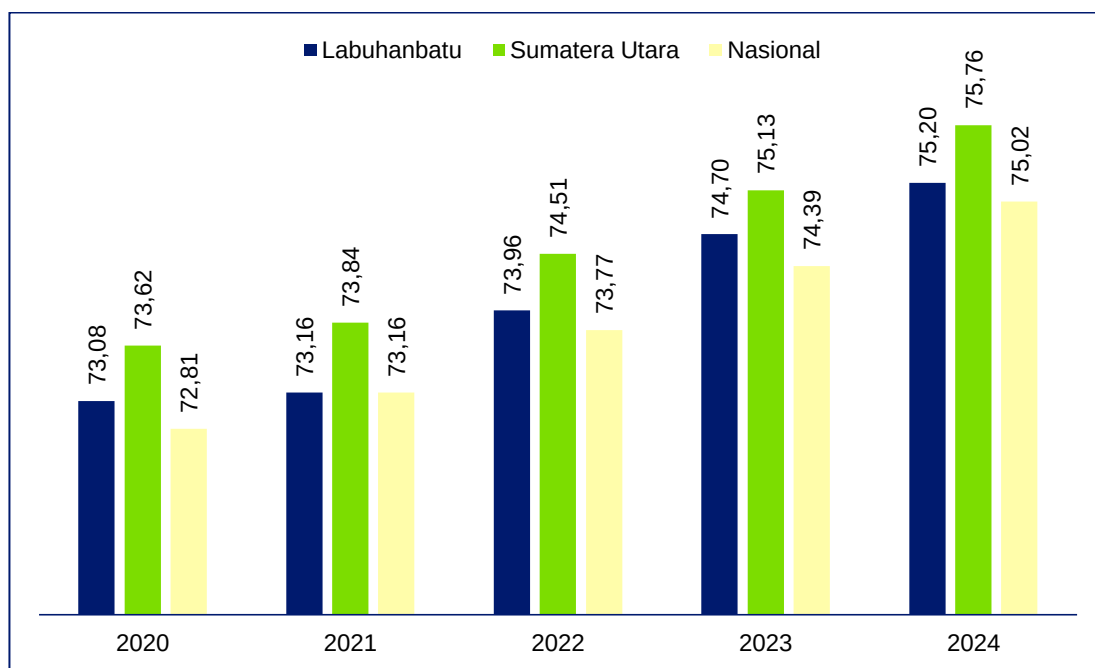
Sumber: BPS

Tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi selama

periode 2020-2024. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Labuhanbatu sebesar 6,05 persen cenderung meningkat hingga tahun 2023 mencapai 5,90 persen. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 juga melebihi rata-rata kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

E Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM diukur dari aspek pendidikan (rata-rata dan harapan lama sekolah), kesehatan (Usia Harapan Hidup), dan ekonomi (pengeluaran per kapita). Perkembangan IPM Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Gambar 2.13 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional

Sumber: BPS

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari 73,08 poin pada tahun 2020 menjadi 75,20 poin pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa secara komposit telah terjadi peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta ekonomi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah perlu

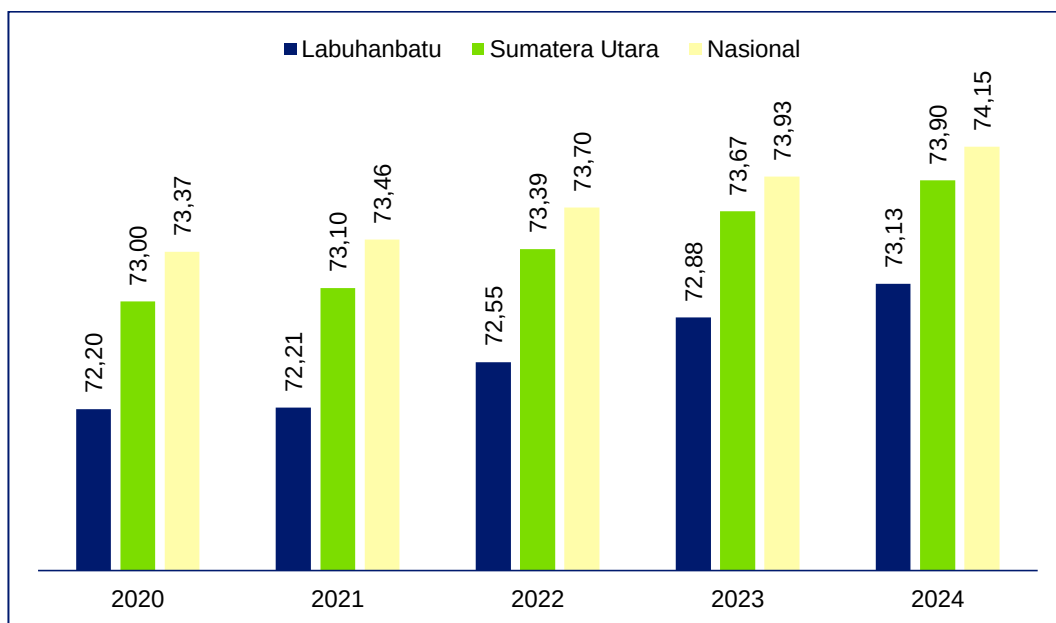
memastikan pembangunan pendidikan dan kesehatan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat agar kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.

2.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan untuk Semua menekankan hak setiap individu atas layanan kesehatan berkualitas tanpa diskriminasi, diwujudkan melalui *Universal Health Coverage* (UHC), akses merata ke fasilitas kesehatan primer, dan pendekatan preventif, seperti imunisasi serta pencegahan stunting.

A Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.



Gambar 2.14 Usia Harapan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional

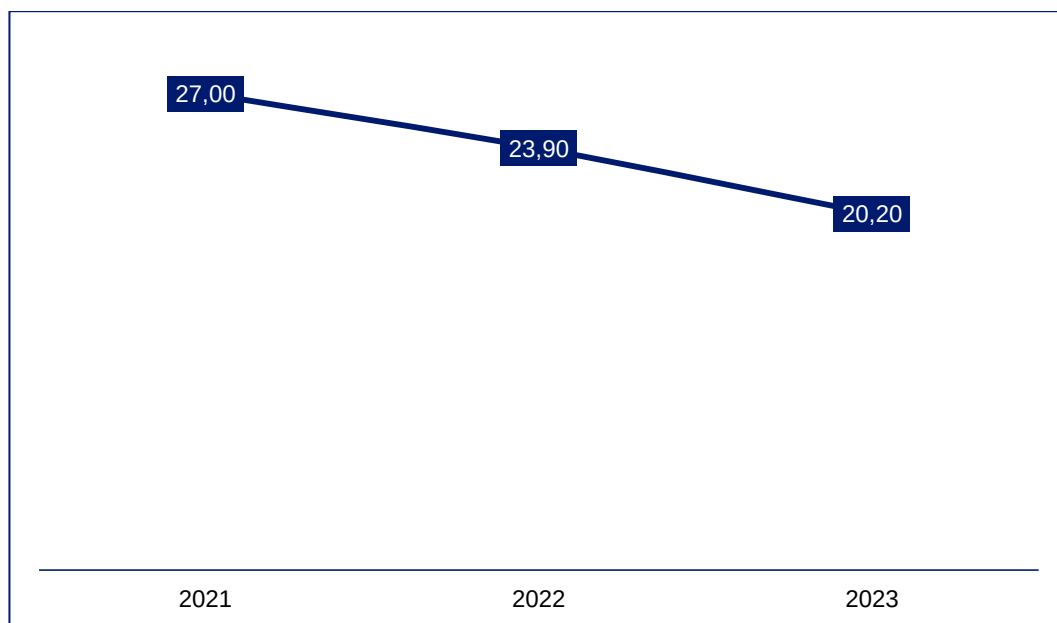
Sumber: BPS

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020 sebesar 72,20 tahun dan meningkat menjadi 73,13 tahun pada tahun 2023. Angka Harapan Hidup Kabupaten

Labuhanbatu meningkat dalam rentang waktu 2020-2023, menunjukkan adanya peningkatan derajat kehidupan di Kabupaten Labuhanbatu. Meskipun mengalami peningkatan, angka Harapan Hidup di Kabupaten Labuhanbatu relatif lebih rendah dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Nasional, serta Kabupaten/kota di sekitar.

B Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting mencerminkan persentase Balita dengan tinggi badan di bawah standar usia akibat malnutrisi kronis, yang berdampak jangka panjang pada perkembangan kognitif dan produktivitas. Stunting diangkat menjadi permasalahan nasional mengingat cukup banyaknya Balita yang mengalami stunting. Prevalensi stunting pada Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.15 Prevalensi Stunting Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: Dinas Kesehatan

Prevalensi Stunting Kabupaten Labuhanbatu mengalami penurunan hingga tahun 2023 mencapai 20,20 persen. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan bahwa masih banyak Balita yang mengalami stunting atau kekurangan gizi di Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu

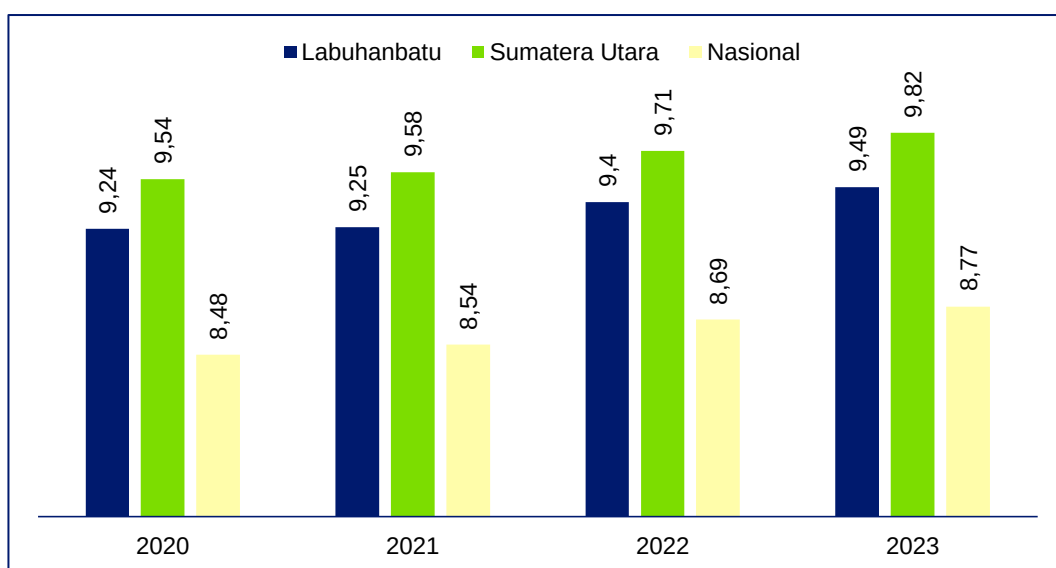
memastikan bahwa layanan kesehatan ibu dan anak, kesadaran orang tua dalam memberikan gizi seimbang, dan distribusi pangan bergizi dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan Berkualitas yang Merata merupakan fondasi pembangunan berkelanjutan yang menjamin akses setara terhadap pembelajaran inklusif dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Pemerintah memperkuat infrastruktur pendidikan, kurikulum yang relevan, serta dukungan teknologi digital, pendidikan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan daya saing SDM.

A Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 adalah 9,49 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Labuhanbatu memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya pada tahun 2020-2023, yang menunjukkan kecenderungan yang positif.



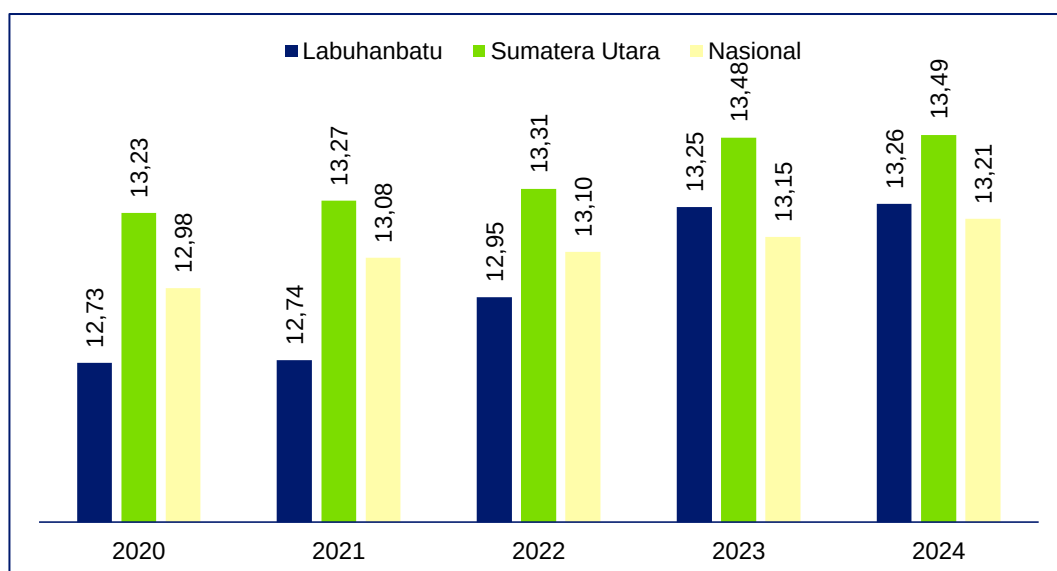
Gambar 2.16 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional

Sumber: BPS

Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada pembahasan terkait IPM, rata-rata lama sekolah Kabupaten Labuhanbatu masih tergolong cukup rendah jika dibandingkan dengan angka maksimum RLS (15 Tahun). Nilai RLS yang rendah menunjukkan persoalan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Rata-rata lama sekolah yang sudah mencapai nilai 9 tahun menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Labuhanbatu sudah menempuh pendidikan formal hingga SMP/Sederajat atau sudah memenuhi pendidikan wajib dasar 9 tahun.

B Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikut sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.



Gambar 2.17 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional

Sumber: BPS

Pada tahun 2020, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Labuhanbatu sebesar 12,73 tahun meningkat hingga tahun 2024 mencapai 13,26 tahun yang berarti lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak di Kabupaten Labuhanbatu adalah 13 tahun atau lulus pendidikan Diploma I. capaian tersebut setara dengan capaian Provinsi dan mengungguli capaian Nasional.

C Literasi dan Numerasi

Literasi adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa (lisan, tulisan, isyarat) untuk memahami, menafsirkan, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai konteks, sementara Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep dan keterampilan matematika dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Perkembangan literasi dan numerasi pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

Tabel 2.16 Literasi dan Numerasi Kabupaten Labuhanbatu

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Literasi SD	N/A	N/A	N/A	47,14	N/A
Literasi SMP	N/A	N/A	N/A	50,14	N/A
Numerasi SD	N/A	N/A	N/A	34,64	N/A
Numerasi SMP	N/A	N/A	N/A	34,10	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan

Kemampuan literasi di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 untuk pendidikan SD sebesar 47,14 poin, pendidikan SMP sebesar 50,14 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi di Kabupaten Labuhanbatu masih dalam kategori sedang dalam hal memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu. Kemampuan numerasi di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 untuk pendidikan SD sebesar 34,64

poin, pendidikan SMP sebesar 34,10 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan numerasi di Kabupaten Labuhanbatu masih dalam kategori sedang dalam hal berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat menyelesaikan masalah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu mendorong peningkatan literasi dan numerasi siswa melalui peningkatan kualitas tenaga pengajar, ekosistem pembelajaran yang adaptif berbasis teknologi, serta sarana dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang aktivitas pembelajaran.

D Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Dalam meningkatkan kapasitas SDM di suatu daerah perlu didukung oleh peningkatan wawasan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Peningkatan ini dapat didukung oleh tersedianya perpustakaan sebagai wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuannya. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi dan kemampuan membaca di kalangan masyarakat suatu daerah. Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

Tabel 2.17 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu

UPLM		2022	2023
UPLM 1	Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,0014	0,2397
UPLM 2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan	0,8656	0,1561
UPLM 3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan	0,0000	0,1378
UPLM 4	Tingkat Kunjungan Pustaka	0,3941	0,0427
UPLM 5	Perpustakaan Ber-SNP	1,6964	1,0000
UPLM 6	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan	0,2462	1,0000
UPLM 7	Jumlah Pemustaka	0,5206	1,0000
IPLM		53,20	51,09

Sumber: *Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indonesia*

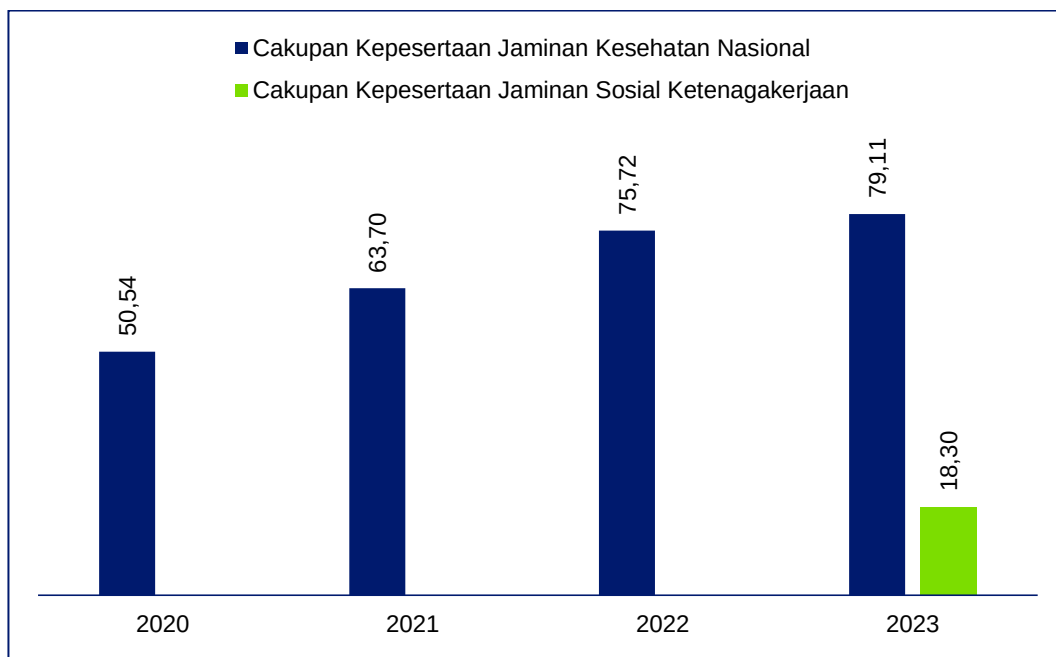
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menurun dari 53,20

poin pada tahun 2022 menjadi 51,09 poin pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan nilai dari unsur penyusunnya, yaitu UPLM (Pemerataan koleksi perpustakaan) dari 0,8656 poin menjadi 0,1561 poin. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan koleksi buku di perpustakaan hanya mampu memenuhi sebesar 15 persen dari standar yang telah ditentukan. Selain itu, UPLM 4 (Tingkat kunjungan pustaka) juga menurun dari 0,3941 poin menjadi 0,0427 poin. Hal ini berarti bahwa kunjungan masyarakat ke perpustakaan menurun menjadi 4,27 persen dari standar yang telah ditentukan. Semakin rendahnya minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan menyebabkan penurunan pada unsur tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya buku digital sehingga masyarakat merasa tidak perlu untuk berkunjung ke perpustakaan.

Di samping itu, terdapat beberapa indikator yang meningkat hingga memenuhi standar yang telah ditentukan, yaitu UPLM 6 (Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan) dan UPLM7 (Jumlah Pemustaka). Hal ini mengindikasikan bahwa banyak masyarakat yang menghimbau orang lain untuk meningkatkan literasinya dengan berkunjung ke perpustakaan dan membaca. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial yang Adaptif mengacu pada sistem jaminan sosial yang mampu merespons dinamika risiko dan kebutuhan masyarakat, termasuk guncangan ekonomi, bencana alam, atau krisis kesehatan, seperti pandemi.



Gambar 2.18 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)

Sumber: BPJS

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional meningkat dari 50,54 persen pada tahun 2020 menjadi 79,11 persen pada tahun 2023. Sementara, pada tahun 2023 Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hanya mencapai 18,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya masyarakat yang belum berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program jaminan kesehatan agar seluruh layanan kesehatan dapat dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, rendahnya jaminan sosial ketenagakerjaan juga dapat disebabkan oleh beberapa perusahaan belum mengikuti peraturan yang berlaku atau banyaknya tenaga kerja yang bergerak bekerja di sektor informal. Pemerintah harus menghimbau perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta, serta menjangkau tenaga kerja informal agar turut serta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah harus memastikan program jaminan kesehatan dan sosial berjalan dengan baik, terutama responsif terhadap kelompok rentan (lansia, disabilitas, pekerja informal),

serta integrasi dengan layanan kesehatan. Pendekatan berbasis teknologi dan kolaborasi sehingga mewujudkan perlindungan sosial adaptif dan menjadi jaring pengaman yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama maslahat merupakan paradigma transformatif dalam memahami spiritualitas yang melampaui ritualistik formal, melainkan mengejawantahkan nilai-nilai agama sebagai instrumen penciptaan kemaslahatan universal. Pendekatan ini memosisikan agama tidak sekadar sebagai sistem keyakinan individual, namun sebagai kekuatan transformatif yang mendorong kesejahteraan kolektif, meneguhkan etika sosial, dan menghasilkan kontribusi positif bagi pembangunan kemanusiaan. Beragama maslahat mensyaratkan pemahaman teologis yang inklusif, dialogis, dan berbasis pada prinsip-prinsip kemanusiaan universal, yang mampu menjembatani keragaman dan menciptakan harmoni sosial.

Berkebudayaan maju merupakan manifestasi dinamis dari kemampuan masyarakat untuk mengintegrasikan warisan kultural dengan inovasi progresif, menciptakan ruang di mana tradisi dan modernitas berdialog secara produktif. Perspektif ini tidak sekadar menghargai khazanah budaya sebagai warisan statis, melainkan memaknainya sebagai Modal dinamis untuk pengembangan peradaban. Kebudayaan maju ditandai dengan kapasitas adaptasi tinggi, keterbukaan terhadap perubahan, kemampuan kritis, serta komitmen untuk terus-menerus melakukan rekonstruksi nilai-nilai kultural yang lebih bermakna dan kontekstual dengan tantangan zaman.

A Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan instrumen

pengukuran sistematis yang menggambarkan kualitas interaksi, toleransi, dan harmoni antar umat beragama dalam suatu wilayah. Indikator ini tidak sekadar menghitung frekuensi interaksi, melainkan mengukur kedalaman pemahaman, sikap saling menghormati, dan kapasitas dialog konstruktif di antara berbagai kelompok keagamaan.

B Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen analitik komprehensif yang mengukur dinamika dan kualitas transformasi kebudayaan dalam konteks pembangunan nasional. Metrik ini tidak sekadar menilai aspek kuantitatif, melainkan mengeksplorasi dimensi kualitatif perkembangan budaya yang mencakup kapasitas inovasi, kreativitas, dan resiliensi masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman. Indeks kerukunan umat beragama (IKUB) di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 sebesar 78,34. Hal ini menunjukkan bahwa indeks utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan umat beragama di Kabupaten Labuhanbatu sehingga menggambarkan kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, menghormati dengan keyakinan masing-masing.

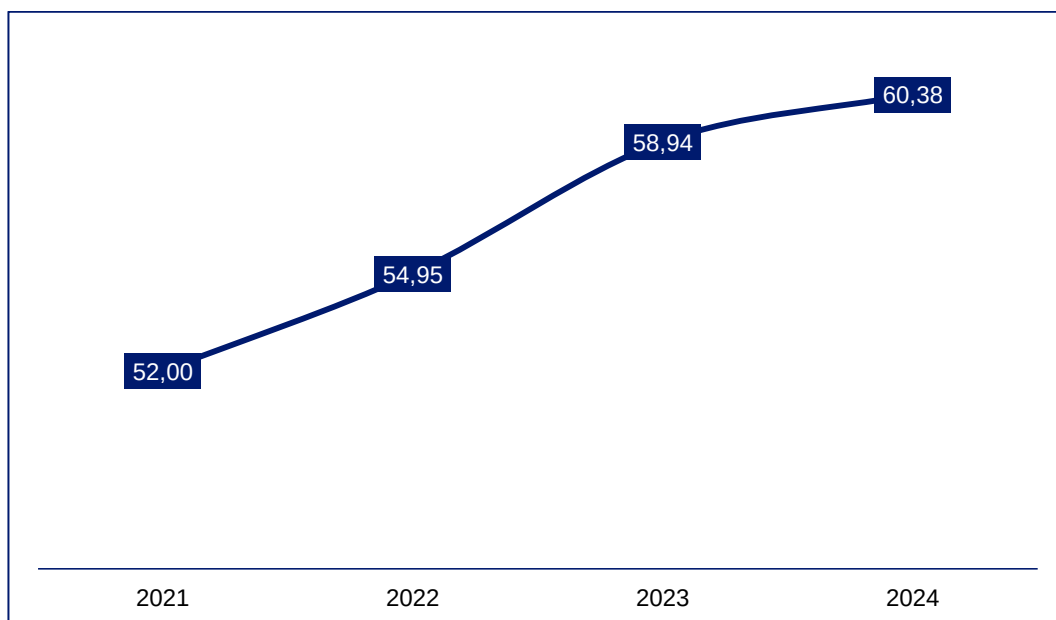
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif merupakan tiga pilar penting dalam membangun masyarakat yang maju dan berkeadilan. Keluarga berkualitas dicirikan oleh pemenuhan kebutuhan dasar, pola pengasuhan yang baik, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang memadai. Kesetaraan gender diwujudkan melalui penghapusan diskriminasi, peningkatan partisipasi perempuan di berbagai sektor, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar semua individu. Sementara

itu, masyarakat inklusif menekankan penerimaan terhadap keberagaman, termasuk penyandang disabilitas, kelompok marginal, dan minoritas, dengan memastikan mereka memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan.

A Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks pembangunan keluarga merupakan indikator untuk melihat pencapaian pembangunan kualitas keluarga yang disusun dari 3 indikator, yaitu indeks ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Capaian indeks pembangunan keluarga pada Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Gambar 2.19 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Labuhanbatu

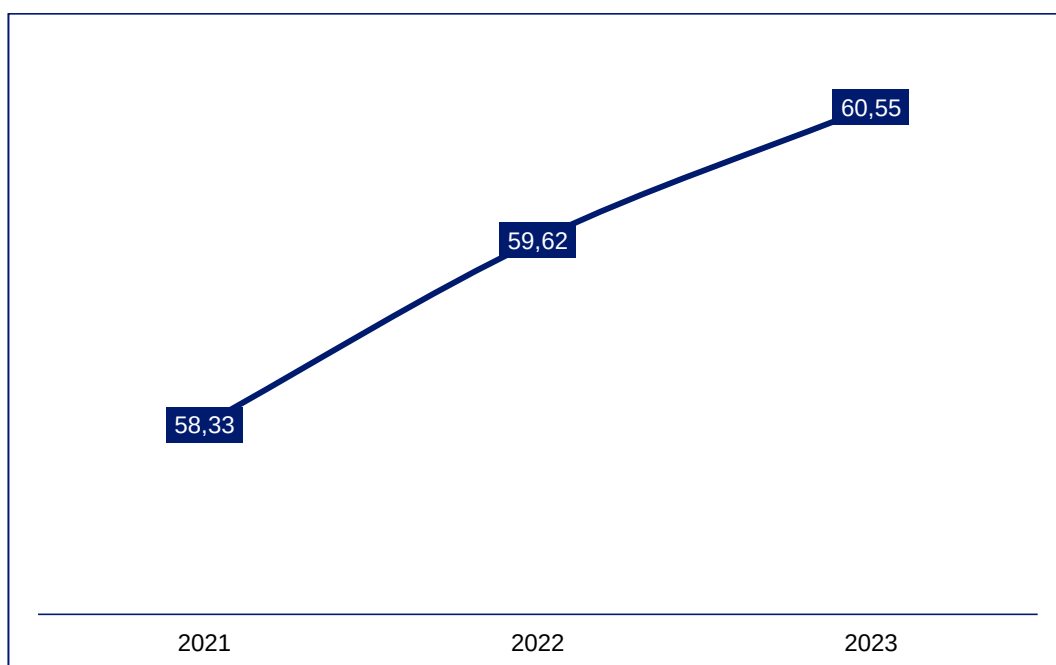
Sumber: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Indeks pembangunan keluarga Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari 54,95 poin menjadi 58,94 poin dari tahun 2022 ke tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa pembangunan kualitas keluarga di Kabupaten Labuhanbatu semakin baik. Untuk meningkatkan pembangunan keluarga, maka pemerintah dapat meningkatkan keterampilan parenting pada orang tua melalui edukasi parenting pra-nikah, peningkatan akses layanan gizi kepada keluarga, akses pendidikan dan pekerjaan yang inklusif, serta

memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran terkhusus masyarakat yang kurang mampu.

B Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator komprehensif untuk mengukur tingkat pemenuhan hak dan perlindungan anak di suatu wilayah. Perlindungan anak memiliki tujuan memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung.



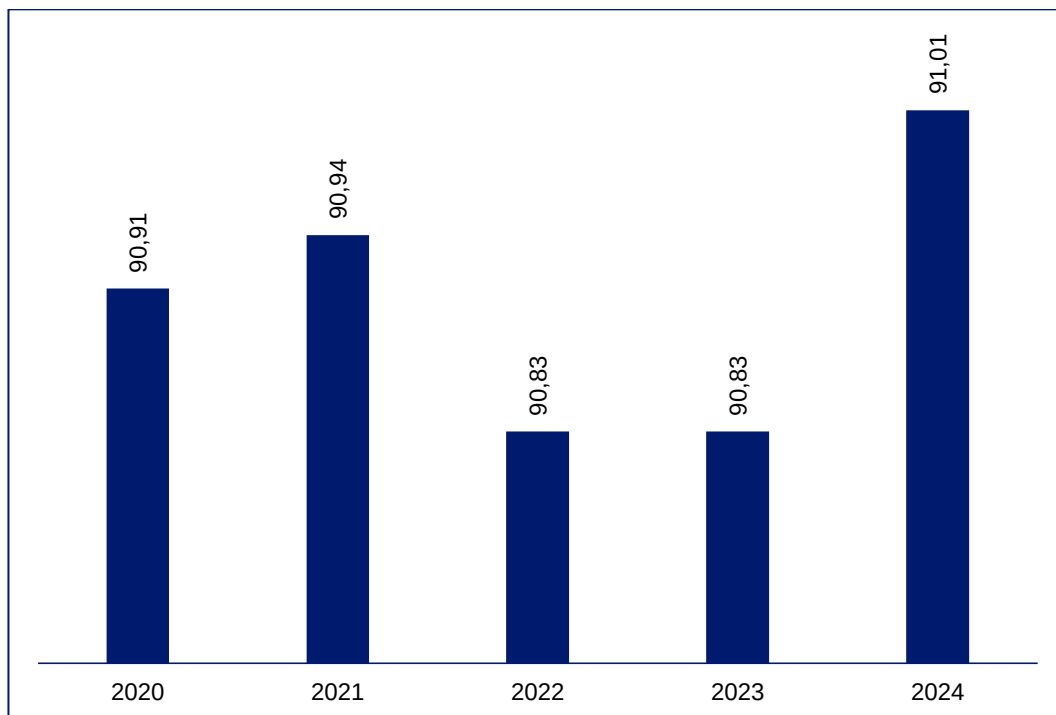
Gambar 2.20 Indeks Perlindungan Anak (Poin)

Sumber: KemenPPA

Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari 58,33 poin pada tahun 2021 menjadi 60,55 poin pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan signifikan dalam pemenuhan hak-hak dasar anak dan efektivitas sistem perlindungan anak. Pemerintah harus meningkatkan regulasi dan kebijakan terkait perlindungan anak sehingga anak-anak merasa aman dan nyaman dari tindakan negatif.

C Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender menggambarkan kesetaraan akses pembangunan atau IPM antar penduduk perempuan dengan penduduk laki-laki. Semakin besar angka IPG, maka semakin setara akses pembangunan antar perempuan dengan laki-laki. Perkembangan IPG Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Gambar 2.21 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Labuhanbatu

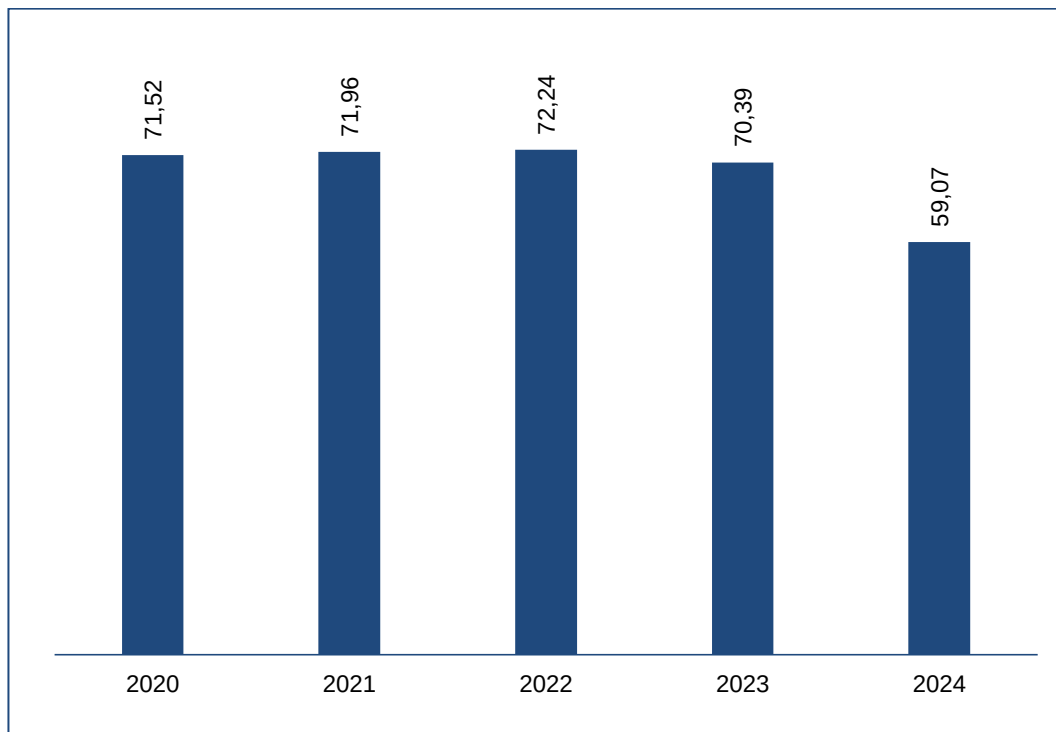
Sumber: BPS

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari 90,94 poin pada tahun 2021 menjadi 91,01 poin pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya kesetaraan akses pembangunan dari segi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang dirasakan oleh penduduk perempuan. Pemerintah ke depannya harus memastikan bahwa diskriminasi terhadap gender semakin berkurang sehingga fasilitas dasar, seperti pendidikan dan kesehatan juga semakin dirasakan oleh penduduk perempuan.

D Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender menggambarkan seberapa besar

kontribusi wanita dari segi ketenagakerjaan serta keterlibatan politik dalam pembangunan ekonomi. Perkembangan IPG Kabupaten Labuhanbatu selama sebagai berikut:



Gambar 2.22 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Labuhanbatu

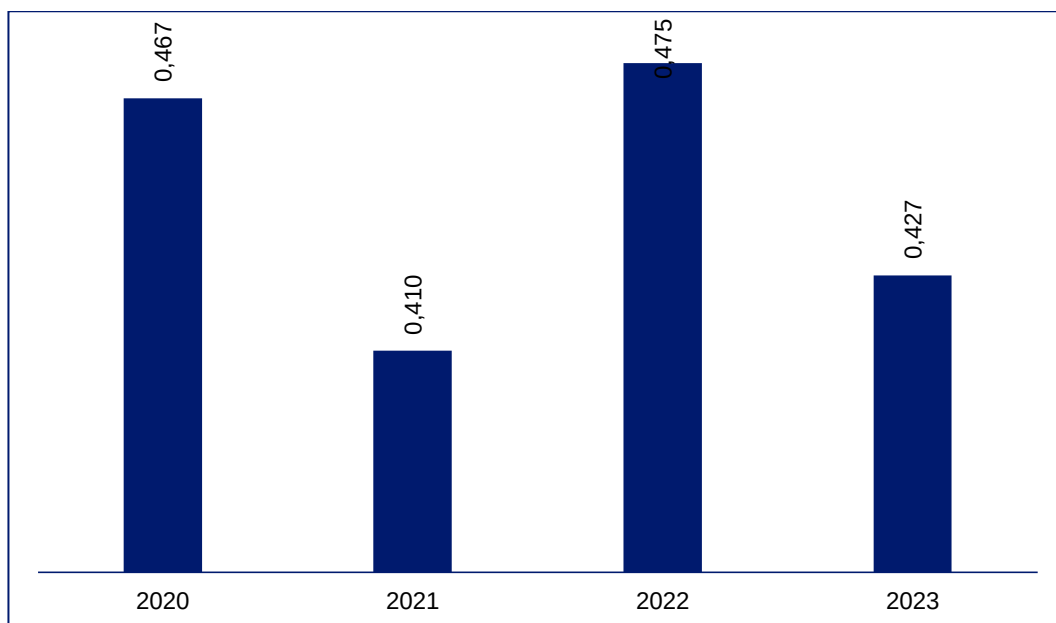
Sumber: BPS

Indeks Pemberdayaan Gender kabupaten Labuhanbatu cenderung menurun dari 71,52 poin pada tahun 2020 menjadi 59,07 poin pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa keterlibatan penduduk perempuan dalam pembangunan ekonomi semakin berkurang. Pemberdayaan kepada penduduk perempuan perlu ditingkatkan agar mereka terlibat dalam pembangunan daerah.

E Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender mencerminkan secara komprehensif mengenai akses penduduk perempuan terhadap pembangunan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, dan keterlibatan dalam pembangunan daerah. Indeks Ketimpangan Gender mengukur ketimpangan gender dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar

tenaga kerja Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Gambar 2.23 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: BPS

Indeks Ketimpangan Gender berfluktuasi cenderung meningkat dari 0,398 poin pada tahun 2019 menjadi 0,427 poin pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan cenderung meningkat.

Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah suatu ukuran komposit yang memberikan gambaran mengenai tingkat kemajuan dan kesejahteraan pemuda di suatu wilayah. Indeks Pembangunan Pemuda memiliki 5 domain dalam pengukurannya, meliputi 1) Pendidikan; 2) Kesehatan dan Kesejahteraan; 3) Lapangan dan Kesempatan Kerja; 4) Partisipasi dan Kepemimpinan; dan 5) Gender dan Diskriminasi.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan konstruksi kompleks yang mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan

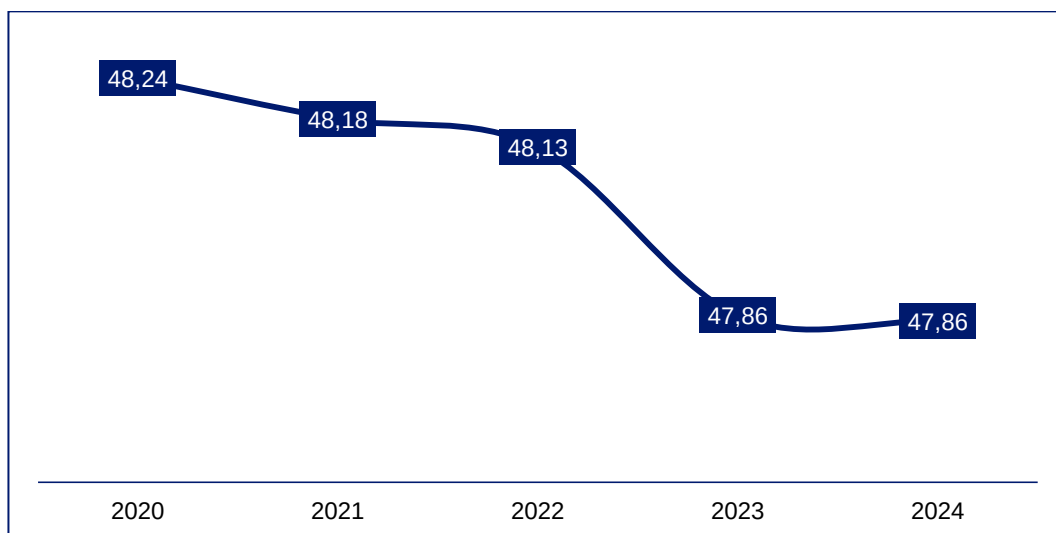
ekosistem pembangunan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi sumber daya manusia, infrastruktur, dan modal sosial. Konstelasi daya saing dibangun melalui interaksi dinamis antara kapasitas kelembagaan pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis. Fondasi utama daya saing terletak pada kemampuan daerah mengembangkan keunggulan kompetitif yang membedakannya dari wilayah lain melalui inovasi berkelanjutan, pengembangan klaster industri unggulan, dan penciptaan nilai tambah dari potensi sumber daya lokal yang dimiliki.

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia merupakan konstruksi kompleks yang mencerminkan kapasitas fundamental sebuah wilayah untuk mengembangkan potensi manusia secara komprehensif dan berkelanjutan. Konsep ini melampaui sekadar pengukuran kuantitatif seperti tingkat pendidikan, melainkan melibatkan transformasi sistemik yang mencakup pembangunan kapabilitas intelektual, keterampilan adaptif, kreativitas inovatif, dan karakter unggul yang mampu berkompetisi dalam lanskap global yang semakin dinamis dan kompleks. Pembangunan daya saing sumber daya manusia mensyaratkan pendekatan holistik yang terintegrasi, mulai dari sistem pendidikan yang responsif, pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan pasar, hingga penciptaan ekosistem yang mendorong pertumbuhan potensi individual dan kolektif.

Angka ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan indikator demografis kunci yang menggambarkan beban ekonomi penduduk usia produktif dalam menanggung beban penduduk usia tidak produktif dalam suatu wilayah. Metrik ini dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64

tahun), yang direpresentasikan dalam persentase. Semakin tinggi angka ketergantungan menunjukkan beban ekonomi yang semakin berat bagi kelompok usia produktif yang berimplikasi signifikan terhadap struktur ekonomi, sistem jaminan sosial, dan kebijakan pembangunan daerah.



Gambar 2.24 Angka Ketergantungan (Per 100 Penduduk)

Sumber: BPS (Diolah, 2025)

Gambar tersebut menunjukkan tren penurunan angka ketergantungan (*dependency ratio*) dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan perubahan struktural demografis yang signifikan dalam periode lima tahun tersebut. Meskipun penurunan terlihat gradual, setiap penurunan angka ketergantungan memiliki signifikansi strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Semakin banyaknya penduduk usia produktif, maka semakin banyaknya *supply* angkatan kerja yang tersedia untuk membangun daerah.

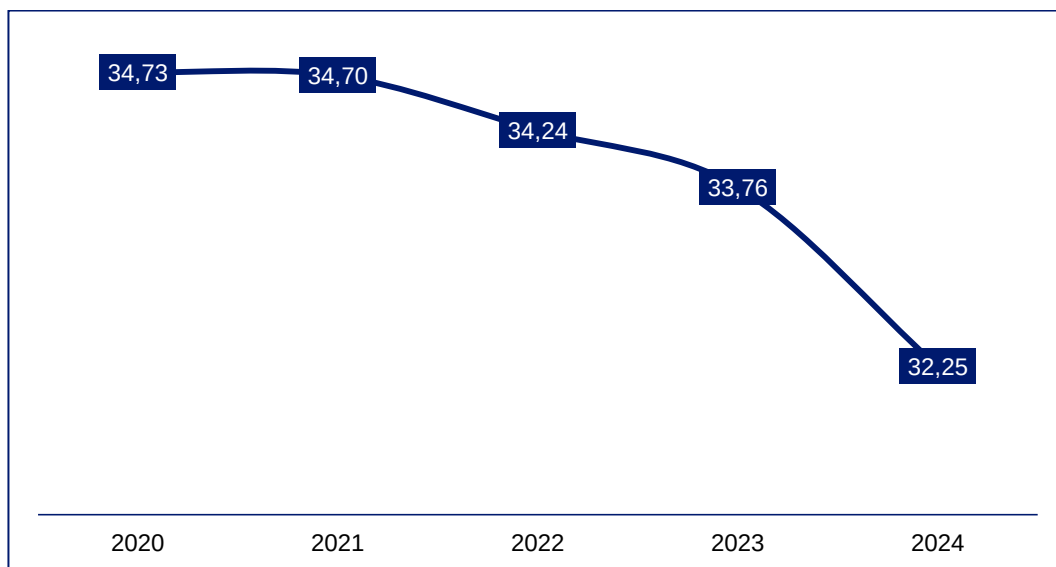
2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan produktivitas ekonomi merupakan simpul strategis dalam arsitektur pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ekosistem inovasi dikonstruksikan melalui pendekatan sistemik yang memadukan peran perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan

pemerintah dalam menciptakan platform kolaborasi pengembangan pengetahuan dan teknologi. Infrastruktur inovasi yang komprehensif mencakup pembangunan pusat penelitian, insentif pengembangan riset terapan, fasilitasi transfer teknologi, dan penciptaan ruang-ruang kreativitas yang memungkinkan lahirnya solusi inovatif untuk persoalan pembangunan daerah. Produktivitas ekonomi diartikan secara holistik sebagai kemampuan sistemik untuk mentransformasi potensi sumber daya menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi melalui inovasi berkelanjutan. Strategi peningkatan produktivitas difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, akselerasi adopsi teknologi digital, pengembangan klaster industri berbasis keunggulan kompetitif daerah, dan penciptaan rantai nilai yang memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pendekatan ini mensyaratkan investasi berkelanjutan dalam pengembangan kompetensi SDM, penciptaan insentif bagi inovator lokal, dan pembangunan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan implementasi strategi iptek dan inovasi diukur dari kemampuan daerah dalam menciptakan produk-produk bernilai tambah tinggi, meningkatkan daya saing ekonomi, serta mentransformasi struktur ekonomi dari berbasis sumber daya menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi.

A Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan menggambarkan kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap perekonomian daerah. Sektor ini menjadi sektor utama yang berkontribusi bagi perekonomian daerah selama ini. Sektor Industri Pengolahan terus didorong agar mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.



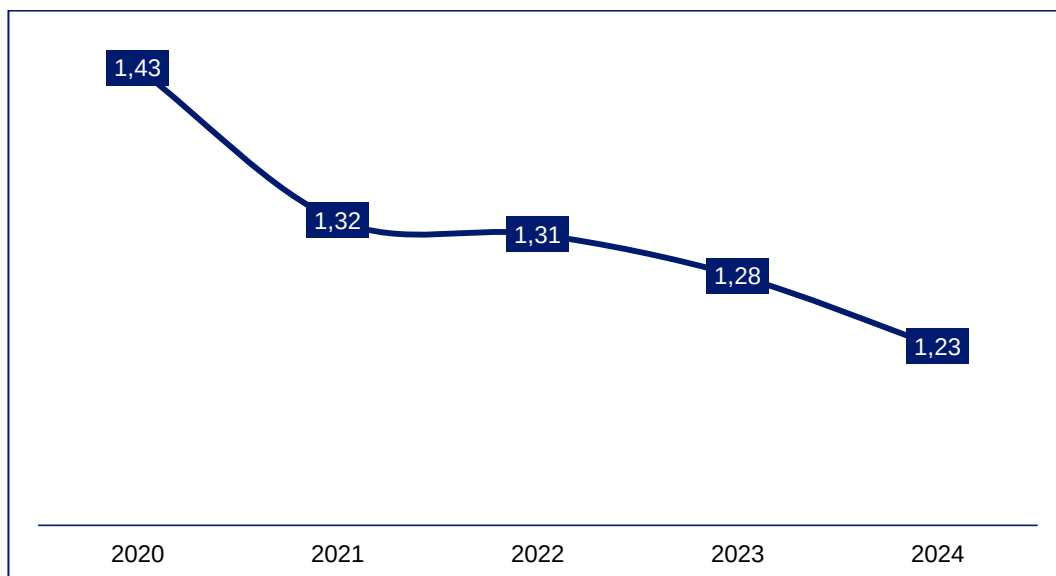
Gambar 2.25 Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)

Sumber: BPS

Data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi industri pengolahan mengalami penurunan terhadap perekonomian daerah. Pada tahun 2020 kontribusi Sektor Industri Pengolahan sebesar 34,73 persen menurun menjadi 32,25 persen pada tahun 2024. Penurunan ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah mengingat Kabupaten Labuhanbatu perlu mendorong hilirisasi produk-produk daerah agar memberikan nilai tambah yang berdaya saing sehingga diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah perlu meningkatkan investasi pada Sektor Industri dan memberdayakan SDM yang tersedia agar mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah.

B Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum

Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum menjadi indikator yang menunjukkan kontribusi Sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah. Hal ini karena pariwisata berkaitan dengan konsumsi turis terhadap akomodasi (penginapan, hotel, dan lain-lain) serta makan minum (café, rumah makan, restoran, dan lain-lain). Sektor Pariwisata menjadi sektor yang penting karena merupakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sektor ini memiliki *multiplier effect* yang berdampak pada usaha sekitar.



Gambar 2.26 Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)

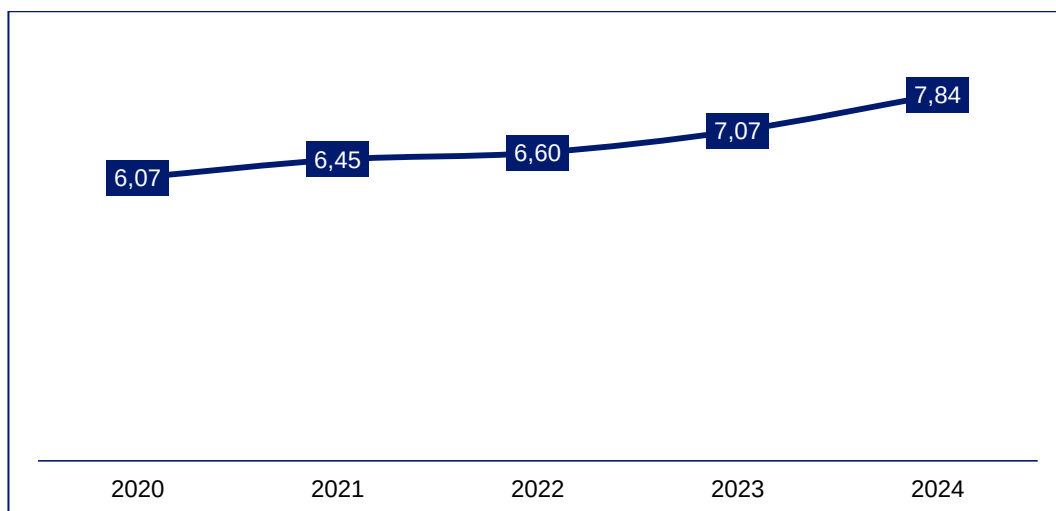
Sumber: BPS

Kontribusi sektor ini mengalami penurunan dari 1,43 persen pada tahun 2020 menjadi 1,23 persen pada tahun 2024. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya daya tarik pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu sehingga menurunkan kunjungan wisatawan ke daerah. Kurangnya destinasi wisata dan promosi dapat menjadi penyebab kurangnya daya tarik pariwisata. Pemerintah perlu meningkatkan daya saing destinasi wisata, melalui pembangunan destinasi wisata pada daerah potensial dan melakukan promosi yang berkelanjutan agar meningkatkan kesadaran turis domestik dan asing untuk berkunjung ke daerah.

C Rasio Kewirausahaan

Daya saing ekonomi daerah dapat diukur dari pertumbuhan wirausaha di daerahnya. Wirausaha adalah individu yang membangun usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi pencari kerja. Dalam mengukur pertumbuhan wirausaha di suatu daerah, maka dapat dilihat dari rasio kewirausahaan. Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan antara penduduk yang berusaha sendiri dan memiliki setidaknya 1 orang buruh/karyawan terhadap seluruh angkatan

kerja. Perkembangan rasio kewirausahaan Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Gambar 2.27 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Labuhanbatu

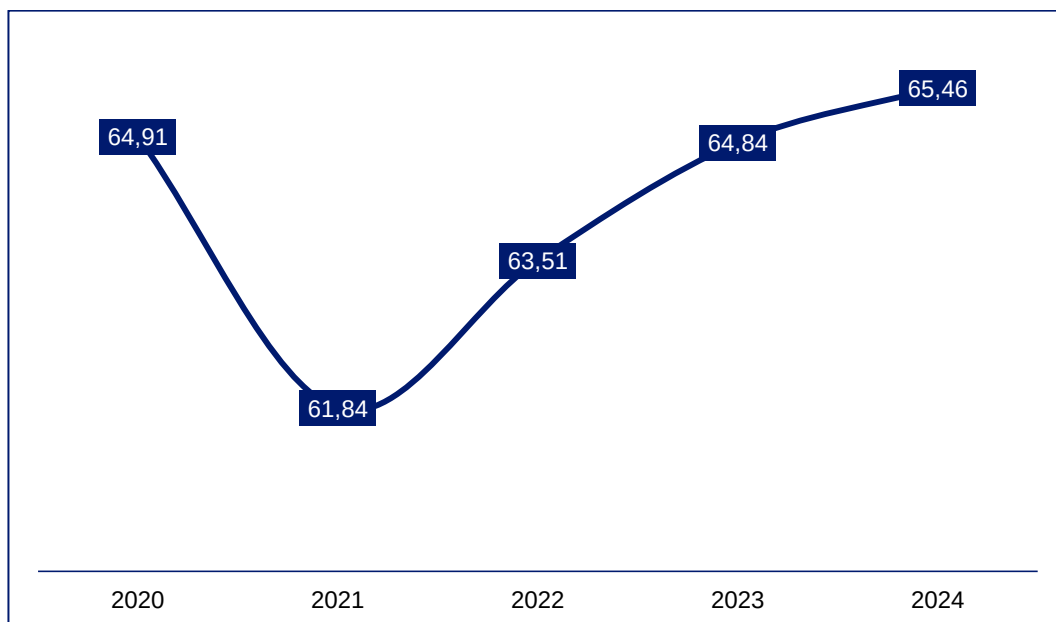
Sumber: BPS (diolah, 2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa rasio kewirausahaan meningkat dari 6,07 persen pada tahun 2020 menjadi 7,07 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan wirausaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat. Pemerintah juga harus memberikan dukungan baik berupa modal, perizinan, atau bantuan lainnya agar masyarakat semakin berminat untuk membangun usaha. Peningkatan wirausaha juga diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga setiap masyarakat secara inklusif dapat bertumbuh secara ekonomi.

D Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator makro yang digunakan untuk melihat kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah. Tingginya TPAK menandakan bahwa ketersediaan angkatan kerja di suatu daerah semakin banyak. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan penduduk yang bekerja dan sedang

menganggur/mencari kerja dengan seluruh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Perkembangan TPAK di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:



Gambar 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Labuhanbatu

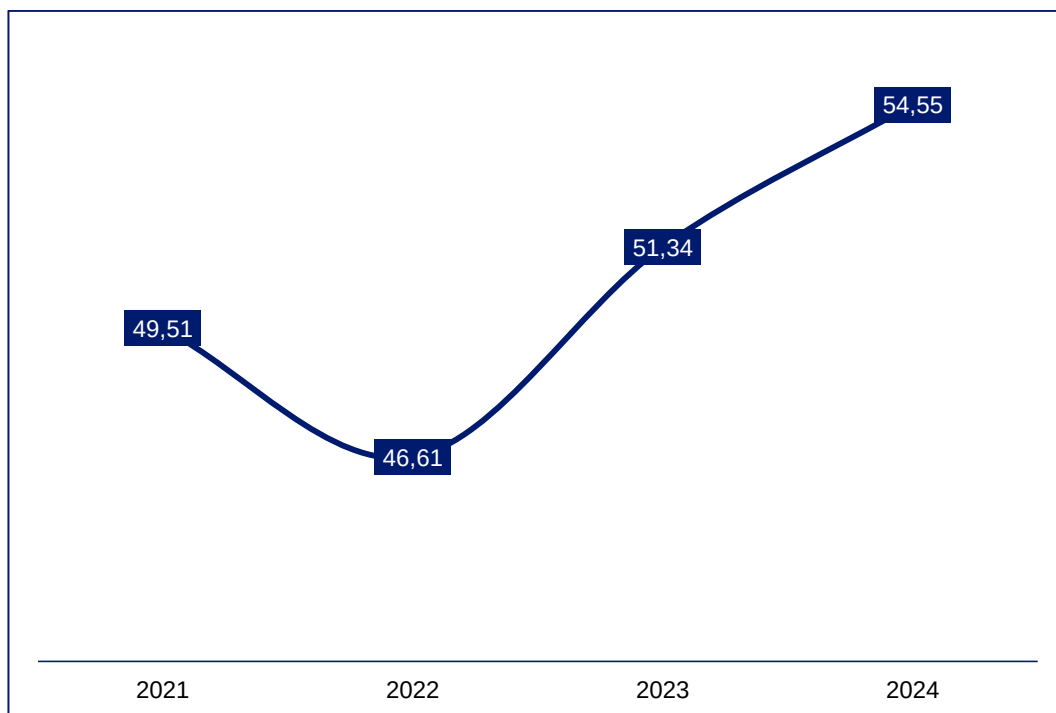
Sumber: BPS

Data pada gambar tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan TPAK dari 64,91 persen pada tahun 2020 menjadi 61,84 persen pada tahun 2021, lalu kembali meningkat hingga mencapai 65,46 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa terjadi peningkatan ketersediaan angkatan kerja di Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah perlu menyikapi peningkatan tersebut dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang tersedia melalui pelatihan dan pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM yang tersedia di Kabupaten Labuhanbatu sehingga dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dan berkontribusi bagi kemajuan daerah.

E Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah indikator komprehensif yang mengukur kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan, mengadopsi, dan menerapkan inovasi untuk mendorong

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.29 Indeks Inovasi Daerah (Poin)

Sumber: Kemendagri

Indeks Inovasi Daerah meningkat dari 49,51 poin pada tahun 2021 menjadi 54,55 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin inovatifnya layanan yang dihasilkan oleh perangkat daerah di Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu harus tetap mendorong setiap perangkat daerah untuk menghasilkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat luas. Peningkatan kapasitas dan keterampilan ASN perlu ditingkatkan agar menghasilkan terobosan-terobosan/program yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.

F Jasa Keuangan

Jasa keuangan merujuk pada seluruh aktivitas dan layanan yang berhubungan dengan pengelolaan uang dan aset. Sektor ini mencakup berbagai lembaga dan produk, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, lembaga pembiayaan, dan investasi. Jasa keuangan berfungsi sebagai perantara dalam memfasilitasi arus modal antara pihak yang memiliki surplus (investor) dan pihak yang

membutuhkan sumber pendanaan (peminjam atau pengusaha). Selain itu, sektor ini juga memiliki peran penting dalam mengelola risiko, menciptakan likuiditas, dan mendukung stabilitas ekonomi melalui berbagai instrumen finansial.

Tabel 2.18 Capaian Indikator Jasa Keuangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	1,16	1,12	1,11	1,08	1,03
Indeks Akses Keuangan Daerah (Poin)	N/A	N/A	4,13	4,18	4,29
Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB ADHB (%)	0,09	0,11	0,10	0,10	0,16
Total Kredit/PDRB ADHB (%)	0,18	0,18	0,21	0,21	0,22
Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Rp miliar)	N/A	186,19	80,42	87,41	48,73

Sumber: BI (diolah, 2025) & BPS

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan cenderung menurun dari 1,16 persen pada tahun 2020 menjadi 1,03 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin menurunnya aktivitas perekonomian pada sektor keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya kebutuhan masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan produk-produk keuangan di daerah. Rendahnya kontribusi tersebut juga disebabkan oleh kurangnya ketersediaan lembaga keuangan di Kabupaten Labuhanbatu. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (*supply side*) dan permintaan (*demand side*) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. IKAD Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2022 sebesar 4,13 poin meningkat hingga tahun 2024 mencapai sebesar 4,29 poin, di mana hal ini berarti kinerja inklusi keuangan Kabupaten Labuhanbatu berada dalam kategori “Hampir Unggul”.

Total Dana Pihak ketiga terhadap PDRB ADHB mengalami

fluktuasi dan cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 0,09 menjadi sebesar 0,16 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa total dana pihak ketiga PDRB ADHB mengalami peningkatan selama 5 tahun. Total kredit/PDRB ADHB cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 0,18 persen menjadi sebesar 0,22 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa rasio total kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan Kabupaten Labuhanbatu semakin meningkat. Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Rp miliar) merupakan total transaksi jual dan beli yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu secara rata-rata dalam setahun. Nilai transaksi saham menurun dari Rp 186,19 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 48,73 miliar pada tahun 2024, hal ini menandakan bahwa aktivitas masyarakat dalam pasar modal di mana dalam hal ini pasar sekunder semakin menurun. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui program peningkatan literasi keuangan atau dapat berkolaborasi dengan pihak lembaga keuangan untuk menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait produk-produk keuangan.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru menjadi strategi kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dengan memadukan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Ekonomi Hijau berfokus pada pengurangan emisi karbon melalui transisi energi terbarukan seperti PLTS dan PLTB, penerapan sistem pertanian presisi, serta pengembangan kota hijau dengan transportasi ramah lingkungan. Sementara itu, Ekonomi Biru memanfaatkan potensi kelautan secara berkelanjutan melalui ekowisata bahari, perikanan berbasis kuota, dan bioteknologi kelautan untuk mengurangi tekanan pada ekosistem pesisir. Integrasi kedua konsep ini terlihat dalam inisiatif seperti budidaya rumput laut yang sekaligus

menyerap karbon dan meningkatkan pendapatan nelayan, atau pembangkit angin lepas pantai yang menghasilkan energi bersih.

A Energi Baru Terbarukan

Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah pilar utama untuk transisi menuju sistem energi yang bersih, berkelanjutan, dan mandiri di masa depan. EBT memberikan solusi untuk mengatasi krisis perubahan iklim sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dengan memanfaatkan kekuatan alam seperti matahari, angin, dan air. Dalam mendorong peningkatan pemanfaatan EBT, maka pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu menggali potensi PLT-EBT yang ada di daerah serta meningkatkan investasi untuk PLT-EBT.

2.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aspek ekonomi, pemerintahan, dan masyarakat untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas layanan. Transformasi digital menjadi kunci daya saing di era ekonomi berbasis pengetahuan. Proses ini tidak sekadar menggantikan sistem manual menjadi digital, tetapi juga mengubah pola pikir, budaya kerja, dan model bisnis agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

A Indeks Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital mengukur kondisi adaptasi teknologi di suatu daerah. Indeks ini disusun oleh 4 pilar, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan di mana masing-masing pilar memiliki sub pilar penyusunnya juga. Apabila indeks ini semakin meningkat, maka mencerminkan semakin tingginya adaptasi digital di suatu daerah. Pada Kabupaten Labuhanbatu, penilaian indeks masyarakat digital sebagai berikut:

Tabel 2.19 Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Labuhanbatu

Pilar	2022	2023	2024	Sub Pilar	2022	2023	2024
Infrastruktur dan Ekosistem	46,51	59,57	56,52	Akses dan Adopsi Teknologi	44,44	61,21	64,23
				Ekosistem Pembelajaran	48,57	52,72	45,88
				Digitalisasi Pemerintah	-	70,30	65,33
Keterampilan Digital	65,20	62,43	60,29	Komplementaritas	67,08	64,75	61,09
				Pengenalan	69,14	63,54	61,75
				Keamanan TIK	59,43	59,13	58,09
Pemberdayaa n	27,55	27,28	29,67	Konsumen/ Pengguna	33,79	34,14	34,92
				Penjual/ Penyedia	21,31	20,43	24,43
Pekerjaan	29,76	38,43	35,98	Permintaan	47,31	53,65	56,66
				Penawaran	12,22	23,21	15,29
Indeks Masyarakat Digital					42,01	46,76	45,78

Sumber: Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa indeks masyarakat digital meningkat dari 42,01 poin pada tahun 2022 menjadi 46,76 poin pada tahun 2023, lalu menurun pada tahun 2024 menjadi 45,78 poin. Infrastruktur dan ekosistem mencerminkan pembangunan dan penerapan teknologi di daerah. Jika dilihat dari sub-pilarnya, Akses dan Adopsi Teknologi mengalami peningkatan setiap tahunnya mencapai 64,23 poin. Hal ini berarti bahwa semakin banyak masyarakat, bisnis, dan institusi yang memperoleh akses dan menggunakan teknologi dalam aktivitasnya. Sementara, sub-pilar Ekosistem Pembelajaran menurun menandakan bahwa semakin menurunnya adopsi teknologi pada sekolah di Kabupaten Labuhanbatu. Begitu juga dengan Digitalisasi Pemerintah, di mana hal ini mengindikasikan bahwa semakin kurangnya implementasi teknologi dalam pemerintahan.

Keterampilan Digital mencerminkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan perangkat digital, memahami informasi, dan mencari informasi secara digital, serta memahami risiko dalam penggunaannya. Pada tahun 2024 sub-pilar dari Pilar Keterampilan Digital mengalami penurunan menunjukkan bahwa adanya penurunan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi.

Pilar Pemberdayaan mencerminkan tingkat penggunaan teknologi baik dari segi produksi dan konsumsi. pada Pilar Pekerjaan mencerminkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang membutuhkan keahlian digital dan ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian digital. Kedua sub-pilar penyusunnya mengalami peningkatan, hal ini menandakan bahwa adanya keselarasan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dengan keahlian digital di Kabupaten Labuhanbatu. Sub-Pilar Konsumen/Pengguna dan Penjual/Penyedia meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya aktivitas konsumtif dan produktif masyarakat dengan memanfaatkan teknologi.

Pilar Pekerjaan menunjukkan ketersediaan dan kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan keahlian di bidang teknologi. Pada Sub-Pilar Permintaan terjadi peningkatan, sementara Sub-Pilar Penawaran terjadi penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan keahlian teknologi semakin meningkat, sementara ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian teknologi semakin menurun.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global adalah proses dinamis yang menghubungkan sistem ekonomi nasional dengan perdagangan internasional, menciptakan jejaring ekonomi yang saling tergantung dan terintegrasi. Konsep ini mencakup upaya strategis untuk mengoptimalkan potensi domestik sekaligus memanfaatkan peluang pasar global melalui berbagai instrumen kebijakan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi.

Tabel 2.20 Indikator Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)	23,43	23,44	23,16	23,27	23,14
Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	38,35	40,02	41,56	N/A	N/A

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	17,81	17,50	17,59	17,57	17,96

Sumber: BPS

Pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB di Kabupaten Labuhanbatu mengalami fluktuasi namun cenderung menurun dari tahun 2020 sebesar 23,43 persen menurun menjadi 23,14 persen pada tahun 2024. Sementara, Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB meningkat dari 38,35 persen pada tahun 2020 menjadi 41,56 persen pada tahun 2022. Namun, pada masa mendatang diharapkan kontribusi PMTB semakin menurun, sementara Ekspor Barang dan Jasa meningkat. Penurunan tersebut bukan berarti mengharapkan penurunan nilai PDRB-nya, namun hanya kontribusinya saja yang bergeser ke Ekspor Barang dan Jasa. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari 17,81 persen pada tahun 2020 menjadi 17,96 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa aktivitas perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu semakin banyak dari Sektor Perdagangan. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat memberikan dukungan pada Sektor Perdagangan melalui pembangunan sentra perdagangan, peningkatan infrastruktur untuk distribusi produk, memberdayakan pelaku UMKM, serta memfasilitasi UMKM daerah dengan kemudahan ekspor.

A Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan investasi yang ditanamkan oleh investor domestik, baik perorangan maupun badan usaha pada suatu daerah. Perkembangan realisasi investasi PMDN menurut sektor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Realisasi Investasi PMDN menurut Sektor

Sektor		2022		2023	
		Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Tanaman Pangan, Perkebunan,	(01-2020) Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI	19	159.008,20	21	155.902,90

	Sektor	2022		2023	
		Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
dan Pernakan	Total	19	159.008,20	21	155.902,90
Industri Makanan	(10-2020) Industri Makanan	10	103.477,00	10	87.538,80
	Total	10	103.477,00	10	87.538,80
Industri Karet dan Plastik	(22-2020) Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik	1	356,90	1	299,40
	Total	1	356,90	1	299,40
Listrik, Gas dan Air	(35-2020) Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin			1	0,00
	Total			1	0,00
Konstruksi	(42-2020) Konstruksi Bangunan Sipil	1	1.600,00	6	608,50
	(43-2020) Konstruksi Khusus			2	554,00
	Total	1	1.600,00	8	1.162,50
Perdagangan dan Reparasi	(46-2020) Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	13	3.134,50	17	633,00
	(47-2020) Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor	18	1.617,00	10	344,50
	(45-2020) Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	14	4.153,40	16	339,90
	Total	45	8.904,90	43	1.317,40
Hotel dan Restoran	(56-2020) Penyediaan Makanan dan Minuman	3	700,10	6	2.886,90
	Total	3	700,10	6	2.886,90
Transportasi, Gudang dan Telekomunika si	(52-2020) Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan	1	0,00	5	2.092,00
	(61-2020) Telekomunikasi			1	0,00
	(49-2020) Angkutan Darat dan Angkutan melalui Saluran Pipa			1	0,00
	Total	1	0,00	7	2.092,00
Jasa Lainnya	(85-2020) Pendidikan				
	(86-2020) Aktivitas Kesehatan Manusia	2	36,70	4	409,10
	(70-2020) Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen	1	167,40	1	5,90
	(74-2020) Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya			1	5,00
	(78-2020) Aktivitas Ketenagakerjaan			1	5,00
	(93-2020) Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya			1	1.836,80
	(59-2020) Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik			3	0,00
	Total	3	204,10	11	2.261,80
Total		83	274.251,20	108	253.461,70

Sumber: BKPM NSWI

Berdasarkan data yang diperoleh dari NSWI, investasi PMDN mengalami penurunan dari Rp 274.251,20 juta pada tahun 2022

menjadi Rp 253.461,70 juta pada tahun 2023, namun jumlah proyek meningkat dari 83 proyek menjadi 108 proyek. Pada tahun 2023 investasi terbesar pada Sektor Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan, dan kegiatan YBDI sebesar Rp 155.902,90 juta dengan jumlah proyek sebanyak 21 proyek, kemudian Sektor Industri Makanan sebesar Rp 87.538,80 juta dengan jumlah proyek sebanyak 10 proyek.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Konsep pusat pertumbuhan ekonomi tidak lagi dipahami secara dikotomis, melainkan sebagai sistem terintegrasi yang saling mendukung dan memberdayakan. Wilayah perkotaan bukan sekadar sebagai konsentrasi infrastruktur dan aktivitas ekonomi, melainkan sebagai simpul transformasi yang mampu mendorong akselerasi pembangunan wilayah sekitarnya. Pendekatan ini mensyaratkan strategi pengembangan yang holistik yang menempatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai modal utama penciptaan nilai ekonomi berkelanjutan. Wilayah perkotaan berperan sebagai katalis transformasi ekonomi, menciptakan ekosistem inovasi, menyediakan akses pasar, dan mengembangkan infrastruktur pendukung, sementara wilayah pedesaan menjadi sumber daya strategis dengan potensi produksi, keragaman komoditas, dan modal sosial budaya.

A Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat ketersediaan, kapasitas, dan kualitas dari berbagai fasilitas fisik yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial suatu wilayah. Indeks ini mengkombinasikan data dari berbagai sektor utama seperti transportasi (jalan, tol, rel, bandara, pelabuhan), energi (kelistrikan, jaringan gas), telekomunikasi

(jaringan broadband, tower sinyal), air bersih, dan sanitasi. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran objektif dan terukur tentang kelengkapan infrastruktur yang dimiliki, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membandingkan pencapaian antarwilayah atau memantau perkembangan dari waktu ke waktu.

B Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah suatu ukuran kualitatif yang menilai persepsi dan tingkat kepuasan pengguna (masyarakat atau pelaku usaha) terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh suatu infrastruktur. Indeks ini bersifat subjektif dan berfokus pada pengalaman langsung dari masyarakat.

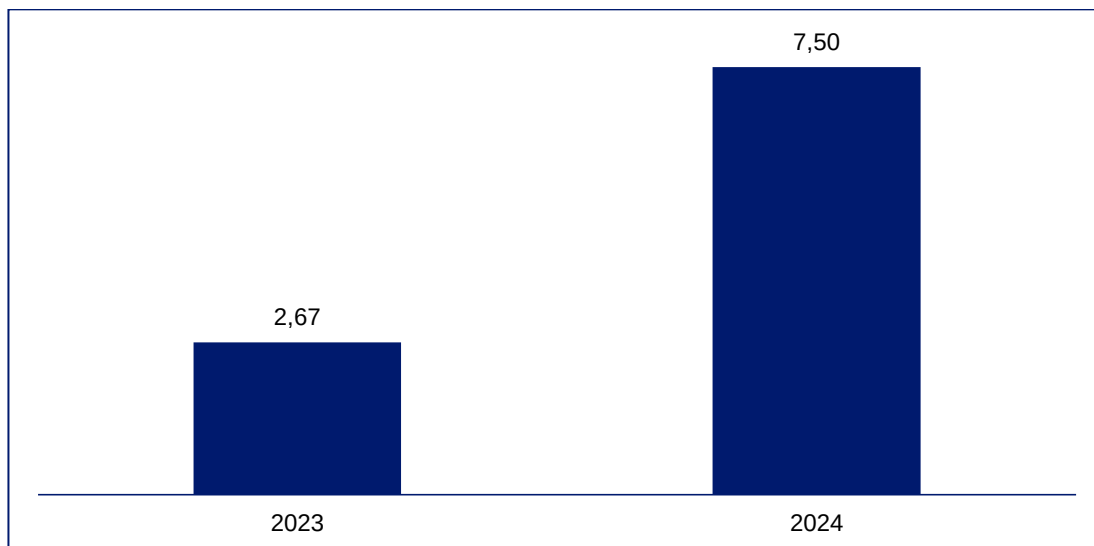
C Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau

Akses terhadap hunian layak dan terjangkau merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya peningkatan kualitas hidup rumah tangga. Hunian yang layak tidak hanya memberikan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan sosial ekonomi penghuninya. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau dijelaskan bahwa rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

D Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah konsep pemberdayaan wilayah pedesaan yang mengintegrasikan potensi lokal, sumber daya manusia, dan lingkungan untuk mencapai kemandirian ekonomi, sosial, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, desa tidak lagi dipandang sebagai wilayah tertinggal, melainkan sebagai pusat pengembangan inovasi

dan produktivitas berbasis kearifan lokal. Konsep desa mandiri mencakup pengembangan ekonomi produktif melalui pemberdayaan UMKM, optimalisasi potensi pertanian dan sumber daya alam, penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan, dan pengembangan infrastruktur sosial-ekonomi.



Gambar 2.30 Persentase Desa Mandiri (%)

Sumber: Kemendes

Persentase Desa Mandiri meningkat sejak tahun 2023 hingga tahun 2024 mencapai 7,50 persen atau sebanyak 18 desa berstatus mandiri di Kabupaten Labuhanbatu. Desa mandiri harus ditingkatkan melalui pemanfaatan dana desa dan pengelolaan yang optimal untuk membangun dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada setiap desa.

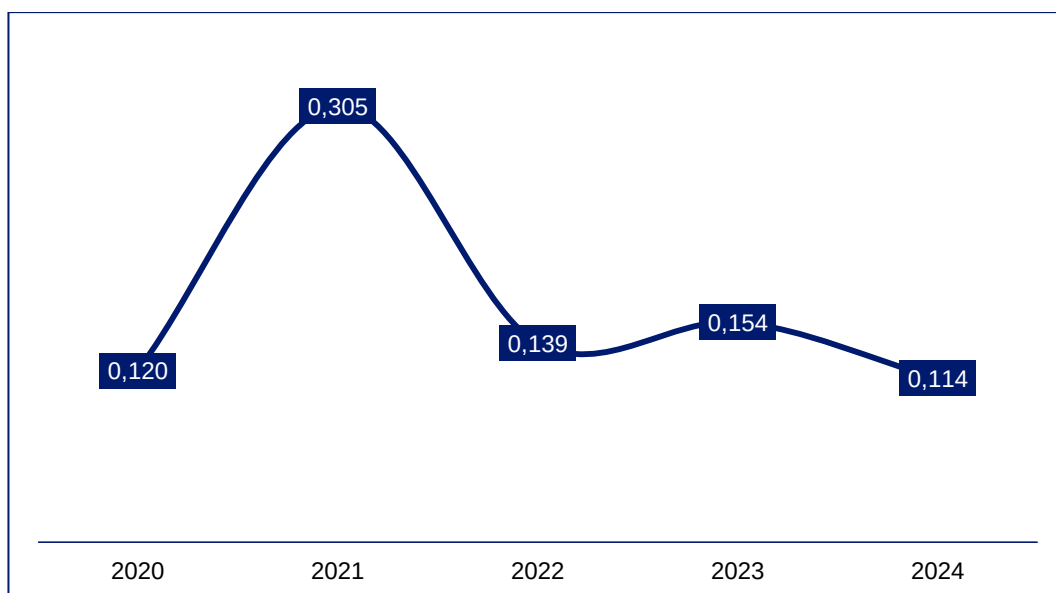
2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas Ekonomi Makro adalah kondisi fundamental perekonomian yang ditandai dengan keseimbangan berbagai indikator makro ekonomi untuk menjamin pertumbuhan berkelanjutan, meminimalkan gejolak, dan menciptakan lingkungan kondusif bagi investasi dan pembangunan

A Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) merupakan indikator fundamental yang menggambarkan kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan daerah dalam menghimpun potensi pendapatan asli daerah. Indikator ini bukan sekadar ukuran penerimaan pajak, melainkan refleksi kompleks dari dinamika ekonomi, kapasitas administrasi perpajakan, dan efektivitas kebijakan fiskal daerah. Konstruksi rasio pajak mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah, kualitas koordinasi antar-stakeholder perpajakan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan.



Gambar 2.31 Rasio Pajak terhadap PDRB (%)

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Diolah, 2024)

Rasio Pajak terhadap PDRB masih sangat kecil selama 5 tahun terakhir berada pada angka di jauh di bawah 1 persen. Hal ini menandakan bahwa pajak yang diterima oleh daerah berkontribusi sangat kecil bagi perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu meningkatkan penerimaan pajaknya melalui optimalisasi dan penggalan potensi pajak daerah.

B Tingkat Inflasi

Inflasi adalah fenomena ekonomi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam

periode tertentu, yang menyebabkan penurunan daya beli uang. Secara sederhana, dengan jumlah uang yang sama, masyarakat akan mendapatkan lebih sedikit barang/jasa dibanding sebelumnya.

Tabel 2.22 Inflasi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2023	IHK November 2024	IHK Desember 2024	Inflasi m to m	Inflasi y to y
Makanan, Minuman, dan Tembakau	104,56	108,31	110,75	2,25	5,92
Pakaian dan Alas Kaki	111,31	110,01	114,02	3,65	2,43
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	103,12	101,83	101,86	0,03	-1,22
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	106,45	106,8	107,1	0,28	0,61
Kesehatan	109,36	112,24	112,24	~0	2,63
Transportasi	113,76	114,16	114,25	0,08	0,43
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	101,92	101,74	101,74	~0	-0,18
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	110,43	113,44	113,18	-0,23	2,49
Pendidikan	100,54	100,54	100,54	~0	~0
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	109,84	111,92	111,98	0,05	1,95
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	119,11	126,72	126,52	-0,16	6,22
Umum (Headline)	106,85	109,03	110,44	1,29	3,36

Sumber: BPS

Inflasi di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 sebesar 3,36 persen, di mana inflasi terbesar berasal dari Kelompok Pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 6,22 persen dan Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 5,92 persen. Pemerintah daerah perlu memperhatikan hal tersebut mengingat

cukup tingginya angka inflasi yang berada di atas 2 persen. Pemerintah perlu menjaga kestabilan harga barang-barang kebutuhan pokok dengan memastikan ketersediaan barang yang cukup dan distribusi yang merata ke seluruh wilayah.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Aspek-aspek ini menjadi tolok ukur kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik.

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif merupakan fondasi fundamental dalam mewujudkan sistem administrasi negara yang modern, transparan, dan responsif terhadap dinamika perubahan. Konsep ini tidak sekadar membangun mekanisme birokrasi yang efisien, melainkan mentransformasi paradigma tata kelola pemerintahan menjadi ekosistem kelembagaan yang mampu menghasilkan kebijakan berkualitas, berorientasi pada kepentingan publik, dan senantiasa berkomitmen pada prinsip-prinsip integritas. Pendekatan komprehensif ini mensyaratkan pembangunan sistem yang terintegrasi, di mana setiap komponen birokrasi difungsikan sebagai instrumen pelayanan publik yang akuntabel, berkinerja tinggi, dan memiliki kemampuan adaptasi terhadap kompleksitas tantangan pembangunan.

Tabel 2.23 Capaian Indikator Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	N/A	C	C	CC	B
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Poin)	N/A	2,10	1,85	2,94	2,94

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik (Poin)	2,51	2,89	3,20	3,29	3,88
Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Integritas Nasional (Poin)	N/A	60,18	70,98	74,32	65,47

Sumber: KemenPAN-RB, *jaga.id*

Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan dari C menjadi B selama tahun 2021-2024. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu semakin baik dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengalami peningkatan dari 2,10 poin pada tahun 2021 menjadi 2,94 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan digitalisasi pada sistem pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu semakin baik. Namun, masih diperlukan peningkatan kualitas aplikasi dan situs pemerintah sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan pemerintah dengan baik. Indeks Pelayanan Publik meningkat dari 2,51 poin pada tahun 2020 menjadi 3,88 poin pada tahun 2024. Indeks Pelayanan Publik adalah ukuran terhadap pelayanan yang diberikan pemerintahan untuk publik. Hal ini menandakan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin baik. Indeks Integritas Nasional meningkat dari 60,18 dengan status “Rentan” pada tahun 2021 menjadi 74,32 dengan status “Waspada”, namun pada tahun 2024 menurun menjadi 65,47 poin dengan status “Rentan” kembali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya persepsi masyarakat secara keseluruhan terhadap integritas pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan sistem pemerintahannya menjadi lebih transparan dan berkadilang bagi seluruh masyarakat tanpa. Peningkatan sistem digital, transparansi anggaran, dan peningkatan profesionalitas ASN dalam memberikan pelayanan kepada publik menjadi faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan yang bermartabat, berkeadaban, dan berkeadilan. Konstruksi ini melampaui pendekatan prosedural konvensional, menciptakan ekosistem hukum dan demokrasi yang secara substantif mampu menjamin perlindungan hak-hak fundamental warga negara, menegakkan supremasi hukum, dan membangun mekanisme keamanan yang komprehensif. Pendekatan holistik ini mensyaratkan transformasi sistemik dalam berbagai dimensi, mulai dari reformasi kelembagaan, penguatan sistem peradilan, hingga pembangunan kesadaran hukum dan demokratis yang bermakna. Hukum tidak lagi dipahami sekadar sebagai instrumen regulasi, melainkan sebagai instrumen keadilan sosial yang mampu menjembatani berbagai kepentingan dan meresolusi konflik secara konstruktif.

Tabel 2.24 Capaian Indikator Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Capaian Aksi HAM (%)	N/A	N/A	47,33	80,97	N/A
Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Rasa Aman (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: SatpolPP

Persentase penegakan Perda di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 100,00 persen, hal ini menandakan bahwa aparaturnya penegak hukum di Kabupaten Labuhanbatu terus bekerja maksimal dalam menjaga keamanan dan kenyamanan publik. Persentase Capaian Aksi HAM meningkat dari 47,33 persen pada tahun 2022 menjadi

80,97 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat keberhasilan dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau program yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan HAM.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan merupakan konstruksi strategis komprehensif yang melampaui pendekatan konvensional keamanan nasional, mencerminkan kemampuan fundamental suatu negara untuk membangun sistem pertahanan dinamis dan diplomasi proaktif dalam lanskap geopolitik global yang semakin kompleks dan tidak pasti. Konsep ini tidak sekadar fokus pada kapasitas militer, melainkan mengintegrasikan secara sistematis instrumen diplomatik, pertahanan, ekonomi, teknologi, dan soft power dalam kerangka penciptaan stabilitas kawasan yang berkelanjutan.

A Indeks Daya Saing Daerah

Daya saing daerah dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi, dan sumber daya manusia. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Perhitungan IDSD didasarkan pada empat komponen, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Pada tahun 2023 perhitungan terjadi perubahan perhitungan IDSD untuk kabupaten/kota. Hasil evaluasi IDSD Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

Tabel 2.25 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Aspek	Pilar	2023	2024
Lingkungan Pendukung	Institusi	3,78	4,22
Lingkungan Pendukung	Infrastruktur	2,26	3,49

Aspek	Pilar	2023	2024
Lingkungan Pendukung	Adopsi TIK	4,46	4,68
Lingkungan Pendukung	Stabilitas Ekonomi Makro	2,81	3,68
SDM	Kesehatan	3,87	3,82
SDM	Keterampilan	3,52	3,82
Pasar	Pasar Produk	2,04	2,42
Pasar	Pasar Tenaga Kerja	2,91	2,79
Pasar	Sistem Keuangan	1,03	2,23
Pasar	Ukuran Pasar	4,52	4,54
Ekosistem Inovasi	Dinamisme Bisnis	2,99	3,75
Ekosistem Inovasi	Kapabilitas Inovasi	1,84	1,74
IDSD		3,00	3,43

Sumber: BRIN

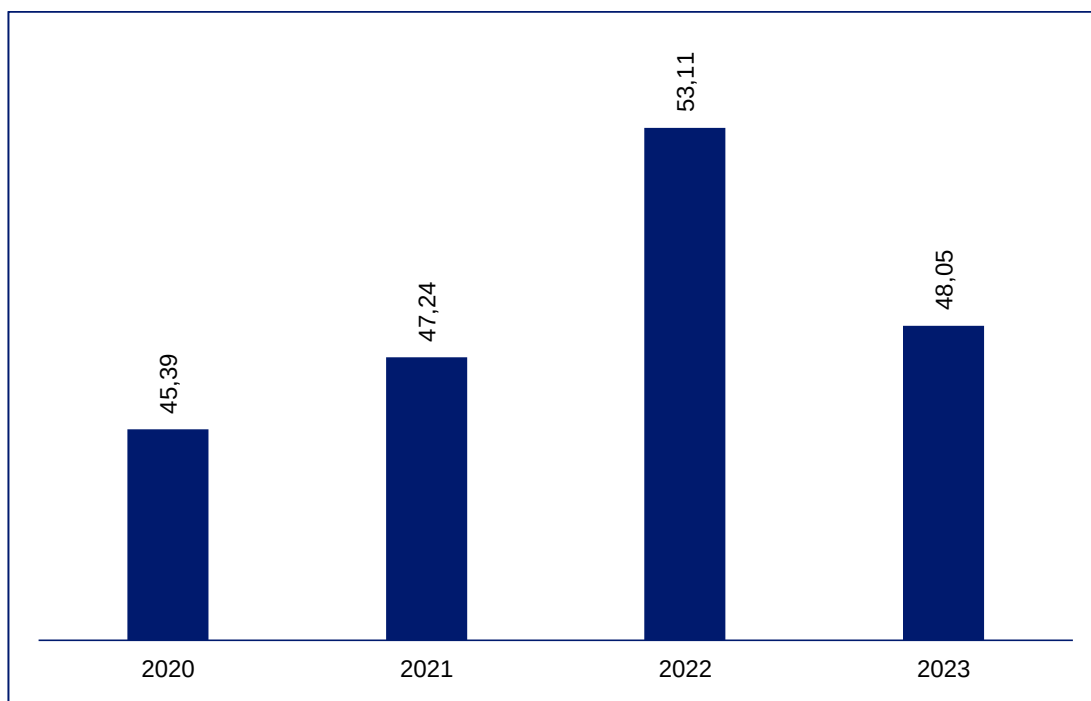
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pilar yang memiliki nilai tertinggi pada IDSD Kabupaten Labuhanbatu adalah Ukuran Pasar sebesar 4,54 poin. Ukuran Pasar berdampak pada produktivitas sehingga ketika semakin besar ukuran pasar maka semakin tinggi peluang pelaku bisnis dalam mengeksplorasi skala ekonomi. Ukuran pasar menguatkan struktur industri sehingga meningkatkan nilai tambah. Capaian yang tinggi ini mengindikasikan bahwa skala ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu sangat baik dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya. Kemudian, Adopsi TIK sebesar 4,68 poin. Adopsi TIK mengukur tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada Kabupaten Labuhanbatu. Angka yang tinggi mengindikasikan bahwa infrastruktur jaringan telekomunikasi serta pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Labuhanbatu sudah sangat baik dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Namun, yang menjadi permasalahan dalam Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah Kapabilitas Inovasi dengan nilai sebesar 1,74 poin. Pilar Kapabilitas Inovasi mencerminkan kualitas dan kuantitas riset dan inovasi daerah. Capaian rendah ini menunjukkan bahwa masih kluangnya inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu mendorong minat masyarakat untuk melakukan

inovasi melalui dukungan berupa pendanaan dan fasilitas untuk riset dan inovasi.

B Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan tingkat atau risiko penduduk terkena tindak kriminal atau kejahatan. Angka kriminalitas diukur dari jumlah kejahatan yang terjadi dalam setahun per 10.000 penduduk. Angka kriminalitas menunjukkan berapa banyak penduduk yang terkena tindak kriminal dalam satu tahun dari 10.000 penduduk. Perkembangan angka kriminalitas pada Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.32 Angka Kriminalitas Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: BPS (diolah, 2024)

Berdasarkan data tersebut, angka kriminalitas Kabupaten Labuhanbatu cenderung meningkat dari 45,39 per 10.000 penduduk pada tahun 2020 menjadi 48,05 per 10.000 penduduk pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 48 orang dari 10.000 penduduk yang berpotensi mengalami tindak pidana. Tingkat kriminalitas di Kabupaten Labuhanbatu yang semakin meningkat dapat mempengaruhi keputusan investor dalam

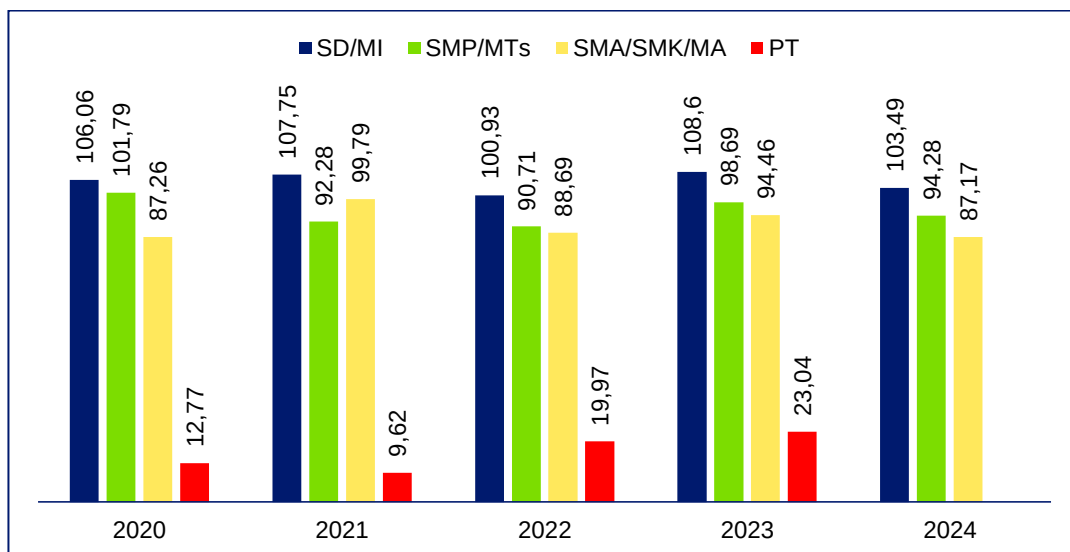
berinvestasi.

2.4.4 Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan wajib dasar merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan sistem pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan sosial. Konstruksi layanan ini mencerminkan komitmen negara untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat dalam aspek fundamental kehidupan, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan pelayanan administratif publik. Pendekatan komprehensif ini tidak sekadar membangun mekanisme pelayanan administratif, melainkan mentransformasi sistem layanan menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, pengurangan kesenjangan sosial, dan akselerasi pembangunan berkelanjutan. Filosofi dasar layanan urusan wajib adalah menjamin setiap masyarakat memperoleh akses layanan berkualitas tanpa diskriminasi, menciptakan ruang kesetaraan dalam memperoleh hak-hak dasar.

A Pendidikan

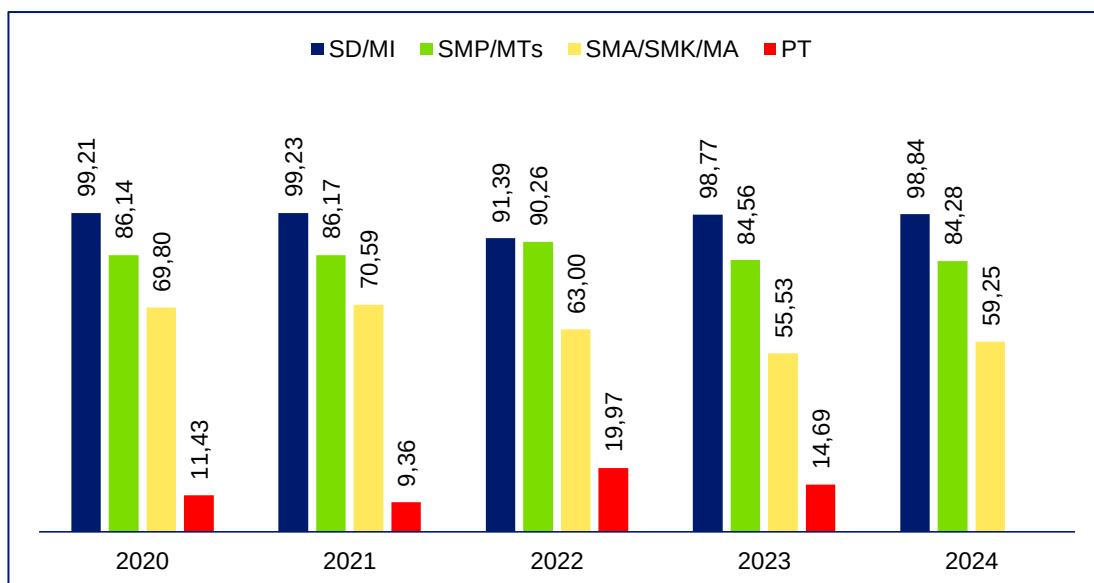
Pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Pembangunan dari segi pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti sekolah, tenaga pendidik, teknologi, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan wawasan, serta keahlian sehingga dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan industri di masa depan.



Gambar 2.33 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: BPS

Berdasarkan gambar tersebut, dalam jangka waktu 2020-2024, Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan SD/MI menurun dari 106,06 persen menjadi 103,49 persen. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami peningkatan dari 101,79 persen menjadi 94,28 persen. Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA menurun dari 87,26 persen menjadi 87,17 persen. Namun, pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi mengalami peningkatan dari 12,77 persen menjadi 23,04 persen pada tahun 2023.



Gambar 2.34 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: BPS

Angka Partisipasi Murni untuk seluruh jenjang pendidikan mengalami penurunan selama tahun 2020-2024. Pada jenjang pendidikan SD/MI, APM menurun dari 99,21 persen menjadi 98,84 persen. Begitu juga dengan pendidikan SMP/MTs yang menurun dari 86,14 persen menjadi 84,28 persen. Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA juga menurun dari 69,80 persen menjadi 59,25 persen. Sementara pada jenjang Perguruan Tinggi meningkat dari 11,43 persen menjadi 14,69 persen pada tahun 2023. Capaian kinerja urusan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.26 Capaian Kinerja Pendidikan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	12,27	14,12	11,12	10,49	11,48
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	63,13	69,42	64,28	63,54	N/A

Sumber: BPS (diolah, 2024), Dinas Pendidikan, & Dinas Tenaga Kerja

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi sedikit menurun dari 12,27 persen pada tahun 2020 menjadi 11,48 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya masyarakat berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini disebabkan oleh masih adanya masyarakat yang kurang berminat untuk menempuh pendidikan tinggi setelah SMA dan menjadi tenaga kerja. Selain itu, terdapat beberapa masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi di Kabupaten Labuhanbatu mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dari tahun 2020 sebesar 63,13 persen menjadi sebesar 63,54 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang sedang bekerja tidak sesuai

dengan bidang keahlian.

B Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas. Dengan adanya masyarakat yang sehat, maka daya pikir masyarakat juga semakin baik sehingga mampu mendorong produktivitas daerah. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan, serta tenaga kesehatan yang profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Jumlah Rumah Sakit Tahun 2020-2024 di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27 Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Labuhanbatu

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Bilah Hulu	2	-	-	-	-
Pangkalan	-	-	-	-	-
Bilah Barat	-	-	-	-	-
Bilah Hilir	-	-	-	-	-
Penai Hulu	1	-	-	-	-
Penai Tengah	-	-	-	-	-
Penai Hilir	-	-	-	-	-
Rantau Selatan	2	2	2	2	2
Rantau Utara	4	3	4	4	3
Labuhanbatu	9	5	6	6	5

Sumber: BPS

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Labuhanbatu mengalami penurunan dari tahun 2020 berjumlah 9 Rumah Sakit menjadi 5 Rumah Sakit pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan terdapatnya rumah sakit yang sudah tutup atau tidak aktif hingga tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu memperhatikan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa infrastruktur pendukung, serta sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa

kecuali.

Jumlah Dokter Tahun 2020-2024 di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28 Jumlah Dokter di Kabupaten Labuhanbatu

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Bilah Hulu	18	14	16	17	21
Pangkalan	8	7	7	7	3
Bilah Barat	20	29	17	17	17
Bilah Hilir	7	6	6	5	12
Penai Hulu	4	4	2	2	4
Penai Tengah	3	3	3	2	7
Penai Hilir	5	3	3	3	7
Rantau Selatan	133	117	109	74	44
Rantau Utara	83	47	54	52	33
Labuhanbatu	281	230	217	179	148

Sumber: BPS

Jumlah dokter di Kabupaten Labuhanbatu mengalami penurunan dari tahun 2020 sebanyak 281 Dokter menjadi 148 Dokter di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkurangnya jumlah dokter yang berada di Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap wilayah memiliki jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang mencukupi kebutuhan sesuai dengan standar yang berlaku.

Capaian kinerja kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29 Capaian Kinerja Kesehatan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	34,85	110,69	91,44	56,49	N/A
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	42,39	37,06	37,37	44,22	N/A
Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	97,13	86,32	90,60	89,40	N/A

Sumber: Dinas Kesehatan dan BPJS

Angka Kematian Ibu menurun dari 34,85 per 100.000 KH pada

tahun 2020 menjadi 56,49 per 100.000 KH pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya pelayanan kesehatan ibu sehingga perlu didukung oleh ketersediaan peralatan kesehatan dalam membantu persalinan ibu melahirkan. Kemudian, prevalensi stunting di Kabupaten Labuhanbatu juga menurun dari 27 persen pada tahun 2021 menjadi 20,20 persen pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa terlaksananya program pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi balita dan kesadaran orang tua untuk memberikan gizi yang baik kepada anaknya. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) meningkat dari 42,39 persen pada tahun 2020 menjadi 44,22 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya penanganan kasus TBC. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk menyediakan dan mengatasi permasalahan TBC, selain itu berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) menurun dari 97,13 persen pada tahun 2020 menjadi 89,40 persen pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa pengobatan medis yang dilakukan untuk mengatasi TBC semakin kurang efektif dalam mengobati pasien TBC. Maka dari itu, perlu upaya untuk menyediakan peralatan dokter dan penyediaan obat yang ampuh untuk mengobati masyarakat yang terdampak kasus TBC.

C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi berbagai kegiatan terkait infrastruktur dan pengaturan tata kota. Di dalamnya termasuk pembangunan jalan, jembatan, transportasi umum, sistem drainase, pengelolaan air, dan penataan ruang perkotaan serta pedesaan. Pekerjaan umum mencakup pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, seperti jalan raya, jembatan, dan saluran air. Sementara itu, penataan ruang berkaitan

dengan perencanaan tata kota yang mencakup zonasi, penggunaan lahan, regulasi bangunan, dan pengembangan wilayah.

Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jalan dalam Kondisi Baik (%)	42,26	45,00	42,34	54,16	49,54
Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	N/A	N/A	N/A	13,25	N/A
Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak (%)	90,37	94,34	93,68	91,88	N/A
Akses Rumah Tangga terhadap Sanitas Layak (%)	79,06	81,50	80,36	84,79	88,70

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki beberapa indikator meliputi persentase jalan dalam kondisi baik, persentase saluran irigasi dalam kondisi baik, konsumsi listrik per kapita serta kapasitas air baku. Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Labuhanbatu cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 42,26 persen menjadi 54,16 persen pada tahun 2023, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 49,54 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perawatan dan perbaikan jalan telah terimplementasi dengan baik sehingga meningkatkan panjang jalan dengan kondisi baik, namun penurunan rasio jalan dalam kondisi baik di tahun 2024 perlu menjadi perhatian pemerintah agar terus melakukan perbaikan dan perawatan jalan secara berkelanjutan. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 13,25 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perbaikan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu agar air terdistribusi dengan baik untuk aktivitas pertanian di Kabupaten Labuhanbatu.

Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Layak mengalami peningkatan dari 90,37 persen pada tahun 2020 menjadi 94,34 persen pada tahun 2021, lalu menurun hingga tahun 2023 menjadi 91,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen rumah tangga memiliki akses air minum layak di Kabupaten

Labuhanbatu. Namun, yang menjadi perhatian adalah sisa rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum layak. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu mengidentifikasi rumah tangga mana yang belum memperoleh akses tersebut serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahannya. Sementara, Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Sanitasi Layak mengalami peningkatan dari 79,06 persen pada tahun 2020 menjadi 88,70 persen pada tahun 2024. Pemerintah perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak melalui pembangunan sanitasi kepada seluruh rumah tangga yang belum memperoleh akses.

D Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melibatkan upaya pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah aspek penting dalam perkembangan dan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Aspek ini meliputi berbagai hal terkait dengan tempat tinggal, penyediaan perumahan yang terjangkau, aman, dan nyaman, serta pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Layak Huni (%)	66,20	70,78	66,45	69,71	N/A
Persentase Luas Kawasan Kumuh (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah Layak Huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar kebutuhan dasar manusia, melampaui sekadar konstruksi fisik dan mencakup dimensi kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan martabat penghuninya. Bukan sekadar bangunan, rumah layak huni merepresentasikan ruang hidup yang memberikan perlindungan,

kesehatan, dan pengembangan potensi individu serta keluarga. Kriteria utamanya meliputi struktur bangunan yang kuat dan tahan bencana, memiliki akses air bersih dan sanitasi yang memadai, ventilasi udara yang sehat, pencahayaan alami yang cukup, serta luas ruang yang proporsional untuk setiap penghuninya. Secara sosial, rumah layak huni juga harus memberikan privasi, akses ke fasilitas umum, dan berada di lingkungan yang aman dari bencana, serta dekat dengan sarana pendidikan dan kesehatan. Persentase Rumah Layak Huni berfluktuasi dari 66,20 persen pada tahun 2020 menjadi 69,71 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya tempat tinggal yang belum layak untuk ditinggali oleh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah perlu menguatkan program terkait rehabilitasi rumah tidak layak huni agar memberikan tempat tinggal yang layak kepada masyarakat sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat untuk bertempat tinggal.

E Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan tanggung jawab penting pemerintah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan hidup bagi seluruh masyarakat.

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	75,00	77,00	79,00	80,00	N/A
Persentase Kasus Narkoba (%)	N/A	N/A	N/A	64,95	N/A
Persentase Ormas yang Dibina (%)	N/A	N/A	N/A	4,00	N/A

Sumber: Kesbangpol, Satpol PP

Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya merupakan ukuran yang menilai keamanan

masyarakat ketika berjalan sendiri di area atau lingkungan tempat tinggalnya. Pada tahun 2023 sebanyak 80 persen penduduk merasa aman ketika berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Persentase kasus narkoba pada tahun 2023 sebesar 64,95 persen. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar kasus kriminal di Kabupaten Labuhanbatu terkait narkoba. Pemerintah harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui penguatan dan pengawasan terhadap jaringan sindikat narkoba agar menurunkan kasus narkoba di Kabupaten Labuhanbatu. Persentase Ormas yang dibentuk pada tahun 2023 sebesar 4,00 persen, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak Ormas yang belum mendapatkan pembinaan di Kabupaten Labuhanbatu. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM merupakan persentase yang mengukur ketercapaian program atau aksi yang berkaitan dengan HAM di Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 2022, persentase capaian pelaksanaan aksi HAM sebesar 47,33 persen meningkat pada tahun 2023 mencapai 80,97 persen.

F Sosial

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terkhusus yang kurang mampu maka pemerintah menerapkan berbagai program perlindungan sosial. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat untuk merasakan seluruh pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Capaian kinerja perlindungan sosial sebagai berikut:

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Sosial

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kesejahteraan Sosial (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	N/A	N/A	N/A	0,003	N/A
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	N/A	36,33	38,66	40,08	N/A

Sumber: Dinas Tenaga Kerja & BPJS Ketenagakerjaan

Persentase disabilitas bekerja di sektor formal di Kabupaten

Labuhanbatu pada tahun 2023 sebesar 0,003 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya proporsi disabilitas yang bekerja pada sektor formal dari seluruh angkatan kerja yang tergolong disabilitas. PMKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat dari 36,33 persen pada tahun 2021 menjadi 40,08 persen pada tahun 2023. Capaian ini masih menunjukkan bahwa masih banyaknya PMKS yang belum memperoleh bantuan sosial sehingga ke depannya pemerintah perlu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

2.4.5 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Layanan urusan wajib non dasar merupakan konstruksi sistemik pelayanan publik yang melampaui kebutuhan fundamental. Konsep ini mengintegrasikan instrumen pelayanan yang bersifat pengembangan dan pemberdayaan di luar layanan dasar esensial, mencakup aspek-aspek strategis yang mendorong akselerasi pembangunan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penciptaan ekosistem inovasi berkelanjutan.

A Tenaga Kerja

Urusan tenaga kerja meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, perlindungan hak-hak pekerja, serta pengembangan sumber daya manusia.

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Lulusan Perguruan Tinggi (%)	12,27	14,12	11,12	10,49	11,48

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, BPS (diolah, 2024)

Rasio lulusan Perguruan Tinggi cenderung menurun dari 12,27 persen pada tahun 2020 menjadi 11,48 persen pada tahun 2024.

Penurunan ini menandakan bahwa semakin berkurangnya minat masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini juga dapat disebabkan oleh banyaknya masyarakat berpendidikan tinggi yang migrasi ke luar daerah.

B Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan upaya untuk meningkatkan posisi, hak, dan kesejahteraan perempuan serta memberikan perlindungan kepada anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Kedua isu ini sering dihubungkan karena perempuan dan anak-anak seringkali berada dalam posisi yang rentan dan dapat menjadi korban berbagai bentuk ketidaksetaraan dan kekerasan. Capaian indikator kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
TPAK Perempuan (%)	47,32	43,06	43,73	44,53	47,66
Indeks Perlindungan Khusus Anak (Poin)	N/A	68,85	69,68	76,70	N/A
Jumlah kasus KDRT (kasus)	15	3	3	27	N/A

Sumber: BPS & Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan cenderung meningkat dari 47,32 persen pada tahun 2020 menjadi 44,66 persen pada tahun 2024. TPAK Perempuan merupakan perbandingan antara penduduk perempuan yang bekerja dan menganggur/sedang mencari kerja dibandingkan seluruh penduduk perempuan usia produktif. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa semakin sedikitnya perempuan yang termasuk bukan angkatan kerja karena memilih mengurus rumah tangga atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai dan

memantau tingkat perlindungan anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus. IPKA meningkat dari 68,85 poin pada tahun 2021 menjadi 76,70 poin pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi dan kebijakan terkait perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus semakin banyak dibentuk sehingga setiap anak rentan (disabilitas, terlantar, dan sebagainya) dapat terlindungi dari aktivitas perundungan, diskriminasi, dan sejenisnya. Jumlah kasus KDRT pada Kabupaten Labuhanbatu cenderung meningkat dari 15 kasus pada tahun 2020 menjadi 27 kasus pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kurang harmonisnya keluarga yang terdapat pada Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu mengupayakan untuk menurunkan kasus tersebut melalui pembinaan keluarga sebelum menikah atau pun edukasi parenting, serta menyediakan layanan khusus permasalahan rumah tangga agar setiap masyarakat lebih harmonis dalam berumah tangga.

C Pangan

Urusan pangan melibatkan berbagai aspek penting yang berkaitan dengan produksi, distribusi, keamanan, dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Aspek ini meliputi beberapa bidang utama yang harus dikelola oleh pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik bagi seluruh masyarakat.

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Pangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	N/A	71,30	81,10	85,00	N/A
Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	84.292,74	72.104,00	59.458,56	62.093,22	N/A

Sumber: Dinas Pangan

Skor pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan di Kabupaten Labuhanbatu. Skor PPH

meningkat dari 71,30 poin pada tahun 2021 menjadi 85,00 poin pada tahun 2023. Peningkatan Skor PPH menandakan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat menjadi lebih beragam dan seimbang, artinya masyarakat semakin tidak bergantung pada satu jenis makanan saja. Ketersediaan pangan utama adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dan juga impor yang diterima di Kabupaten Labuhanbatu. Ketersediaan pangan utama cenderung menurun dari 84.292,74 ton pada tahun 2020 menjadi 62.093,22 ton pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkurangnya supply pangan utama di Kabupaten Labuhanbatu

D Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kerangka yang menyediakan sumber daya untuk kehidupan dan memberikan layanan ekosistem yang vital, seperti penyediaan oksigen, penyaringan air dan keanekaragaman hayati. Indikator yang menjadi fokus perhatian pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam mengelola urusan lingkungan hidup meliputi penanganan dan pengurangan sampah. Capaian kinerja urusan Lingkungan hidup tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	N/A	24,05	24,26	24,70	N/A
Indeks Kualitas Udara	N/A	76,85	82,98	83,94	N/A
Indeks Kualitas Air	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas tutupan lahan mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2021 sebesar 24,05 meningkat menjadi 24,70 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan sudah meningkat setiap tahunnya. Indeks Kualitas Udara meningkat dari 76,85 poin pada tahun 2021 menjadi 83,94 poin pada tahun 2023. Indeks Kualitas Udara adalah ukuran

yang digunakan untuk menilai polusi udara. Hal ini menandakan bahwa semakin baiknya penanganan polusi udara di Kabupaten Labuhanbatu. Indeks Kualitas Air merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui karakteristik mutu yang dibutuhkan untuk pemanfaatan tertentu dari sumber-sumber air.

E Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyebaran penduduk di Kabupaten Labuhanbatu saat ini masih belum merata. Dari 9 Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, Pada tahun 2023, Jumlah penduduk Labuhanbatu sebanyak 513.826 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 201 jiwa per km².

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Rantau Utara yaitu 99.982 jiwa dengan kepadatan 889 jiwa per km² sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pangkatan sebanyak 39.285 dengan kepadatan penduduk 111 jiwa per km². Kecamatan Rantau Selatan merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan penduduk 1.212 jiwa per km² dan Kecamatan Panai Tengah merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 89 jiwa per km².

Capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk yang memiliki KK	139.900	141.962	344.173	148.626	N/A
Jumlah penduduk yang memiliki akte perkawinan	4.745	12.153	101.191	102.654	N/A
Rasio penduduk memiliki KK	2,95	8,56	29,40	69,06	N/A
Jumlah penduduk yang memiliki Akte Kelahiran	165.885	173.527	145.721	173.020	N/A
Jumlah Penduduk	504.876	499.982	508.024	513.826	N/A
Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk	32,86	34,71	28,68	33,60	N/A

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu

Jumlah penduduk yang memiliki KTP pada tahun 2023

mencapai 95,72 persen. Dari seluruh jumlah penduduk yang memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023, tercatat jumlah penduduk yang memiliki akte perkawinan sebanyak 101.191 atau bertambah sebanyak 89.036 dari tahun 2023. Rasui penduduk memiliki KK meningkat dari 19,17 persen menjadi 69,06 persen selama tahun 2020-2023. Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk adalah jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran/jumlah penduduk x 1.000 jiwa. Rasio kepemilikan akte kelahiran cenderung meningkat dari 31,71 per 1.000 jiwa menjadi 33,60 per 1.000 jiwa selama tahun 2020-2023.

F Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat dari pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat desa. Indikator yang dapat mencerminkan antara lain pengelolaan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Organisasi Tingkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa. Capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Desa Membangun	0,6524	0,6605	0,6748	0,6980	0,7072

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks desa membangun merupakan indikator yang mengukur pembangunan desa melalui tiga indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Indeks Desa Membangun Kabupaten Labuhanbatu meningkat setiap tahunnya dari 0,6524 poin pada tahun 2020 menjadi 0,7072 poin pada tahun 2024. Meskipun hingga tahun 2024 masih dalam kategori berkembang, capaian pada tahun 2024 sudah mendekati kategori maju. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin baiknya upaya pemerintah dalam meningkatkan status desanya. Persentase desa mandiri di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023 sebesar 2,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya desa yang berstatus mandiri mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. Namun, Indeks Desa Membangun tidak lagi digunakan pada tahun 2025 dan digantikan dengan Indeks Desa.

G Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan instrumen fundamental dalam manajemen pembangunan demografis yang berkelanjutan. Pendekatan komprehensif ini tidak sekadar berfokus pada pengaturan kuantitas penduduk, melainkan menciptakan ekosistem pembangunan kualitas sumber daya manusia yang holistik.

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate (Rata-Rata Anak Per Wanita)	2,47	N/A	2,47	2,35	2,33
Rasio Akseptor KB (%)	81,99	83,87	45,42	55,62	64,53

Sumber: BPS (Diolah, 2025)

Total Fertility Rate mengalami penurunan dari 2,47 pada tahun 2020 menjadi 2,33 pada tahun 2024 . Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk berjalan dengan baik. Sementara itu, rasio akseptor KB mengalami penurunan dari 81,99 persen pada tahun 2020 menjadi 64,53 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menandakan penurunan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan program KB. Meskipun demikian, jika dilihat berdasarkan jumlah pasangan usia subur, jumlahnya mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa adanya penurunan keinginan masyarakat

untuk melangsungkan pernikahan atau berumah tangga.

H Perhubungan

Aspek pelayanan umum lainnya adalah bidang perhubungan. Kinerja pelayanan bidang perhubungan di Kabupaten Labuhanbatu antara lain peningkatan pengawasan jalan dan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Konektivitas (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase kepemilikan KIR (%)	100	100	100	100	N/A
Pemasangan rambu-rambu (%)	0	0	0	0	N/A

Sumber: Dinas Perhubungan

Persentase kepemilikan KIR di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan untuk segi kuantitasnya sehingga sudah semua memiliki KIR dari tahun 2020-2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah angkutan umum dinas perhubungan yang sudah lulus uji KIR. Pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Labuhanbatu masih belum dilakukan dari tahun 2020-2023. Hal ini menunjukkan belum adanya keseriusan dinas perhubungan untuk melakukan pemasangan rambu-rambu. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan / akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda.

I Komunikasi dan Informatika

Bidang komunikasi dan informatika berperan penting untuk

meningkatkan tata kelola pemerintahan serta memberikan akses pelayanan terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu.

Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan layanan telekomunikasi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Cakupan layanan telekomunikasi merupakan persentase dari luas cakupan telekomunikasi terhadap luas wilayah. Indikator ini menggambarkan seberapa luas akses telekomunikasi dapat dirasakan oleh masyarakat Labuhanbatu.

J Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi menjadi bagian dari struktur ekonomi yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan warga terutama di kalangan masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah, dan prinsip kolaborasi menjadi landasan. Pentingnya peranan koperasi tecermin dalam dukungannya terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM atau sektor usaha informal merupakan bentuk ekonomi masyarakat yang mampu bertahan ketika sektor ekonomi formal tidak mampu memberikan lapangan pekerjaan. Capaian kinerja koperasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	N/A	N/A	N/A	0,28	N/A
Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Koperasi Aktif (%)	32,45	35,35	35,35	32,87	N/A
Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Proporsi jumlah UKM non pertanian (%)	N/A	N/A	N/A	94,74	N/A

Sumber: Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian

Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau

penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 0,28 persen. Hal ini menandakan bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Labuhanbatu masih kecil. Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Labuhanbatu mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 32,45 persen menjadi 32,87 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya minat masyarakat terhadap koperasi di Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 2023 terdapat sebesar 94,74 persen UKM yang bergerak di bidang pertanian.

K Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi adalah salah satu cara untuk mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan dan semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Capaian kinerja urusan penanaman modal tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan investasi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah investor PMDN berskala nasional (Perusahaan)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah investor PMA berskala nasional (Perusahaan)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS (diolah, 2024)

Jumlah investor PMDN berskala nasional merupakan investor

dalam negeri yang memberikan investasi modal di Kabupaten Labuhanbatu. Jumlah investor PMA berskala nasional adalah investor asing yang memberikan investasi modalnya di Kabupaten Labuhanbatu.

L Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga memiliki peran penting bagi pembangunan suatu wilayah. Pemuda berperan dalam pembangunan dan memberdayakan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu, sementara olahraga menjadi suatu daya tarik pariwisata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu.

Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	50	49	49	49	N/A
Persentase Wirausaha Muda (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

Persentase organisasi pemuda yang aktif adalah organisasi yang membutuhkan sarana prasarana untuk generasi muda sebagai cara mengaktualisasikan diri secara positif yang di sediakan oleh pemerintah. Persentase wirausaha muda merupakan pemuda yang bekerja menjadi wirausaha di Kabupaten Labuhanbatu. Cakupan pelatih yang bersertifikasi merupakan pelatih cabang olahraga yang ada di Kabupaten Labuhanbatu memiliki sertifikasi.

M Kebudayaan

Pemerintah harus hadir dalam upaya-upaya pembangunan di bidang kebudayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelestarian dan pengembangan kawasan cagar budaya, benda dan situs yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu. Capaian kinerja

urusan 96budayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan merupakan peninggalan budaya berupa benda, situs ataupun kawasan yang harus dilestarikan untuk menjaga budaya di Kabupaten Labuhanbatu.

N Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Dengan adanya perpustakaan menjadikan sebuah sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan. Perpustakaan menjadi suatu akses informasi bagi masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu. Capaian kinerja urusan Perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengunjung Perpustakaan (Orang)	6.799	3.062	4.316	19.850	N/A
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat (Orang)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip

Jumlah pengunjung perpustakaan di Labuhanbatu cenderung mengalami sedikit penurunan dari tahun 2020 sebanyak 6.799 jiwa, menurun hingga 3.062 jiwa pada tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 19.850 jiwa pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan masih kurangnya minat masyarakat mengunjungi

perpustakaan. umlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat merupakan banyaknya pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat di Kabupaten Labuhanbatu.

O Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan dalam bentuk fisik dan non fisik yang dibuat dan diterima oleh lembaga pemerintah. Tujuan kearsipan adalah untuk menyimpan sumber informasi dan sebagai alat pengawasan dalam perencanaan, perumusan kebijakan, pengembangan dan berbagai hal. Capaian Indikator Urusan Kearsipan sebagai berikut:

Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (%)	56,80	63,64	72,70	72,70	N/A

Sumber: SIPD Kabupaten Labuhanbatu, 2023.

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 56,80 persen menjadi sebesar 72,70 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Labuhanbatu semakin membaik. Namun ketersediaan SDM yang handal dan professional perlu ditingkatkan lagi.

2.4.6 Urusan Pilihan

Urusan pilihan tidak sekadar sebagai mekanisme administratif, melainkan sebagai filosofi pembangunan yang memberi ruang otonomi daerah untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayahnya. Pendekatan komprehensif ini mensyaratkan kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan sistematis terhadap potensi strategis wilayah, mengembangkan inovasi daerah, dan menciptakan

pembangunan yang responsif terhadap karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan geografis spesifik lokalitasnya.

A Pariwisata

Kabupaten Labuhanbatu memiliki destinasi wisata yang indah dan berpotensi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi bagi daerah. Pariwisata berkaitan erat dengan ketersediaan akomodasi (penginapan, perhotelan, dan sejenisnya) dan sektor makan minum (restoran, café dan sebagainya) karena sektor tersebut mendukung daya tarik pariwisata sehingga kontribusi sektor pariwisata dapat diukur menggunakan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Capaian kinerja urusan Pariwisata tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.49 Capaian Kinerja Pariwisata

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Orang)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS & Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata

Tamu asing Hotel Berbintang adalah jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang Kabupaten Labuhanbatu. Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata. Persentase PAD sektor pariwisata merupakan persentase pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu yang diperoleh dari sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terus berupaya untuk menggali potensi dan pengembangan wisata daerah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

B Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor strategis dan potensial. Sektor ini tidak hanya mencakup kegiatan penangkapan ikan di laut, tetapi juga meliputi budidaya perikanan (akuakultur), pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, wisata bahari, serta jasa-jasa terkait kelautan.

Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Nelayan (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Proporsi PDRB Sub-Sektor Perikanan	0,55	0,51	0,49	0,48	N/A
Produksi Perikanan (ton)	4.443,5 5	1.611,4 7	6.772,4 4	9.316,0 5	9.634,5 7
Konsumsi Ikan/Kapita (kg/kapita)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu, & Dinas Kelautan dan Perikanan

Proporsi PDRB Subsektor perikanan pada tahun 2020 sebesar 0,55 persen menurun pada tahun 2023 menjadi 0,48 persen. Hal ini menandakan bahwa semakin menurunnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Labuhanbatu. Produksi ikan di Kabupaten Labuhanbatu cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 4.443,55 ton meningkat menjadi sebanyak 9.634,57 ton pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya produksi perikanan yang dihasilkan oleh nelayan di Kabupaten Labuhanbatu. Peningkatan produksi komoditas baik pertanian, mau pun perikanan harus dimanfaatkan dengan baik oleh Kabupaten Labuhanbatu karena komoditas tersebut merupakan sumber pangan masyarakat dan dapat diolah menjadi produk yang bernilai tambah untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

C Pertanian

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah pondasi penting

bagi ketahanan pangan dan ekonomi suatu wilayah karena menyediakan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer bagi kehidupan manusia. Sektor pertanian dan perkebunan tidak hanya menyediakan makanan dan bahan mentah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mendukung perekonomian pedesaan dan memelihara lingkungan alam. Selain potensi pertanian dan kehutanan di Kabupaten Labuhanbatu juga memiliki potensi di subsektor kelautan dan perikanan bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pendapatan, dan pemenuhan kebutuhan makanan masyarakat. Capaian kinerja urusan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Petani (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	24,43	25,86	26,99	27,96	29,48
Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Rp juta/kapita)	95,45	121,51	135,90	150,39	165,43
Produksi Padi (ton)	60.930	72.553	94.098	103.489	N/A
Produksi Beras (ton)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Konsumsi Beras/Kapita (kg/kapita)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS (diolah, 2024 & Dinas Pertanian

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2020 sebesar 24,43 persen menjadi 29,48 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya potensi yang ada di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga dapat memberikan peningkatan kontribusi pada PDRB di Kabupaten Labuhanbatu setiap tahunnya. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2020 sebesar Rp 95,45 juta

per kapita menjadi sebesar Rp 165,43 juta per kapita pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara garis besar output yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun ke tahun. Produksi padi di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2020 sebanyak 60.930 ton meningkat menjadi sebanyak 103.488,70 ton pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya produksi padi didukung dengan peningkatan lahan di Kabupaten Labuhanbatu.

D Perdagangan

Perdagangan adalah suatu aktivitas menghasilkan ekonomi yang berdaya saing berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan kapasitas pasar dan perdagangan dengan mengarahkan perhatian pada peningkatan kontribusi di sektor perdagangan. Perdagangan dalam hal ini diharapkan bukan hanya beraktivitas di ruang lingkup daerah atau daerah sekitar namun juga mencapai aktivitas ekspor ke luar negeri. Capaian kinerja urusan Perdagangan tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	N/A	N/A	N/A	75	N/A

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok pada tahun 2023 sebesar 75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 barang kebutuhan pokok relatif stabil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terus melakukan pengawasan terkait ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok di daerah. Hal

ini dilakukan untuk menjaga kestabilan harga sehingga setiap masyarakat dapat membeli dan mengonsumsinya secara merata.

E Perindustrian

Industri merupakan sektor ekonomi yang bergerak di bidang pengolahan barang dari bahan mentah menjadi barang jadi. Sektor ini berperan penting bagi kemajuan suatu daerah. Namun, untuk meningkatkan peran sektor industri pengolahan maka diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang mumpuni untuk mendukung pengembangan industri, serta tenaga kerja yang terampil di bidang pengolahan.

Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Jumlah IKM (%)	N/A	N/A	N/A	0,98	N/A

Sumber: BPS & Dinas Perdagangan dan perindustrian

Saat ini aktivitas perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu masih bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung serta ketersediaan tenaga kerja yang trampil menjadi hambatan bagi sektor industri pengolahan.

2.4.7 Penunjang Pemerintah

Urusan penunjang pemerintah adalah aspek-aspek atau fungsi-fungsi administratif dan operasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi-fungsi ini tidak langsung berhubungan dengan pelayanan publik yang bersifat esensial, tetapi sangat penting untuk memastikan bahwa semua proses dalam penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efisien dan efektif.

A Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah proses yang melibatkan

perumusan rencana strategis untuk pengembangan suatu wilayah atau negara. Urusan ini meliputi identifikasi kebutuhan, menetapkan tujuan, mengalokasikan sumber daya, dan menentukan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan pembangunan. Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:

Tabel 2.54 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda

Berdasarkan tabel tersebut, dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Labuhanbatu, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW sudah lengkap. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terus melakukan tanggungjawab dan tugasnya dalam hal perencanaan agar pelaksanaan pembangunan berjalan secara terstruktur sehingga mampu mempercepat pembangunan daerah yang inklusif.

B Keuangan

Keuangan daerah merujuk kepada segala hal yang terkait dengan pengolahan keuangan di tingkat pemerintahan daerah yang mencakup pendapatan, pengeluaran, investasi dan perencanaan keuangan untuk pembiayaan berbagi program dan pelayanan publik di tingkat lokal. Capaian kinerja urusan Keuangan Daerah tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.55 Capaian Kinerja Urusan Keuangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
RoA BUMD (%)	N/A	-6,12	-3,05	N/A	N/A
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (Level)	N/A	WDP	WTP	WTP	N/A

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (diolah 2024)

RoA BUMD pada tahun 2021 hingga tahun 2022 bernilai negatif. Dalam hal ini, BUMD yang dimiliki oleh Kabupaten Labuhanbatu hanya satu badan usaha, yaitu Pudam Tirta Bina. Nilai RoA negatif tersebut mengindikasikan bahwa BUMD Kabupaten Labuhanbatu belum bisa menghasilkan keuntungan bersih hingga tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa kurang optimalnya pemanfaatan aset yang dimiliki oleh BUMD dalam menghasilkan laba bersih. Opini BPK terhadap keuangan merupakan pendapat dari BPK tentang keuangan yang digunakan atas dasar pengeluaran Kabupaten Labuhanbatu. Hasil evaluasi sejak tahun 2022-2023 menunjukkan nilai WTP, hal ini harus dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

C Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan

Kepegawaian merupakan aspek penting bagi penyelenggaraan pemerintah. Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan Sumber Daya Manusi yang berkualitas untuk dapat bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Capaian indikator Urusan Kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

Tabel 2.56 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal merupakan ASN yang melanjutkan ataupun mengikuti pelatihan formal. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural merupakan para pejabat ASN yang melanjutkan pendidikan ataupun mengikuti pelatihan struktural semasa menjabat.

D Pengawasan

Pengawasan adalah proses memantau, mengevaluasi, dan memastikan bahwa kegiatan atau operasi berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan yang telah ditetapkan. Capaian kinerja pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks MCP KPK (Poin)	N/A	N/A	N/A	74,56	N/A
Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Inspektorat

Indeks MCP KPK pada tahun 2023 mencapai 74,56 poin. MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Persentase tindak lanjut temuan merupakan hasil temuan yang dilakukan oleh pengawas yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Persentase pelanggaran pegawai merupakan persentase banyaknya pegawai yang melanggar norma ataupun aturan-aturan yang berlaku.

E Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah. Dalam hal ini sekretariat daerah berkaitan dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian kinerja Urusan Sekretariat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.58 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi SAKIP (Poin)	N/A	CC	CC	CC	B

Sumber: Sekretariat Daerah

Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Labuhanbatu meningkat dari CC pada tahun 2021 menjadi B pada tahun 2024. SAKIP adalah sistem integrasi dari proses perencanaan, penganggaran hingga pelaporan kinerja instansi pemerintah, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu semakin mampu menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat (outcome) bagi masyarakat.

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi hasil RKPD bertujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional. Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala

Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah setiap triwulan berdasarkan realisasi DPA Perangkat Daerah. Pada tabel berikut diuraikan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan.

Tabel 2.59 Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

NO	Nama perangkat Daerah	Target Capaian Kinerja (%)	Realisasi Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1.	Dinas Pendidikan	100	24,25	Sangat Rendah
2.	Dinas Kesehatan	100	21,43	Sangat Rendah
3.	RSUD	100	27,72	Sangat Rendah
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	2,00	Sangat Rendah
5.	Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman	100	6,00	Sangat Rendah
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	100	18,00	Sangat Rendah
7.	Dinas Sosial	100	14,00	Sangat Rendah
8.	Dinas Tenaga Kerja	100	20,87	Sangat Rendah
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	3,00	Sangat Rendah
10.	Dinas Pangan	100	4,00	Sangat Rendah
11.	Dinas Pertanahan	100	8,00	Sangat Rendah
12.	Dinas Lingkungan Hidup	100	21,00	Sangat Rendah
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	31,00	Sangat Rendah
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100	12,14	Sangat Rendah
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	2,50	Sangat Rendah
16.	Dinas Perhubungan	100	12,00	Sangat Rendah
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	100	13,40	Sangat Rendah
18.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil	100	0,00	Sangat

NO	Nama perangkat Daerah	Target Capaian Kinerja (%)	Realisasi Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja
	dan Menengah			Rendah
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100	17,30	Sangat Rendah
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Budaya dan Pariwisata	100	9,88	Sangat Rendah
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	27,55	Sangat Rendah
22.	Dinas Kelautan dan Perikanan	100	9,30	Sangat Rendah
23.	Dinas Peternakan	100	6,20	Sangat Rendah
24.	Dinas Pertanian	100	6,23	Sangat Rendah
25.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	100	14,00	Sangat Rendah
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	13,68	Sangat Rendah
27.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	6,38	Sangat Rendah
28.	Badan Pendapatan Daerah	100	22,93	Sangat Rendah
29.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	100	13,33	Sangat Rendah
30.	Badan Penelitian dan Pengembangan	100	17,30	Sangat Rendah
31.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	13,00	Sangat Rendah
32.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	9,75	Sangat Rendah
33.	Inspektorat	100	13,00	Sangat Rendah
34.	Sekretariat Daerah	100	8,00	Sangat Rendah
35.	Sekretariat DPRD	100	9,00	Sangat Rendah
36.	Kecamatan Bilah Hulu	100	22,00	Sangat Rendah
37.	Kecamatan Bilah Barat	100	16,00	Sangat Rendah
38.	Kecamatan Bilah Hilir	100	19,00	Sangat Rendah
39.	Kecamatan Pangkalan	100	4,00	Sangat Rendah
40.	Kecamatan Panai Hulu	100	18,76	Sangat Rendah
41.	Kecamatan Panai Tengah	100	19,00	Sangat Rendah

NO	Nama perangkat Daerah	Target Capaian Kinerja (%)	Realisasi Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja
42.	Kecamatan Panai Hilir	100	19,00	Sangat Rendah
43.	Kecamatan Rantau Utara	100	20,00	Sangat Rendah
44.	Kecamatan Rantau Selatan	100	21,00	Sangat Rendah
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA RKPD TRIWULAN II		100	100	Sangat Rendah

Berdasarkan target Capaian Kinerja dan realisasi capaian kinerja Program RKPD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II Kabupaten Labuhanbatu.

Tabel 2.60 Rekapitulasi Rata-Rata Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Labuhanbatu

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN REALISASI (%)	SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA	FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA
1	Dinas Pendidikan	20	Sangat Rendah	-	Sebagian besar pelaksanaan kegiatan direncanakan akan dilaksanakan di Triwulan III dan IV
2	Dinas Kesehatan	23,00	Sangat Rendah	Mulai meningkatnya pengetahuan dan kemauan masyarakat untuk hidup sehat, Aktifnya pelayanan di Posyandu, Serta kunjungan ibu dan balita cukup tinggi ke Posyandu	Lamanya penetapan tim teknis pengadaan barang dan jasa TA 2024, Terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dapat terlaksana pada triwulan I TA 2024, Pelaporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi kinerja keuangan bidang dan puskesmas yang terlambat dan tidak tepat waktu, Pelaporan data kinerja yang belum optimal dan tidak tepat waktu baik dari bidang maupun puskesmas serta pelaporan data layanan dari faskes swasta masih sangat rendah, Adanya Permasalahan pada Aplikasi SIPD yang belum dapat menerbitkan SPJ

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN REALISASI (%)	SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA	FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA
					Fungisoanl sehingga memperlambat penyusunan laporan realiasi keuangan TA 2024
3	RSUD	17	Sangat Rendah	-	Sebagian besar pelaksanaan kegiatan direncanakan akan dilaksanakan di Triwulan III dan IV
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13	Sangat Rendah	Perencanaan yang baik yang selaras dengan pelaksanaan kegiatan	kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15	Sangat Rendah	Sinergitas yang baik antar pengelola kegiatan pada dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Sebagian besar pelaksanaan kegiatan direncanakan akan dilaksanakan di Triwulan III dan IV
6	Satuan Polisi Pamong Praja	8	Sangat Rendah		kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39	Sangat Rendah		Sebagian besar pelaksanaan kegiatan direncanakan akan dilaksanakan di Triwulan III dan IV
8	Dinas Sosial	16	Sangat Rendah		Sebagian besar pelaksanaan kegiatan direncanakan akan dilaksanakan di Triwulan III dan IV
9	Dinas Tenaga Kerja	18,42	Sangat Rendah	Perencanaan yang baik yang selaras dengan pelaksanaan kegiatan	Kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43	Sangat Rendah	Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan yang telah di susun dan direncanakan	Sebagian besar pelaksanaan kegiatan direncanakan akan dilaksanakan di Triwulan III dan IV

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN REALISASI (%)	SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA	FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA
11	Dinas Pangan	15	Sangat Rendah	kerja sama tim, inisiatif dan kreatif	tidak aktif bekerja, kurang inisiatif
12	Dinas Pertanahan	3,96	Sangat Rendah		Kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
13	Dinas Lingkungan Hidup	3	Sangat Rendah	Koordinasi yang intensif antara unsur eksekutif dan legislatif perlu ditingkatkan agar perencanaan program dan kegiatan Tahun 2024 dapat berjalan lancar	Terjadinya Refocusing Anggaran di Tahun berjalan sehingga beberapa kegiatan DLH terhambat dan kurang maksimal
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17,85	Sangat Rendah	Perencanaan yang baik yang selaras dengan pelaksanaan kegiatan	Kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16,031	Sangat Rendah		Kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19,27	Sangat Rendah		Sebagian besar pelaksanaan kegiatan direncanakan akan dilaksanakan di Triwulan III dan IV
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	28	Sangat Rendah		Kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
17	Dinas Perhubungan	40	Sangat Rendah	Kualitas SDM yang mumpuni	Ada beberapa kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang masih dalam proses perhitungan HPS
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	33	Sangat Rendah	terlaksananya koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholder	belum dilaksanakannya kegiatan yang ada pada program tersebut sesuai dengan perencanaan dikarenakan pengurangan anggaran

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN REALISASI (%)	SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA	FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	Sangat Rendah	Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai Tupoksi	Pelaksanaan Kegiatan belum sesuai dengan jadwal Anggaran Kas
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	30	Sangat Rendah		Sebagian besar pelaksanaan kegiatan direncanakan akan dilaksanakan di Triwulan III dan IV
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6,10	Sangat Rendah	Perencanaan yang baik yang selaras dengan pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan belum sesuai dengan jadwal Anggaran Kas
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	24	Sangat Rendah		Sebagian besar pelaksanaan kegiatan direncanakan akan dilaksanakan di Triwulan III dan IV
24	Dinas Pertanian	35,00	Sangat Rendah	Perencanaan yang baik yang selaras dengan pelaksanaan kegiatan	Kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
25	Dinas Peternakan	23	Sangat Rendah	1. Dukungan SDM, sarana prasarana, dan anggaran 2. Perlunya sikap inisiatif, kreatif dan kerja sama tim, 3. Koordinasi dan Evaluasi kinerja yang berkala sehingga menjadi analisis interpretasi untuk perubahan dan perbaikan kedepannya.	Pengaruh besar yang menghambat percepatan kinerja, 1.karena ada perubahan anggaran, 2. Terlambatnya CPCL (Calon Penerima dan Calon Lokasi) ternak sehingga kegiatan yang sifatnya penyerahan bantuan kepada masyarakat sering terjadi di akhir tahun.
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	30	Sangat Rendah		Sebagian besar pelaksanaan kegiatan direncanakan akan dilaksanakan di Triwulan III dan IV
27	Sekretariat Daerah Kabupaten	50	Sangat Rendah		Sebagian besar pelaksanaan kegiatan direncanakan akan dilaksanakan di Triwulan III dan IV

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN REALISASI (%)	SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA	FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA
28	Sekretariat DPRD	44	Sangat Rendah	Anggaran yang mencukupi, SDM yang handal dan penjadwalan serta koordinasi antar masing-masing bagian yang bagus	Kurang memaksimalkan teknologi sebagai alat bantu
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24,19	Sangat Rendah	Perencanaan yang baik yang selaras dengan pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan belum sesuai dengan jadwal Anggaran Kas
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	50,08	Sangat Rendah	Pelaksanaan Kegiatan yang sesuai dengan Perencanaan	Pelaksanaan Kegiatan belum sesuai dengan jadwal Anggaran Kas
31	Badan Pendapatan Daerah	43	Sangat Rendah	Pelaksanaan Kegiatan yang sesuai dengan Perencanaan	Pelaksanaan Kegiatan belum sesuai dengan jadwal Anggaran Kas
32	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	10,18	Sangat Rendah	Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai Tupoksi BKPP	Pelaksanaan Kegiatan belum sesuai dengan jadwal Anggaran Kas
33	Badan Penelitian dan Pengembangan	15	Sangat Rendah	Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai Tupoksi	Pencapaian Target kinerja
34	Inspektorat Daerah	19	Sangat Rendah		Pelaksanaan Kegiatan belum sesuai dengan jadwal Anggaran Kas
35	Kecamatan Bilah Hulu	67	Sedang	Pelaksanaan Kegiatan yang sesuai dengan Perencanaan	Pelaksanaan Kegiatan belum sesuai dengan jadwal Anggaran Kas
36	Kecamatan Pangkatan	23	Sangat Rendah		Kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
37	Kecamatan Bilah Barat	20	Sangat Rendah		Kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
38	Kecamatan Bilah Hilir	52,83	Rendah	Adanya kerjasama yang baik	Kurang Memahami Materi

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN REALISASI (%)	SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA	FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA
39	Kecamatan Panai Hulu	45,12	Sangat Rendah	Pelaksanaan Kegiatan yang sesuai dengan Perencanaan	Pelaksanaan Kegiatan belum sesuai dengan jadwal Anggaran Kas
40	Kecamatan Panai Tengah	27	Sangat Rendah	Adanya kerjasama yang baik	Keterlambatan memberikan laporan fungsional
41	Kecamatan Panai Hilir	32	Sangat Rendah		Kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
42	Kecamatan Rantau Selatan	35,00	Sangat Rendah		Kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
43	Kecamatan Rantau Utara	25	Sangat Rendah	Adanya kerjasama yang baik	Keterlambatan memberikan laporan fungsional
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30	Sangat Rendah	-	Kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
	TOTAL RATA- RATA CAPAIAN KINERJA	26,22	Sangat Rendah		

Berdasarkan data diatas, bahwa rata – rata capaian kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Labuhanbatu 26,22% (Sangat Rendah).

2.5.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Makro Daerah

Permasalahan Pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara hal yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman

yang tidak diantisipasi. Uraian permasalahan terbagi atas uraian permasalahan makro daerah dan uraian permasalahan per urusan pembangunan. Gambaran capaian indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2021-2026 dibandingkan dengan capaian pada tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Nasional disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.61 Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan
Indonesia Tahun 2021-2026**

Indikator	Satuan	Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi	%	Labuhanbatu	3,85	4,80	4,79	5,06	Belum Rilis
		Sumatera Utara	-1,07	2,61	4,73	5,03	Belum Rilis
		Nasional	3,69	5,30	5,05	5,03	Belum Rilis
Laju Inflasi	%	Labuhanbatu	1,54	2,78	2,12	6,16	2,97
		Sumatera Utara	2,33	1,96	1,71	6,12	2,25
		Nasional	2,72	1,68	1,30	5,51	2,61
Kemiskinan	Jumlah (ribu orang)	Labuhanbatu	45,03	43,27	42,58	66,42	Belum Rilis
	%		8,74	8,26	7,99	7,84	Belum Rilis
	Jumlah (ribu orang)	Sumatera Utara	1.273,03	1.268,19	1.240		Belum rilis
	%		1.273,03	1.268,19	1.240	7,99	Belum Rilis
	Jumlah (juta orang)	Nasional	26,50	26,36	25,90		Belum rilis
	%		9,71	9,57	9,39	9,03	Belum Rilis
Pengangguran	Jumlah (orang)	Labuhanbatu	12.883	16.475	14.443		Belum Rilis
	TPT (%)		5,66	6,90	5,99	5,90	Belum Rilis
	Jumlah (orang)	Sumatera Utara	475.156	472.496	472.000		Belum Rilis
	TPT (%)		6,33	6,16	5,89	5,60	Belum Rilis
	Jumlah (juta)	Nasional	8,40	8,42	7,38		Belum Rilis

Indikator	Satuan	Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025
	orang)						
	TPT (%)		6,49	5,90	5,32	4,91	Belum Rilis
Rasio Gini		Labuhanbatu	0,256	0,278	0,244	0,251	Belum Rilis
		Sumatera Utara	0,315	0,312	0,309	0,297	Belum Rilis
		Nasional	0,381	0,381	0,388	0,379	Belum Rilis
IPM		Labuhanbatu	72,09	72,92	74,70	75,20	Belum Rilis
		Sumatera Utara	72,00	72,71	72,71	75,76	Belum Rilis

2.6 Rekapitulasi Rata - Rata Capaian Kinerja Program dan Keuangan Standar Pelayanan Minimal Triwulan 1 2025

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berikut hasil evaluasi Standar Pelayanan Minimal untuk triwulan pertama tahun 2025.

1. Capaian SPM bidang Kesehatan
2. Capaian SPM bidang Pendidikan
3. Capaian SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Capaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Capaian SPM bidang Sosial
6. Capaian SPM bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. SPM bidang Kesehatan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		BELUM TUNTAS			33.71%	
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					31.71%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	17.88%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Orang	10514	2350	8164	22.35%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	13.83%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					69.16%	
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	8411	350	8061	4.16%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	423	423	0	100.00%	
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	235	235	0	100.00%	
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	235	235	0	100.00%	
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	235	235	0	100.00%	
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	353	353	0	100.00%	
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	2.35	2.35	0	100.00%	
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10514	235	10279	2.24%	
	9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10514	235	10279	2.24%	
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	15	15	0	100.00%	
	11 . Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	701	157	544	22.40%	
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	239	125	114	52.30%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	(angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)						
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	522	522	0	100.00%	
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	549	549	0	100.00%	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	82	82	0	100.00%	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	20	14	6	70.00%	
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	10514	2350	8164	22.35%	
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					28.61%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	17.56%	
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Orang	10435	2291	8144	21.95%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	11.04%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					55.22%	
	1 . Formulir partograf	Formulir	10435	20	10415	0.19%	
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10435	2291	8144	21.95%	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10435	2350	8085	22.52%	
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	15	15	0	100.00%	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	239	125	114	52.30%	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	522	522	0	100.00%	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	549	549	0	100.00%	
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	82	82	0	100.00%	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	0	0	0	0.00%	
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					30.87%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	18.24%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Orang	10024	2285	7739	22.80%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	12.63%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					63.17%	
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	10024	712	9312	7.10%	
	2 . Vitamin K1 Injeksi	Ampul	10024	2285	7739	22.80%	
	3 . Salep/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)	Orang	10024	2285	7739	22.80%	
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	10024	2285	7739	22.80%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) (sesuai standar 12-59 bulan)	Formulir	10024	2285	7739	22.80%	
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	522	2285	-1763	100.00%	
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Paket	549	2285	-1736	100.00%	
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	223	125	98	56.05%	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	522	522	0	100.00%	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	549	549	0	100.00%	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	82	82	0	100.00%	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	15	9	6	60.00%	
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	20	14	6	70.00%	
	14 . Kader Kesehatan	Orang	2595	2595	0	100.00%	
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita					23.82%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	13.79%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP :	Orang	37101	6396	30705	17.24%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	PELAYANAN KESEHATAN BALITA						
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	10.03%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					50.14%	
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	37101	6396	30705	17.24%	
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	37101	6396	30705	17.24%	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	37101	6396	30705	17.24%	
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	4976	4114	862	82.68%	
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	37101	44919	-7818	100.00%	
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	9951	894	9057	8.98%	
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	9951	923	9028	9.28%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	9951	955	8996	9.60%	
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	9951	1110	8841	11.15%	
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	9951	1133	8818	11.39%	
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	9884	1187	8697	12.01%	
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	9884	1191	8693	12.05%	
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	37101	6396	30705	17.24%	
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	15	15	0	100.00%	
	15 . Formula terapi gizi buruk	Paket	15	15	0	100.00%	
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	211	120	91	56.87%	
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	522	522	0	100.00%	
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	549	549	0	100.00%	
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	20	14	6	70.00%	
	20 . Guru PAUD	Orang	875	875	0	100.00%	
	21 . Kader kesehatan	Orang	2805	2805	0	100.00%	
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					25.13%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	16.07%	
			Jumlah Yang Harus	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
			Dilayani				
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Orang	91138	18311	72827	20.09%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	9.06%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					45.28%	
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	8495	50794	-42299	100.00%	
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	1504	1504	0	100.00%	
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	84905	84905	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	1504	1504	0	100.00%	
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	123	123	0	100.00%	
	6 . Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	30753	1599156	-1568403	100.00%	
	7 . Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	59	59	0	100.00%	
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	30753	30753	0	100.00%	
	9 . Media promosi kesehatan	Paket	123	7	116	5.69%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	(Media khusus remaja sehat)						
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	10102	944	9158	9.34%	
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	0	0	0	0.00%	
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	0	0	0	0.00%	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	0	0	0	0.00%	
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	0	0	0	0.00%	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	0	0	0	0.00%	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	0	0	0	0.00%	
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	0	0	0	0.00%	
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	0	0	0	0.00%	
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					24.82%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	8.07%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Orang	341093	34394	306699	10.08%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	16.75%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					83.76%	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	113	30	83	26.55%	
	2 . Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	113	113	0	100.00%	
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	113	113	0	100.00%	
	4 . Alat : Glukometer	Unit	113	113	0	100.00%	
	5 . Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	20	20	0	100.00%	
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	339124	112500	226624	33.17%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	15	15	0	100.00%	
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	44	44	0	100.00%	
	9 . Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	15	15	0	100.00%	
	10 . Kuesioner PUMA	Dokumen	15	15	0	100.00%	
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	42	42	0	100.00%	
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	15	15	0	100.00%	
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	25	25	0	100.00%	
	c. Vasektomi set	Unit	2	2	0	100.00%	
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	15	15	0	100.00%	
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	341093	16359	324734	4.80%	
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	211	120	91	56.87%	
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	522	522	0	100.00%	
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	549	549	0	100.00%	
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	20	14	6	70.00%	
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	108	108	0	100.00%	
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2805	2805	0	100.00%	
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					38.97%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	20.10%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Orang	43521	10934	32587	25.12%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	18.87%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					94.37%	
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkaran perut, lingkaran lengan atas, dan tensimeter	Paket	15	15	0	100.00%	
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	15	15	0	100.00%	
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	50	50	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	6367	6367	0	100.00%	
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	1	1	0	100.00%	
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	15	15	0	100.00%	
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	5500	5500	0	100.00%	
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	211	120	91	56.87%	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	522	874	-352	100.00%	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	549	667	-118	100.00%	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	20	14	6	70.00%	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	108	108	0	100.00%	
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2805	2805	0	100.00%	
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					16.60%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	3.51%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Orang	126923	5572	121351	4.39%	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)							
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					65.45%	
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	107783	1100	106683	1.02%	
	2 . Obat Hipertensi	Paket	107783	60132	47651	55.79%	
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	113	46	67	40.71%	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	15	15	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	107783	1100	106683	1.02%	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	211	120	91	56.87%	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	522	522	0	100.00%	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	549	549	0	100.00%	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	20	14	6	70.00%	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	15	9	6	60.00%	
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	82	82	0	100.00%	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	108	108	0	100.00%	
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					27.80%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	10.26%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Orang	9038	1159	7879	12.82%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	17.54%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi			
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					87.72%		
	1 . Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Paket	6137	6137	0	100.00%		
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	58	29	29	50.00%		
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	73664	57150	16514	77.58%		
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	15	15	0	100.00%		
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	15	15	0	100.00%		
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	211	120	91	56.87%		
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	522	522	0	100.00%		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	549	549	0	100.00%	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	82	82	0	100.00%	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	108	108	0	100.00%	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	20	14	6	70.00%	
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	54	53	1	98.15%	
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					29.32%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	18.41%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	Orang	717	165	552	23.01%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	10.91%	
			Jumlah Mutu	Jumlah Mutu	Mutu Yang		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
			Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Yang Terlayani / Terpenuhi	Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					54.57%	
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku	15	3	12	20.00%	
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket	15	15	0	100.00%	
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	15	15	0	100.00%	
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	15	15	0	100.00%	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	15	15	0	100.00%	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	211	122	89	57.82%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	15	2	13	13.33%	
	8 . Tenaga profesional lainnya	Orang	14	0	14	0.00%	
	9 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	15	0	15	0.00%	
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					26.91%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	6.91%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Orang	12458	1076	11382	8.64%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
			Dipenuhi				
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1500	1500	0	100.00%	
	2 . Reagen Zn TB	Kit	1500	1500	0	100.00%	
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	1500	1500	0	100.00%	
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	1500	1500	0	100.00%	
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Tes	200	200	0	100.00%	
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	1500	1500	0	100.00%	
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1500	1500	0	100.00%	
	8 . Tuberkulin	Vial	1500	1500	0	100.00%	
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	15	15	0	100.00%	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	15	15	0	100.00%	
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	15	15	0	100.00%	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	15	15	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	15	15	0	100.00%	
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	6	6	0	100.00%	
	15 . Kader Kesehatan	Orang	15	15	0	100.00%	
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					99.90%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)	Orang	19.494	4087	-4067.506	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.90%	
			Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
			Dilayani / Dipenuhi	/ Terpenuhi	/ Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					99.50%	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	19494	18515	979	94.98%	
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	19494	19494	0	100.00%	
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	19494	19494	0	100.00%	
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	19494	19494	0	100.00%	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	19	19	0	100.00%	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	19	19	0	100.00%	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	19	19	0	100.00%	
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	19	19	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	19	19	0	100.00%	
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	19	19	0	100.00%	

2. Capaian S bidang Pendidikan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		BELUM TUNTAS			54.26%	
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini					46.62%	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	65	35	65.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	40.92%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	18387	8983	51.14%		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	5.70%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					28.50%	
	1 .Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	276	50	226	18.12%	
	2 .Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	1003	390	613	38.88%	
2 .	Pendidikan Dasar					97.96%	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	98	2	98.00%	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	98	2	98.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	48910	0	100.00%		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	17.96%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					89.80%	
	SD (2025)					94.10%	
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	70	64.69	5.31	92.41%	
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	70	64.76	5.24	92.51%	
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	80	74.26	5.74	92.83%	
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	75	71.46	3.54	95.28%	
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60	58.49	1.51	97.48%	
	SMP (2025)					85.50%	
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	70	61	9	87.14%	
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	70	59	11	84.29%	
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	75	66	9	88.00%	
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	80	68	12	85.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	65	54	11	83.08%	
3 .	Pendidikan Kesenjangan					18.20%	
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N		
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	45	55	45.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	2.60%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	123536	119525	3.25%		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	15.60%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					78.00%	
	1 .Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	100	78	22	78.00%	

3. Capaian SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		BELUM TUNTAS			0.00%	
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					0.00%	
	Bencana Meliputi : a) Letusan gunung berapi; b) Gempa bumi; c) Tanah longsor; d) Gelombang pasang; e) Banjir bandang; dan/atau f) Bencana lainnya.						
	Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifikasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	0.00%	
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	0.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	0.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					0.00%	
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	0.00%	
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	0.00%	
	3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	0.00%	
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	0.00%	
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0.00%	
	Relokasi Program Pemerintah Meliputi : a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)						

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifikasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	0.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	0.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	0.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					0.00%	
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Unit Rumah	0	0	0	0.00%	
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;	Unit Rumah	0	0	0	0.00%	
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Orang	0	0	0	0.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah	0	0	0	0.00%	
	2 . Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah	0	0	0	0.00%	

4. Capaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					0.00%	
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					0.00%	
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih		
	PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	0	0	0	0.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	0.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	0.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	0.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					0.00%	
	JARINGAN PERPIPAAN					0.00%	
Kuantitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0	0	0	0.00%	
Kualitas SPAM							

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	0	0	0	0.00%	
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					0.00%	
Kuantitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0	0	0	0.00%	
Kualitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	0	0	0	0.00%	
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					0.00%	
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih		
	PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI	Orang	0	0	0	0.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	(REKAPITULASI)						
	*tidak masuk dalam hitungan						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	0.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	0.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				-20%	0.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					0.00%	
	KUANTITAS SPALD					0.00%	
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	0	0	0	0.00%	
	KUALITAS SPALD					0.00%	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)							

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0	0.00%	
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua							
	1 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0	0.00%	
	2 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	0	0	0	0.00%	

5. Capaian SPM bidang Sosial

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		BELUM TUNTAS			23.67%	
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					0.91%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	0.60%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	265	2	263	0.75%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	0.31%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					1.54%	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	265	0	265	0.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	10	0	10	0.00%	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	10	1	9	10.00%	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	10	0	10	0.00%	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	54	0	54	0.00%	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	0	0	0.00%	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	0	0	0	0.00%	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	10	0	10	0.00%	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	0	10	0.00%	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	0	10	0.00%	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	0	0	0.00%	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	0	10	0.00%	
	13 . Layanan rujukan	Orang	10	1	9	10.00%	
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					0.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	0.00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	26	0	26	0.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	0.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					0.00%	
	1 . Layanan data dan pengaduan	orang	26	0	26	0.00%	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	10	0	10	0.00%	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	10	0	10	0.00%	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	10	0	10	0.00%	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	0	0	0	0.00%	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	0	0	0	0.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	10	0	10	0.00%	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	0	10	0.00%	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	0	10	0.00%	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	0	10	0.00%	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	0	10	0.00%	
	12 . Layanan rujukan	Orang	10	0	10	0.00%	
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					33.42%	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)							
					-80%	32.79%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	488	200	288	40.98%	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)							
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
			Dipenuhi				
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					3.15%	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	488	200	288	40.98%	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	10	0	10	0.00%	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	10	0	10	0.00%	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	10	0	10	0.00%	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	10	0	10	0.00%	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	0	0	0.00%	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	0	0	0	0.00%	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	10	0	10	0.00%	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	0	10	0.00%	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	0	10	0.00%	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	0	10	0.00%	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	0	10	0.00%	
	13 . Layanan rujukan	Orang	10	0	10	0.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					0.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	0.00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	2	0	2	0.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	0.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					0.00%	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	2	0	2	0.00%	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	10	0	10	0.00%	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	10	0	10	0.00%	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	10	0	10	0.00%	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	0	0	0.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	0	0	0	0.00%	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	10	0	10	0.00%	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	10	0	10	0.00%	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	0	10	0.00%	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	10	0	10	0.00%	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	0	10	0.00%	
	12 . Layanan rujukan	Orang	10	0	10	0.00%	
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					84.00%	
Ya Terjadi Bencana							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)) :	Orang	16	16	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	4.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					20.00%	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	16	16	0	100.00%	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0.00%	
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	0	0	0	0.00%	
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0	0.00%	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0	0.00%	

5. Capaian SPM bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						87.92%	
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota					87.92%	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						-80%	80.00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	200	200	0	100.00%	
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)						-20%	7.92%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					39.62%	
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	unit	10	7	3	70.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)						
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	dokumen	8	8	0	100.00%	
	Data Dukung : 1210-20250416100904SOP SATPOL.pdf Status : Approved Catatan : Maximal 10 Mb Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.						
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	orang	251	170	81	67.73%	
	4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan	dokumen	0	0	0	0.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	kerugian material						
	Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload Catatan : Maximal 10 Mb Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.						
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	orang	0	0	0	0.00%	
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	orang	0	0	0	0.00%	
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					0.89%	
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana					0.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	0.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	0.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	0.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang Terlayani /	Mutu Yang Belum Terlayani		

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
			Dilayani / Dipenuhi	Terpenuhi	/ Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					0.00%	
	1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0	0	0.00%	
	2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0	0	0.00%	
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					0.00%	
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	0	0	0	0.00%	
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	0	0	0	0.00%	
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00%	
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00%	
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					0.00%	
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	0	0	0	0.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	0.00%	
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0	0.00%	
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00%	
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00%	
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					0.00%	
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	0.00%	
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	0.00%	
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00%	
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00%	
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00%	
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					0.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	0.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	0.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	0.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					0.00%	
	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	0	0.00%	
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0	0	0.00%	
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	0	0.00%	
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	0	0	0	0.00%	
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00%	
	3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0	0	0.00%	
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					0.00%	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00%	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00%	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	0.00%	
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00%	
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00%	
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00%	
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					0.00%	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00%	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00%	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	0	0.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00%	
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00%	
	4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	0.00%	
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					0.00%	
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	0	0.00%	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00%	
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00%	
	2) . Gladi Lapangan *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					0.00%	
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	0	0.00%	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00%	
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	0.00%	
	1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					0.00%	
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	0	0	0	0.00%	
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	0	0	0	0.00%	
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00%	
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00%	
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					0.00%	
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0	0.00%	
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0	0.00%	
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	0	0	0	0.00%	
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0	0.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0	0.00%	
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					0.00%	
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00%	
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00%	
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					0.00%	
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00%	
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00%	
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	0.00%	
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00%	
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00%	
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	0	0.00%	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					2.67%	
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	2.67%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	30	1	29	3.33%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	0.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					0.00%	
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						88.13%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					88.13%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	200	200	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)					-20%	8.13%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					40.67%	
	1 . Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	50	6	44	12.00%	
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	1	1	0	100.00%	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	Data Dukung : 1210-20250416101348SOP DAMKAR.pdf Status : Approved Catatan : Maximal 10 Mb Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.						
	3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	10	8	2	80.00%	
	4 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	75	3	72	4.00%	
	5 . Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	50	12	38	24.00%	
	6 . Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	50	12	38	24.00%	

Standar Pelayanan Minimal triwulan pertama Tahun 2025 di Kabupaten Labuhanbatu masih dalam kondisi predikat rendah. Hal ini disebabkan pada triwulan pertama perangkat daerah yang menangani SPM sebagian besar masih melaksanakan kegiatan rutin.

BAB III

KERANGKA EKONOMIDAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Kabupaten Labuhanbatu sangat dipengaruhi oleh perekonomian nasional saat ini yang masih dalam kondisi belum normal pasca pemulihan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi nasional dikarenakan beberapa faktor antara lain resesi ekonomi global, pelemahan pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter AS terkait kenaikan suku bunga, turunnya harga minyak dunia, menurunnya harga komoditas ekspor, tingginya ketergantungan bahan baku impor industri manufaktur dan produk konsumsi masyarakat. Selanjutnya dalam upaya mendukung kebijakan ekonomi nasional, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menetapkan arah kebijakan di sektor perekonomian yaitu peningkatan standarisasi perlindungan konsumen, mendorong kemitraan usaha antar pelaku industri pasar modern dan UMKM, meningkatkan nilai investasi, mendorong peningkatan kualitas promosi serta pemasaran produk, mendorong pemetaan dan promosi potensi investasi yang di dukung teknologi digital.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2025

Situasi global sangat mempengaruhi kondisi dan perkembangan perekonomian nasional bahkan sampai kedaerah, sehingga ekonomi makro sangat perlu diperhatikan. Ekonomi makro merupakan variabel yang sangat penting dalam konteks pembangunan secara berkesinambungan. Berbagai unsur yang terkait pada pembentukan nilai-nilai pada kondisi ekonomi makro merupakan salah satu prioritas

yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan perencanaan sampai dengan tahap akhir pelaksanaannya.

Oleh karena itu, kondisi ekonomi makro adalah salah satu indikator penting yang dapat menggambarkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan. Namun dalam konteks perekonomian daerah tidak seluruhnya indikator ekonomi makro dapat diukur dan dijadikan acuan yang tunggal. Proses perencanaan dan evaluasi keberhasilan pembangunan daerah di Kabupaten Labuhanbatu menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Gini Rasio. Setiap tahunnya secara umum Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terus mengalami peningkatan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2024 sebesar 50.801,78 miliar rupiah. Sektor industri pengolahan merupakan kontributor utama dengan peranan mencapai 32,53 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 29,48 persen, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,96 persen. Secara keseluruhan perekonomian Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,06 persen bila dibandingkan pada tahun 2023. Namun PDRB yang besar belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

A Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan yang terjadi di suatu daerah pada periode tertentu. Secara umum PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB Kabupaten Labuhanbatu

dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan yang cukup baik, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 PDRB Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga konstan 2010 Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Tahun	Harga Berlaku (Rp. Miliar)	Harga Konstan 2010 (Rp. Miliar)
2020	34.653,18	23.252,75
2021	37.606,88	24.147,56
2022	41.809,01	25.305,99
2023	45.762,60	26.579,28
2024	50.801,78	27.924,86

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 PDRB Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 terus mengalami peningkatan. Kondisi pertumbuhan PDRB yang positif setiap tahunnya menggambarkan peningkatan aktifitas perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu.

B Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi dapat dilihat melalui kontribusi persektor ekonomi yang merupakan bahagian dari tiga kelompok yaitu Primer, Sekunder dan Tersier. Identifikasi Struktur Ekonomi dibutuhkan untuk pengklasifikasian kontribusi sub sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Labuhanbatu. Oleh karena itu struktur ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu sangat tergantung dari seberapa besar kemampuan sektor-sektor dalam memproduksi barang dan jasa. Tiga kelompok sektor ekonomi dimaksud diatas adalah; Primer yaitu sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalan ; Sekunder yaitu sektor Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih serta Bangunan ; Tersier yaitu Sektor Perdagangan, Hotel Restoran, Pengangkutan dan

Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta jasa-jasa. Ketiga sektor diatas dikelompokkan berdasarkan output maupun input asal terjadinya proses produksi untuk masing-masing produsen.

Disebut sektor primer karena outputnya masih merupakan proses tingkat dasar dan sangat tergantung pada sumber daya alam, sedangkan yang termasuk di dalam sektor ekonomi yang outputnya berasal langsung dari sektor primer dikelompokkan menjadi sektor sekunder, sektor yang berada diluar sektor primer dan sekunder adalah sektor tersier.

Tabel 3.2 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020-2024 (persen)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,43	25,86	26,99	27,96	29,48
2	Pertambangan dan Penggalian	0,65	0,67	0,68	0,68	0,64
3	Industri Pengolahan	34,73	34,70	34,24	33,76	32,53
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
6	Konstruksi	8,60	8,32	8,05	8,17	7,85
7	Pedagang Besar dan Eceran	17,81	17,50	17,59	17,57	17,96
8	Transportasi dan Pergudangan	1,79	1,68	1,70	1,73	1,69
9	Penyediaan Akomodasi makan minum	1,43	1,32	1,31	1,28	1,24
10	Informasi dan Komunikasi	0,70	0,69	0,68	0,65	0,61
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,16	1,12	1,11	1,08	1,03
12	Real Estate	2,81	2,67	2,55	2,38	2,26
13	Jasa Perusahaan	0,18	0,17	0,17	0,17	0,15
14	Administrasi Pemerintahan	3,22	2,98	2,68	2,46	2,47
15	Jasa Pendidikan	1,83	1,71	1,63	1,54	1,53
16	Jasa Kesehatan	0,47	0,43	0,41	0,40	0,39
17	Jasa Lainnya	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
Total PDRB Labuhanbatu		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Labuhanbatu Tahun 2025

Sektor primer, sekunder dan tersier memiliki keterkaitan dalam hubungannya dengan perekonomian suatu daerah. Semakin berkembang perekonomian suatu daerah akan berbanding lurus atau akan diikuti dengan semakin meningkatnya kontribusi sektor sekunder dan primer.

C Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu

Proses kenaikan output per kapita dalam jangka Panjang dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh adanya pertumbuhan seluruh sektor PDRB, karena pertumbuhan ekonomi merupakan rata-rata pertumbuhan seluruh sektor. Pertumbuhan setiap sektor PDRB dan pertumbuhan PDRB Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut. Penghitungan PDRB yang digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi secara riil adalah PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. Namun, PDRB atas dasar harga berlaku tetap disajikan untuk melihat dan menelaah perkembangan PDRB sebelum dan sesudah pengaruh harga diperhitungkan. laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Persen)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	3,20	6,30	7,31	4,70	4,27
2	Pertambangan dan Penggalian	-1,23	8,99	6,04	3,29	4,02
3	Industri Pengolahan	-0,61	3,21	3,31	4,54	2,99
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,35	3,09	5,81	3,60	4,55
5	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	2,21	2,26	5,62	6,75	3,31

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	Konstruksi	-5,72	2,99	0,60	6,21	6,11
7	Perdagangan besar, eceran dan sepeda motor	-1,40	3,28	5,07	6,85	9,03
8	Transportasi dan pergudangan	-2,10	-0,97	8,66	5,70	4,05
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	-3,44	-0,16	7,59	5,47	5,41
10	Informasi dan komunikasi	4,74	4,46	6,87	4,07	4,52
11	Jasa keuangan dan Asuransi	1,73	2,56	3,65	3,89	3,24
12	Real Estate	1,49	0,25	5,21	3,08	6,36
13	Jasa Perusahaan	0,76	-0,62	4,99	3,85	3,66
14	Administrasi Pemerintah, pertahanan dan jaminan Sosial wajib	-0,03	0,39	-0,09	3,89	9,43
15	Jasa Pendidikan	2,96	1,29	3,91	3,42	8,48
16	Jasa kesehatan dan kegiatan social/human	-1,37	-1,30	2,70	4,85	6,23
17	Jasa lainnya	-3,61	3,33	7,04	5,37	6,58
Produk Domestik Regional Bruto		0,09	3,85	4,80	5,03	5,06

Sumber : BPS Kab. Labuhanbatu Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga konstan sebesar 5,06 persen, yang menunjukkan terjadi kenaikan sebesar 0,03 persen dari tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan aktifitas perekonomian labuhanbatu semakin baik. Kenaikan ini sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian secara mikro maupun makro.

D PDRB Perkapita

Rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah digambarkan dengan PDRB Perkapita. Statistik ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran, walaupun ukuran ini belum dapat langsung digunakan sebagai ukuran tingkat pemerataan pendapatan. Adanya peningkatan

perekonomian dengan melambatnya perkembangan pertumbuhan penduduk, akan mengakibatkan terjadinya peningkatan PDRB perkapita. PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi total PDRB atas harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk sebagai hasil dari proses produksi.

Tabel 3.4 PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024

No	Tahun	Harga Berlaku (Rp. Ribu)	Laju Pertumbuhan (%)
1	2020	70.449,18	4,69
2	2021	75.245,51	6,81
3	2022	82.480,12	9,61
4	2023	89.062,44	7,98
5	2024	97.593,45	9,58

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu atas dasar harga berlaku meningkat setiap tahun dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2023 PDRB Perkapita Kabupaten Labuhanbatu adalah sebesar 89.062,44 (dalam ribu rupiah) meningkat menjadi sebesar 97.593,45 (dalam ribu rupiah) atau 9,58 persen pada tahun 2024.

E Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Tingkat Inflasi Kabupaten Labuhanbatu selama periode 5 (lima) tahun terakhir terjadi secara fluktuatif. Pada tahun 2022 Tingkat inflasi cukup tinggi yaitu sebesar 6,16 persen, hal ini dipengaruhi oleh tingkat inflasi nasional yang cenderung tinggi. Pada tahun 2023 tingkat inflasi Kabupaten Labuhanbatu mulai mengalami penurunan menjadi 2,97 persen tetapi pada tahun 2024 tingkat inflasi Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan sebesar 0,39 persen menjadi sebesar 3,36 persen, Rata-rata laju inflasi di Kabupaten Labuhanbatu selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	ANGKA INFLASI (%)
1	2020	2,78
2	2021	2,12
3	2022	6,16
4	2023	2,97
5	2024	3,36

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara 2025

F Ketenagakerjaan

Salah satu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pengangguran adalah Ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi daerah akan semakin baik apabila tingkat pengangguran semakin menurun. Tingkat pengangguran dipengaruhi oleh adanya beberapa kondisi antara lain jumlah angkatan kerja, jumlah kesempatan kerja dan tingkat pendidikan angkatan kerja. Sebagai gambaran, tabel berikut menyajikan kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Angka Pengangguran Terbuka tahun 2020 – 2024 di Kabupaten Labuhanbatu.

Tabel 3.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 – 2024 (%)

No	Tahun	Partisipasi Angkatan Kerja	Angka Pengangguran Terbuka
1	2020	64,91	6,05

No	Tahun	Partisipasi Angkatan Kerja	Angka Pengangguran Terbuka
2	2021	61,84	5,66
3	2022	63,51	6,90
4	2023	64,84	5,99
5	2024	65,46	5,90

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu 2025

Pada tabel di atas dapat terlihat selama kurun waktu 5 tahun, Partisipasi Angkatan Kerja mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Demikian halnya dengan pengangguran terbuka, kondisi tidak stabil ini harus didorong dengan peningkatan investasi.

G Kemiskinan

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024 sebesar 7,84 persen dan merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Secara keseluruhan terdapat penurunan persentase penduduk miskin walaupun sempat naik sebesar 8,74 persen saat puncak pandemi Covid-19 pada tahun 2021.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Garis kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2024 adalah sebesar 556.900 (Rp/Kapita/bulan).

Data kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel bawah ini.

Tabel 3.7 Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Standar	100	100	100	100	100
2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	42,17	45,03	43,27	42,58	42,45
3	Persentase Penduduk Miskin	8,44	8,74	8,26	7,99	7,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2025

3.1.2 Perkiraan Capaian Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2026

Pada Tahun 2026, kondisi ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kebijakan Daerah dalam mempercepat proses pembangunan, kebijakan nasional menyangkut perekonomian, kecenderungan pasar dan perkembangan politik. Pada akhir tahun 2026 diperkirakan indikator makro menunjukkan perkembangan yang positif. Diperkirakan pada semester kedua tahun 2026 kondisi perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu akan semakin baik. Namun kondisi ini dapat diseimbangkan melalui peningkatan volume aktifitas perdagangan dipasar dan peningkatan usaha kecil menengah melalui kemudahan permodalan.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan meningkat tidak terlalu tajam dibandingkan dengan tahun 2025, laju inflasi akan ditekan seiring dengan perhitungan inflasi real di Labuhanbatu, yang selama ini mengikuti angka dasar perhitungan pematang siantar. Peningkatan pada sektor perdagangan menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong perekonomian daerah. Perkembangan indikator makro ekonomi daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 diperkirakan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30-5,80%.
2. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sebesar 108,78 (dalam juta rupiah).

3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,36-5,83 %.
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,50-69,00
5. Rasio Gini sebesar 0,250-0,248
6. Tingkat kemiskinan sebesar 13,10-12,50 %
7. Indeks kualitas Lingkungan Hidup sebesar 74,36.
8. Penurunan Emisi GRK(tonCO₂eq) sebesar 143.323,31.
9. Kontribusi PDRB Kab/Kota sebesar 4,45 %

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2026

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan keuangan serta kondisi dan permasalahan daerah yang terdiri dari kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Rumusan kebijakan yang ditetapkan dalam mendukung pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih difokuskan pada upaya peningkatan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai wujud kemandirian daerah terutama melalui intensifikasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disamping itu pentingnya kepastian salur penerimaan Dana Transfer melalui penyerapan anggaran dan penyampaian pelaporan dan syarat salur tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya berdasarkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun perencanaan dan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah dan Peraturan pemerintah atasan.

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi akan menjadi faktor utama dalam mendorong peningkatan penerimaan PAD, isu utama penggunaan Teknologi Informasi (TI) antara lain penggunaan aplikasi berbasis *mobile* yang didukung layanan perbankan secara *online* seperti *Sumut Mobile* dan platform *Quick Response for Indonesian Standard (QRIS)* Bank Indonesia, penerapan layanan *Host to Host*, pemasangan perangkat *Tapping Box* di hotel-hotel, restoran dan rumah makan, penyediaan kemudahan pembayaran melalui *payment point* serta inovasi-inovasi yang dapat memberikan stimulus dan kemudahan bagi wajib pajak dan retribusi daerah dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Disamping itu bahwa terhadap kebijakan Pemerintah Pusat terkait implementasi Undang-Undang HKPD pada Tahun 2025 serta kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota merupakan isu strategis terkait peningkatan PAD yang berasal dari pajak daerah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan terus berkoordinasi dengan pemerintah atasan dan akan melakukan penyesuaian asumsi yang direncanakan dalam APBD setelah diperoleh penetapannya dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan Dana Transfer baik transfer Pemerintah Pusat maupun transfer antar daerah, masih merupakan sumber penerimaan yang terbesar dan cukup penting dalam mendorong peningkatan Pendapatan Daerah. Dilihat dari komposisi Pendapatan Daerah, trend perkembangan PAD dan Dana Transfer serta proyeksi target dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 s.d. Tahun 2027

Kode Rek	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun Berjalan 2025	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2026	Proyeksi/Target pada Tahun 2027
1	2	5	6	7	8	

Kode Rek	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun Berjalan 2025	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2026	Proyeksi/Target pada Tahun 2027
4	PENDAPATAN	1.418.202.377.931	1.396.402.650.640	1.426.247.152.507	1.239.008.584.552	1.298.000.000.000
4.1	Pendapatan Asli Daerah	204.630.088.160	216.771.112.218	282.804.503.507	273.565.000.000	277.500.000.000
4.1.1	Pajak Daerah	70.333.787.460	62.043.443.608	138.679.503.507	122.800.000.000	125.000.000.000
4.1.2	Retribusi Daerah	5.627.737.443	5.398.186.485	122.625.000.000	128.365.000.000	130.000.000.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.967.624.879	12.426.168.386	12.500.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116.700.938.379	136.903.313.739	9.000.000.000	9.400.000.000	9.500.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.198.451.722.283	1.163.622.703.987	1.125.442.649.000	944.441.237.000	998.500.000.000
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	1.085.355.200.103	1.093.186.205.772	1.075.442.649.000	895.441.237.000	948.500.000.000
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	77.962.386.629	72.940.434.000	71.680.666.000	30.106.288.000	32.000.000.000
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum	674.333.419.000	697.778.171.746	727.752.364.000	597.031.648.000	636.000.000.000
4.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	250.131.606.674	241.763.628.526	198.499.484.000	201.483.427.000	210.400.000.000
4.2.1.4	Dana Desa	77.238.661.800	77.359.788.000	77.510.135.000	66.819.874.000	70.100.000.000
4.2.1.5	Insentif Fiskal	5.689.126.000	3.344.183.500	-	-	-
4.2.2	Transfer Antar Daerah	113.096.522.180	70.436.498.215	50.000.000.000	49.000.000.000	50.000.000.000
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	80.162.441.470	70.436.498.215	50.000.000.000	49.000.000.000	50.000.000.000
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pem.Provinsi	32.934.080.710	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	15.120.567.488	16.008.834.435	18.000.000.000	21.002.347.552	22.000.000.000
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	82.896.040	-	-	-
4.3.2	Lain - Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan(Pendapatan Kapitasi JKN)	15.120.567.488	15.925.938.395	18.000.000.000	21.002.0347.552	22.000.000.000

A Pendapatan Asli Daerah

Target Penerimaan yang berasal dari pengelolaan PAD untuk tahun 2026 diproyeksikan berkurang sebesar 3,27% dari tahun anggaran

sebelumnya. Penyesuaian target penerimaan PAD ini diasumsikan dengan memperhatikan tingkat capaian atau realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tetap optimis dan berupaya secara maksimal agar kedepan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih ditingkatkan sebagai wujud kemandirian daerah.

B Pendapatan Transfer

Target perolehan Pendapatan Transfer yang berasal dari dana Perimbangan untuk Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa secara keseluruhan diproyeksikan berkurang sebesar 16,08% dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat terkait rencana pengurangan alokasi dana transfer ke daerah tahun 2026, namun demikian terhadap alokasi dana transfer tersebut setelah diperoleh penetapannya dari Pemerintah Pusat akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang tata caranya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu juga memperoleh Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara pada TA.2026 antara lain Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Bagi Hasil Pajak Rokok (PR), dan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP) yang secara keseluruhan penerimaannya ditargetkan berkurang 2,0% dari tahun anggaran sebelumnya dengan asumsi bahwa pada Tahun Anggaran 2026 penerimaan bagi hasil pajak dari Provinsi dihitung berdasarkan potensi masing-masing daerah.

C Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2026 direncanakan berasal dari penerimaan Dana Kapitasi/Non Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp22.000.000.000,- bertambah sebesar 16,68% dari tahun anggaran sebelumnya yang dikelola oleh 15 FKTP atau Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu yang dananya langsung ditransfer ke masing-masing FKTP. Penambahan ini diasumsikan berdasarkan Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas ditahun 2025.

Dalam pencapaian target pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2026 diperkirakan masih dihadapi beberapa hambatan maupun kendala diantaranya adalah perkiraan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 dibanding pada tahun sebelumnya (*yoy*) baik regional maupun nasional, adanya kemungkinan kenaikan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat sehingga akan mempengaruhi pencapaian target yang direncanakan tersebut. Selain itu kendala adanya wajib pajak dan wajib retribusi yang masih belum memenuhi ketentuan serta masih belum optimalnya inventarisasi piutang PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta analisa potensi terhadap masing-masing ayat penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga menjadi kendala terhadap upaya optimalisasi. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan terus melakukan upaya-upaya dan terobosan yang diperlukan dalam mengatasi kendala pencapaian target pendapatan daerah tersebut antara lain :

D Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan implementasi Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah pada Tahun 2025 yang potensial terhadap peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah termasuk kebijakan Opsen dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

- b) Melakukan pendataan dan memastikan seluruh potensi pajak dan retribusi daerah yang akan ditagih sesuai dengan sasaran setiap jenis pajak dan retribusi daerah sehingga diperoleh data potensimasing-masing ayat penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pedoman bagi Bapenda dan SKPD pengelola retribusi daerah dalam melaksanakan penatausahaan pajak dan retribusi daerah.
- c) Dalam penagihan pajak daerah media yang digunakan adalah *Self Assessment* dan *Official Assessment* bagi beberapa pajak daerah seperti; pajak restoran, pajak hotel, pajak air bawah tanah, pajak reklame dan pajak hiburan.
- d) Pajak daerah yang pengutipan dan penagihannya dilakukan harian maupun bulanan diwajibkan kepada SKPD sebagai pengelola pajak daerah menggunakan media karcis yang telah diporporasi oleh SKPD bersangkutan dan membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah, adapun pajak daerah yang menggunakan media dimaksud adalah pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak parkir. Sejalan dengan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan diminta kepada Bapenda melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait atas pemanfaatan galian mineral bukan logam dan batuan.
- e) Penerapan layanan *Host to Host* (H2H) yang bekerjasama dengan beberapa *payment point* dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan pembayaran bagi wajib pajak.

- f) Untuk Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dalam pengutipannya dilakukan oleh PT.PLN sebagai subjek pajak dimaksud. Untuk itu SKPD bersangkutan wajib menetapkan kesepakatan kedua belah pihak agar pihak-pihak yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian Pihak PT. PLN sebagai subjek pajak wajib memberikan data-data pelanggan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku pengelola pajak daerah baik secara triwulan maupun priodik guna mengetahui kondisi jumlah pelanggan dan pihak PT.PLN wajib memberikan laporan setiap bulannya. Untuk upaya optimalisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu juga merencanakan kebijakan meterisasi sebagai bentuk pemetaan potensi.
- g) Dalam pengelolaan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini Bapenda sebagai pengelola jenis pajak dimaksud melakukan:
- Melakukan pendataan dan validasi terhadap wajib pajak dan objek pajak PBB-P2 di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa serta UPT Bapenda di Kecamatan.
 - Melakukan updating penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) bekerjasama dengan BPN dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB.
 - Dalam pendataan dan validasi dimaksud mengikut sertakan perangkat kecamatan, kelurahan, kepala lingkungan, perangkat desa dan kepala dusun.
 - Diberikan honor pendistribusian SPPT kepada perangkat desa dan lingkungan.
 - Memberikan *reward* kepada camat dan kepala desa yang dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai tanggal

- jatuh tempo dan/atau melebihi target serta memberikan sanksi kepada camat dan kepala desa yang tidak capai target.
- Menetapkan Bulan PBB bagi PNSD, Pejabat Negara dan/atau Pejabat Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
 - Pihak Bapenda harus melakukan monitoring dan evaluasi kembali untuk memastikan pendistribusian SPPT benar-benar telah diterima oleh wajib pajak.
 - Memberdayakan kepala lingkungan dan kepala dusun terkait dengan *updating* data potensi pajak PBB-P2.
 - Terkait dengan pengelolaan dan pengutipan BPHTB Pemerintah Daerah dalam hal ini Bapenda melakukan verifikasi permohonan BPHTB berdasarkan laporan pihak Notaris maupun BPN.
 - Kebijakan lain yang harus disikapi oleh SKPD pengelola adalah memberikan pelaporan dan data-data atas realisasiseluruh objekpajak dan retribusi daerah daerah kepada Bupati sebagai kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dengan tembusan kepada DPRD dalam hal ini Komisi 3.
 - Melakukan evaluasi secara priodik kepada seluruh SKPD pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mengoptimalkan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan sebagaimana mestinya.
 - Memberikan sanksi yang tegas kepada petugas pemungut yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya dan memberikan Surat Pernyataan dan/atau Fakta Integritas.
 - Membentuk Tim Intensifikasi yang melibatkan instansi ataupun organisasi terkait dalam rangka pencapaian

target pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.

- Memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang memberikan kontribusi terhadap retribusi daerah melalui penertiban dengan upaya pendekatan dan/atau memberdayakan petugas satpol PP serta bekerjasama dengan pihak TNI, POLRI dan Kejaksaan bila diperlukan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas sarana prasarana yang dimiliki sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakan aset-aset daerah yang menjadi sumber penerimaan retribusi daerah.

a. Pendapatan Transfer

Meningkatkan perolehan dana perimbangan dan dana transfer Pemerintah Provinsi terutama Dana Bagi Hasil Pajak dengan memfasilitasi dan mendukung upaya peningkatan perolehan pajak pusat dan provinsi, melakukan komunikasi dan meningkatkan koordinasi yang lebih intensif kepada pihak pemerintah atasan, khusus terhadap DAU yang ditentukan peruntukannya memperhatikan rencana penggunaan dan penyerapan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta fungsi pelaporan yang tepat jumlah dan tepat waktu sebagai syarat salur ke daerah.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah atasan seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana transfer lainnya yang diterima setelah APBD ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan memberitahukannya kepada pimpinan DPRD. Dalam hal program dan kegiatan dimaksud

dilaksanakan setelah Perubahan APBD ditetapkan atau Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD maka dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah direncanakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan serta Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Kebijakan Belanja Daerah diupayakan pada peningkatan porsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik (*public oriented*), disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan terhadap alokasi belanja yang bersifat *mandatory spending* serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penggunaan Belanja Daerah harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip disiplin anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas dan kondisi fiskal daerah. Isu strategis terkait perencanaan belanja daerah pada TA.2026 antara lain;

- 1) Optimalisasi Penggunaan aplikasi SIPD RI *Micro Services* yang terintegrasi dengan Bank Sumut melalui penerapan CMS dan Transaksi Non Tunai untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dalam rangka penerapan *e-Government* guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Pengalokasian belanja berbasis *Money Follows Program* dalam arti bahwa perencanaan belanja fokus kepada pemenuhan anggaran terhadap program kegiatan prioritas.

- 3) Optimalisasi penyerapan belanja sebagai wujud dari efektifitas perencanaan dan penganggaran dalam rangka pencapaian *output* dan *outcome* program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
- 4) Pengalokasian belanja untuk mendukung program prioritas nasional, prioritas provinsi dan prioritas daerah pada tahun perencanaan demikian juga terhadap program dan kegiatan terkait dengan pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDG's)* antara lain; pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, penguatan UMKM, Ketahanan Pangan, Daya Saing Pariwisata, penyediaan anggaran Responsif Gender, program kegiatan untuk mendukung Kabupaten Layak Anak serta kegiatan lain yang menjadi prioritas daerah, provinsi dan nasional.

Disamping itu secara umum kebijakan yang terkait dengan Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Penganggaran belanja operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1). Belanja Pegawai

- a). Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD dan PPPK disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai.
- b). Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c). Pemberian Tunjangan Kinerja dan/atau Tambahan Penghasilan bagi ASN dan PPPK yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan daerah. Pemberian Tambahan penghasilan bagi ASN dan PPPK

berdasarkan tingkat disiplin dan kinerja ASN yang diinput menggunakan aplikasi *ALIS* yang berbasis *web* dan aplikasi Absensi *Online* ASN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

- f). Pemberian Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya bagi CPNSD/PNSD, PPPK serta Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g). Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru yang berasal dari DAK Non Fisik.
- h). Pemberian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i). Khusus pembayaran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan diberikan sampai kepada kepala lingkungan dan/atau kepala dusun, dengan merevisi Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.
- j). Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- k). Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan sebagai berikut :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - Biaya Penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109

Tahun 2000 yang semula tertulis “*Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota*” termasuk didalamnya “*Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota*”.

- 1). Dengan ditetapkannya Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan berupaya agar alokasi anggaran belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari total belanja dalam APBD.

- 2). **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa direncanakan pada TA.2026 antara lain dialokasikan untuk penyediaan sarana dan prasarana operasional kantor, belanja yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk bangunan, belanja perjalanan dinas serta belanja bantuan iuran jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Disamping itu Belanja Barang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan serta Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan diprioritaskan kepada urusan-urusan yang menangani pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan. Belanja Barang pada setiap SKPD diprioritaskan kepada kebutuhan dasar penyelenggaraan administrasi pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan

dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar satuan harga regional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah pada tahun perencanaan.

3). Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, belanja hibah juga termasuk didalamnya alokasi hibah kepada partai politik. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4). Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat, memiliki

kejelasan peruntukan penggunaannya serta tidak diberikan secara terus menerus/berulang setiap tahun pada organisasi kemasyarakatan yang sama yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial dalam APBD antara lain direncanakan untuk pemberian bantuan beasiswa bagi Mahasiswa.

b. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan kepada Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tetap berupaya secara maksimal untuk meningkatkan alokasi anggaran belanja modal infrastruktur dalam APBD sehingga dapat memenuhi *mandatory* yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi kegiatan yang tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan tidak dapat diperkirakan seperti Bencana Alam dan Peristiwa Luar Biasa termasuk bencana Non Alam.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat, mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

d. Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil

Dialokasikan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian pembayaran yang akan disalurkan kepada pemerintah desa tetap berdasarkan realisasi pajak dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran TA.2026.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Dialokasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 72 ayat (4) dan pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, adapun kebijakan yang ditempuh sebagai berikut :

- a) Kepada Pemerintahan Desa dialokasikan Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang peruntukannya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- b) Alokasi Dana Desa dialokasikan kepada Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 s.d. tahun 2027

URAIAN	Jumlah				
	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Berjalan 2024	Tahun Berjalan 2025	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2026	Proyeksi/Target pada Tahun 2027
1	2	3	4	5	6
BELANJA	1.418.287.964.358	1.398.828.896.920	1.426.247.152.507	1.299.008.584.552	1.298.000.000.000
BELANJA OPERASI	1.021.869.546.656	1.072.921.040.306	1.154.178.797.157	1.068.339.045.949	1.032.392.106.400
Belanja Pegawai	569.768.669.102	604.176.024.383	709.832.123.433	742.843.282.247	750.000.000.000
Belanja Barang dan Jasa	422.964.293.554	414.411.843.923	432.254.821.724	322.323.407.702	277.392.106.400
Belanja Hibah	29.136.584.000	54.333.172.000	9.591.852.000	3.172.356.000	5.000.000.000

URAIAN	Jumlah				
	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Berjalan 2024	Tahun Berjalan 2025	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2026	Proyeksi/Target pada Tahun 2027
Belanja Bantuan Sosial	-	-	2.500.000.000	-	-
BELANJA MODAL	239.657.380.662	166.992.317.300	97.271.566.699	76.397.593.114	117.360.000.000
Belanja Tanah	334.114.000	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	69.749.424.078	55.519.796.318	20.658.097.787	23.840.343.114	20.500.000.000
Belanja Bangunan dan Gedung	53.811.973.380	42.049.624.978	38.771.643.389	22.557.250.000	30.000.000.000
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	108.792.247.808	62.837.294.753	37.574.008.753	30.000.000.000	60.000.000.000
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.969.621.396	5.898.820.986	207.816.770	-	6.800.000.000
Belanja Aset Lainnya	-	686.780.265	60.000.000	-	60.000.000
BELANJA TAK TERDUGA	2.660.704.460	311.022.100	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Belanja Tak Terduga	2.660.704.460	311.022.100	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
BELANJA TRANSFER	154.100.332.580	158.604.517.213	171.796.788.651	151.271.945.489	145.247.893.600
Belanja Bagi Hasil	2.694.841.500	5.206.748.000	14.580.450.351	21.837.380.589	13.034.100.000
Belanja Bantuan Keuangan	151.405.491.080	153.397.769.213	157.216.338.300	129.434.564.900	132.0213.793.600

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dalam struktur APBD terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dimana selisih lebih antara penerimaan dengan pengeluaran disebut Pembiayaan Netto yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

A Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

- a). Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak menambah beban daerah dan pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo.
- b). Penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2026 terdiri dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dan Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah yang akan dialokasikan dalam rangka peningkatan fasilitas kesehatan dan pengembangan pasar.
- c). Penerimaan pembiayaan berasal dari Pinjaman PT SMI sebesar Rp 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar) yang akan dipakai untuk pembangunan fisik RSUD Rantauprapat. Pengembalian pinjaman tersebut akan dibiayai dari dana BLUD.
- d). Penerimaan pembiayaan bersasal dari Pinjaman PT Bank Sumut sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar) yang akan digunakan untuk pembangunan dan revitalisasi Pasar Aek Nabara. Pengembalian pinjaman tersebut dari pendapatan retribusi daerah dan APBD Kabupaten Labuhanbatu.

B Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,- yang direncanakan untuk penambahan penyertaan modal atau investasi daerah pada PT.Bank Sumut. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT.BANK SUMUT sebagai upaya peningkatan perolehan PAD yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam bentuk deviden yang dilaksanakan memperhatikan kondisi fiskal daerah serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 3.10 Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022-2027

Kode Rek	URAIAN	Jumlah				Proyeksi/Target pada Tahun 2027
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun Berjalan 2025	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2026	
1	2	5	6	7	8	
3.	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.611.432.181,56	34.556.282.755,17	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	34.537.532.181,56	34.556.282.755,17	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	73.900.000,00	-	-	60.000.000.000	-
3.1.6	Koreksi Silpa	-	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000	3.000.000.000
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000	3.000.000.000
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
3.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	34.611.432.181,56	34.556.282.755,17	-	60.000.000.000	-

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan sasaran Pembangunan

4.1.1 Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan tentang sesuatu yang ingin dicapai. Pedoman utama penyusunan visi adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029 adalah,

“LABUHANBATU CERDAS BERSINAR“

Visi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat diuraikan sebagai berikut :

CERDAS

CERDAS merupakan singkatan dari Cepat Elegan Responsif Demokratis Adaptif, Sinergis. Kabupaten Labuhanbatu sangat responsif dalam menghadapi perubahan yang ada serta mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Kabupaten Labuhanbatu menjadi daerah yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat serta menerima segala aspirasi pembangunan yang disampaikan oleh rakyat dan bertindak cepat dalam memajukan daerah.

Bersinar

Bersinar berarti terbit/muncul setelah redup cahaya yang menerangi Labuhanbatu secara spontan dan mampu memberi energi bagi masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan dari yang seharusnya dapat dicapai.

4.1.2 Misi

Visi tersebut akan dicapai melalui misi pembangunan sebagai berikut :

Misi 1. Meningkatkan sumber daya manusia dengan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk semua.

Manusia berkualitas adalah modal utama pembangunan daerah di tengah disrupsi global dan revolusi industri 4.0. Transformasi pendidikan yang tidak hanya fokus pada literasi dan numerasi, tetapi mengembangkan kompetensi abad 21, meliputi berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Pemerintah akan membangun Sekolah berkualitas di setiap pelosok daerah dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah, didukung fasilitas digital meliputi jaringan *broadband*, perangkat pembelajaran, dan laboratorium inovasi. Kesehatan masyarakat dikuatkan melalui sistem kesehatan komprehensif berbasis preventif-promotif tanpa mengabaikan kuratif-rehabilitatif. Puskesmas direvitalisasi menjadi pusat layanan kesehatan primer dengan telemedicine dan sistem rujukan terintegrasi. Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) dan Kampung KB diperkuat sebagai intervensi untuk mengatasi masalah kesehatan dan kependudukan.

Misi 2. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan.

Kemandirian pangan menjadi fondasi ketahanan daerah yang tak tergantikan. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu membangun sistem pertanian yang berdaya tahan melalui diversifikasi komoditas, penguatan rantai pasok lokal, dan penerapan teknologi pertanian presisi. Berbagai program inovatif seperti Desa Lumbung Pangan, Pembibitan Mandiri, dan Integrasi Pertanian-Peternakan digerakkan oleh petani lokal dan kelompok tani yang telah mendapatkan pelatihan intensif. Kabupaten Labuhanbatu akan mewujudkan kemandirian pangan melalui pendekatan hulu-hilir yang komprehensif dari perbaikan sistem irigasi, dukungan permodalan, hingga jaminan pasar. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset sehingga tercipta varietas unggul adaptif iklim dan pupuk organik berbasis kearifan lokal. Transformasi digital turut diperkuat melalui teknologi pertanian yang mempertemukan petani dengan konsumen, mengurangi rantai distribusi, dan memastikan nilai tambah ekonomi tetap di daerah. Misi ini menjadi prioritas utama dengan mengedepankan sistem regenerasi petani muda, konservasi lahan produktif, dan diversifikasi pangan berbasis potensi lokal.

Misi 3. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Tata kelola pemerintahan yang adaptif menjadi kebutuhan mendasar pada era yang disruptif. Transformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh dengan menyederhanakan struktur, menghilangkan duplikasi, dan mengoptimalkan fungsi. Pendekatan agile governance diterapkan melalui gugus tugas lintas sektoral yang adaptif terhadap perubahan, didukung sistem informasi terintegrasi real-time. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi fokus utama dengan menghapus regulasi yang tumpang tindih, menyederhanakan perizinan, dan memperlancar pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan

menjadi tulang punggung efisiensi melalui pengembangan sistem Government Integrated Digital Services. Pelayanan satu pintu dikembangkan secara daring dan luring, memungkinkan warga mengakses layanan kapan pun dan di mana pun. Transparansi dan akuntabilitas diperkuat melalui platform pengadaan barang/jasa elektronik, anggaran yang transparan, dan sistem pengaduan masyarakat terintegrasi. Inovasi pelayanan publik terus didorong melalui kompetisi dan laboratorium inovasi yang melibatkan kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Kapasitas aparatur merupakan hal yang penting sehingga akan ditingkatkan melalui program pengembangan kompetensi berkelanjutan berbasis assessment center. Budaya kerja berorientasi hasil dan pelayanan ditanamkan melalui perubahan pola pikir dan reformasi mental birokrasi. Pemerintah menjadi fasilitator dan katalisator pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Misi 4. Meningkatkan perlindungan sosial dan pengembangan budaya.

Sistem perlindungan sosial yang inklusif menjadi jaring pengaman bagi kelompok rentan di tengah dinamika pembangunan. Program perlindungan sosial dibangun untuk melindungi masyarakat dari masa kelahiran hingga lanjut usia. Pemetaan sosial geospasial dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk mengidentifikasi keluarga prasejahtera secara akurat, menghindari eksklusi maupun inklusi yang keliru. Pendekatan adaptif diterapkan melalui bantuan tunai, bantuan pangan non-tunai, dan subsidi pendidikan-kesehatan yang terintegrasi dengan program pemberdayaan. Kelompok rentan khusus seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, dan anak yatim mendapat perhatian melalui program khusus yang menjamin akses terhadap layanan dasar dan partisipasi sosial. Pengembangan budaya diposisikan sebagai pemersatu kebhinekaan sekaligus sumber identitas dan daya saing daerah. Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal

dilakukan melalui digitalisasi, dokumentasi, dan revitalisasi praktik budaya. Festival budaya berkala diselenggarakan sebagai wahana ekspresi kreativitas dan transmisi nilai antar generasi. Ruang-ruang budaya seperti sanggar seni, museum, dan pusat kerajinan menjadi ekosistem bagi para pelaku budaya untuk berkreasi dan berinovasi. Diplomasi budaya diperkuat melalui pertukaran seni, residensi seniman, dan *showcase* budaya di kancah nasional-internasional, memperkuat posisi daerah dalam konstelasi budaya global. Perlindungan sosial tidak hanya berfokus pada bantuan temporer tetapi menciptakan resiliensi masyarakat dan keberlanjutan budaya.

Misi 5. Membangun desa dan menata kota berbasis potensi wilayah secara tematik.

Desa-kota yang tumbuh berdasarkan karakteristik wilayahnya menciptakan keberlanjutan ekologis sekaligus ekonomis. Kabupaten Labuhanbatu akan mengembangkan desa pertanian, desa perikanan, dan desa wisata berdasarkan potensi sumber daya alam, keterampilan masyarakat, dan peluang pasar. Penataan kota dilakukan dengan pendekatan komprehensif berbasis *smart city*. Kawasan perkotaan dikembangkan melalui konsep *mixed-use development* yang meminimalkan kebutuhan transportasi, menekan jejak karbon, dan menciptakan *livability* yang tinggi. Ruang terbuka hijau, transportasi, dan jaringan jalan ramah pejalan kaki-pesepeda menjadi prioritas dalam tata ruang. Revitalisasi kawasan kumuh dilakukan dengan pendekatan *community-based development*, memastikan peningkatan kualitas lingkungan tanpa menggeser aspek sosial-budaya setempat. Integrasi desa-kota yang harmonis akan tercipta melalui koridor ekonomi yang menghubungkan sentra produksi dengan pusat konsumsi. Sistem logistik dioptimalkan untuk memperlancar aliran produk desa ke pasar perkotaan, sementara aliran informasi, teknologi, dan modal mengalir ke desa. Pengembangan kawasan perbatasan kota-desa sebagai *buffer zone* ekonomi menciptakan simbiosis mutualisme pada keduanya.

Misi 6. Melanjutkan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan meningkatkan mitigasi bencana.

Infrastruktur yang tangguh menjadi kebutuhan mendasar dalam menghadapi berbagai bencana alam. Pembangunan infrastruktur hijau menjadi prioritas pada setiap aspek pembangunan daerah. Sistem transportasi umum beremisi rendah, ruang terbuka hijau, dan infrastruktur energi terbarukan menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap masa depan Kabupaten Labuhanbatu. Daerah rawan bencana akan ditata melalui pendekatan mitigasi struktur dan non-struktur yang komprehensif. Infrastruktur tidak hanya mempermudah mobilitas ekonomi tetapi juga menjadi benteng pertahanan menghadapi tantangan iklim dan bencana.

Misi 6. Melanjutkan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan meningkatkan mitigasi bencana.

Dalam era disrupsi digital, ekonomi kreatif dan pariwisata menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya tahan tinggi. Kabupaten Labuhanbatu akan membangun ekosistem inovasi melalui pengembangan inkubator kreativitas, akselerator startup, dan ruang kolaborasi yang tersebar di seluruh daerah. Teknologi digital menjadi *enabler* utama, transformasi digital UMKM kreatif dipercepat, ditunjang dengan pelatihan desain, branding, dan pemasaran digital. Pengembangan platform *marketplace* lokal menghubungkan pelaku ekonomi kreatif dengan pasar global tanpa melalui rantai distribusi panjang. Sektor Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru akan dikembangkan menuju konsep *Experience Economy* yang menekankan nilai pengalaman otentik berbasis kearifan lokal. Destinasi wisata direvitalisasi dengan pendekatan tematik (ekowisata, wisata budaya, dan wisata kuliner) yang masing-masing dikembangkan dengan standar internasional namun tetap berakar pada kearifan lokal. Infrastruktur pendukung seperti jalur sepeda, akomodasi, dan pusat kebudayaan akan dibangun untuk menciptakan ekosistem pariwisata berkelanjutan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu

Tujuan dan sasaran dalam RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026, harus menjadi bagian dari sinkronisasi tujuan dan sasaran dalam RPJMD kabupaten labuhanbatu tahun 2025-2029. Kondisi makro labuhanbatu tahun 2024 menjadi penting untuk penetapan target dan tahun 2026. Kondisi makro ekonomi Labuhanbatu tahun 2024 diantaranya: Laju Pertumbuhan Ekonomi (5,06%), IPM (75,20), TPT (5,90%), PDRB Perkapita (Rp.95,8 Jt), Tingkat Kemiskinan (7,84%), Rasio Gini (0,251), Inflasi (3,36%), Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (-) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (67,62). Kondisi makro diatas menjadi bahan penting untuk penetapan target tujuan dan sasaran makro dan turunannya tahun 2026 seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 mengacu pada RPJMD 2025 - 2029

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal				Target		Kondisi Akhir 2029	Transisi (2030)
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Labuhanbatu Cerdas Bersinar											
1	Meningkatkan sumber daya manusia dengan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk semua										
	1.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,69	75,20	75,28	75,34	75,48	75,63	75,77	75,91
	1.1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Literasi SD (Poin)	47,14	-	49,53	50,77	52,03	53,33	54,67	56,03
			Literasi SMP (Poin)	50,14	-	52,68	54,00	55,35	56,73	58,15	59,60
			Numerasi SD (Poin)	34,64	-	37,47	38,97	40,52	42,14	43,83	45,58
			Numerasi SMP (Poin)	34,10	-	36,88	38,35	39,89	41,48	43,14	44,86
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,25	13,26	13,45	13,46	13,47	13,48	13,49	13,50
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,49	9,50	9,71	9,67	9,63	9,58	9,54	9,50
	1.1.2	Meningkatkan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	51,09	13,16	60,00	61,88	63,82	65,81	67,87	70,00
	1.1.3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,88	73,130	73,87	74,09	74,32	74,55	74,77	75,00
			Indeks Keluarga Sehat (Poin)	-	-	60,00	63,55	67,32	71,30	75,53	80,00
	1.2	Meningkatkan tenaga kerja yang berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,99	5,90	5,50	5,40	5,29	5,19	5,10	5,00
	1.2.1	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp juta/jiwa)	201,90	218,06	218,65	228,90	239,62	250,85	262,61	274,92
2	Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan										
	2.1	Meningkatkan ketercukupan konsumsi pangan masyarakat	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	7,38	7,07	6,50	5,90	5,35	4,86	4,41	4,00
	2.1.1	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	77,96	76,94	78,50	78,80	79,10	79,40	79,70	80,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal				Target		Kondisi Akhir 2029	Transisi (2030)
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
berkualitas dan terjangkau											
3	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien										
	3.1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	3,29	3,88	3,92	3,96	4,00	4,04	4,08	4,12
	3.1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	56,33	62,94	63,79	64,63	65,48	66,32	67,17	67,80
	3.1.2	Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	-	-	50,00	52,69	55,53	58,52	61,68	65,00
	3.1.3	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	-	-	60,00	62,74	65,60	68,60	71,73	75,00
4	Meningkatkan perlindungan sosial dan pengembangan budaya										
	4.1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,99	7,90	6,00	5,79	5,58	5,38	5,19	5,00
	4.1.1	Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	18,30	-	23,45	23,87	24,29	24,72	25,15	25,60
	4.1.2	Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	0,003	-	1,00	1,74	3,01	5,23	9,07	15,75
	4.2	Meningkatkan kualitas keluarga yang harmonis dan berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	78,34	80,00	81,72	82,21	82,71	83,21	83,71	84,22
	4.2.1	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial (Poin)	-	-	55,00	55,97	56,95	57,95	58,96	60,00
	4.2.2	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Poin)	-	-	40,00	41,83	43,73	45,73	47,82	50,00
	4.2.3	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	54,29	60,38	60,50	61,28	62,07	62,87	63,68	64,50
	4.2.4	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	0,427	0,403	0,370	0,355	0,340	0,326	0,313	0,300
			Indeks Perlindungan Anak (Poin)	60,55	-	65,00	65,97	66,96	67,96	68,97	70,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal				Target		Kondisi Akhir 2029	Transisi (2030)	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		4.2.5	Terwujudnya berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	-	-	60,00	61,88	63,82	65,81	67,87	70,00
5	Membangun desa dan menata kota berbasis potensi wilayah secara tematik											
	5.1	Meningkatkan desa mandiri	Persentase Desa Mandiri (%)	2,67	7,50	4,00	4,43	4,91	5,44	6,02	6,67	
	5.1.1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,6980	0,7072	0,7188	0,7307	0,7427	0,7549	0,7674	0,7800	
	5.2	Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB Per Kapita (Rp juta)	89,06	97,59	97,80	101,65	105,66	109,82	114,14	118,63	
	5.2.1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (Poin)	-	-	130,00	133,77	137,66	141,66	145,77	150,00	
	5.2.2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	Nilai Tukar Nelayan (Poin)	-	-	110,00	113,74	117,60	121,60	125,73	130,00	
	5.3	Menurunkan luas kawasan kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh (%)	-	-	10,00	7,25	5,25	3,81	2,76	2,00	
	5.3.1	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	-	-	40,00	41,83	43,73	45,73	47,82	50,00	
6	Melanjutkan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan meningkatkan mitigasi bencana											
	6.1	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur (Poin)	64,47	-	67,09	68,44	69,82	71,23	72,67	74,13	
	6.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Poin)	15,30	-	40,00	41,83	43,73	45,73	47,82	50,00	
	6.1.2	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas (%)	-	-	70,00	71,89	73,84	75,84	77,89	80,00	
	6.1.3	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	64,47	67,62	70,00	70,97	71,96	72,96	73,97	75,00	
	6.1.4	Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	-	-	40,00	41,83	43,73	45,73	47,82	50,00	
	6.1.5	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh	Indeks Risiko Bencana (Poin)	124,98	-	121,05	118,92	116,84	114,79	112,77	110,79	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal				Target		Kondisi Akhir 2029	Transisi (2030)
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
bencana											
7	Mengembangkan inovasi daerah dalam mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata										
	7.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,06	5,46	5,89	6,36	6,87	7,41	8,00
	7.1.1	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	-	-	40,00	42,63	45,43	48,42	51,61	55,00
	7.1.2	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	1,28	1,24	1,32	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
	7.1.3	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	33,76	32,53	34,24	34,49	34,74	34,99	35,24	35,50
	7.1.4	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	17,57	17,96	18,29	18,62	18,95	19,30	19,65	20,00
	7.1	Meningkatkan daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Poin)	3,00	3,43	3,60	3,68	3,75	3,83	3,92	4,00
	7.2.1	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi (%)	-75,86	-	20,00	21,69	23,52	25,51	27,66	30,00
	7.2.2	Meningkatnya kapasitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	51,34	54,55	55,21	56,85	58,54	60,28	62,07	63,91
	7.2.3	Meningkatnya literasi digital masyarakat	Indeks Masyarakat Digital (Poin)	46,93	45,78	57,34	59,11	60,94	62,82	64,76	66,76
	7.2.4	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	-	-	30,00	33,23	36,80	40,76	45,14	50,00

Berikut disajikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu mengacu pada RPJMD 2025-2029

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1		Meningkatkan sumber daya manusia dengan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk semua			
				Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	
			Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan berkarakter ke seluruh daerah	Penguatan kompetensi guru bersertifikat di seluruh Kabupaten
					Pemberian insentif berbasis kinerja dan insentif bagi guru yang mau bekerja membangun di wilayah terpencil
					Penguatan peran keluarga dalam mendukung pembelajaran anak di luar sekolah
			Meningkatkan literasi masyarakat	Memberdayakan fungsi dan layanan gerakan membaca dan melek literasi	Peningkatan akses literasi masyarakat melalui pojok baca di berbagai wilayah strategis
					Penguatan literasi digital dan aset buku digital daerah untuk mempermudah perolehan informasi dan meningkatkan minat baca
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Memperkuat kualitas dan akses layanan primer kepada seluruh masyarakat	Pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh tingkatan masyarakat tidak perlu jauh untuk berobat
					Perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh masyarakat dan gratis
				Membangun perilaku preventif terhadap penyakit	Peningkatan cakupan imunisasi dan gizi cukup khususnya ibu dan anak
					Penguatan perilaku hidup bersih dan sehat
				Meningkatkan tenaga kerja yang berdaya saing	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Mendorong perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan	Pemberdayaan Industri, UMKM dan wirausaha melalui akses permodalan dan kemudahan berusaha Penguatan balai latihan kerja yang inklusif kepada seluruh masyarakat termasuk disabilitas Penguatan sektor padat karya berbasis keunggulan lokal
2			Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan		
				Meningkatkan ketercukupan konsumsi pangan masyarakat	
			Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Memperkuat ketersediaan pangan masyarakat yang stabil dan terjangkau serta terdiversifikasi	Peningkatan produktivitas pertanian pangan utama Penguatan pemahaman masyarakat melalui diversifikasi pangan utama Peningkatan distribusi dan penyimpanan pangan untuk menjaga stabilitas ketersediaan dan harga pangan
3			Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		
				Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih	
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital	Memperkuat sistem pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi dalam layanan publik	Penerapan penuh SPBE terintegrasi pada seluruh organisasi perangkat daerah Pengembangan platform terpadu untuk digitalisasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan Penguatan kapasitas digital SDM di lingkungan birokrasi
			Terwujudnya profesionalitas ASN	Mendorong integritas dan akuntabilitas ASN disertai dengan pengendalian internal	Penerapan SPIP secara menyeluruh dan terkendali Perwujudan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan pemerintahan Pengoptimalan peran APIP dalam audit kinerja

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Mengoptimalkan transformasi manajemen ASN berbasis meritokrasi yang disertai dengan pengembangan kompetensi	Penguatan budaya kerja produktif, inovatif yang berorientasi pada pelayanan
					Penguatan sistem rekrutmen sampai penilaian kerja berbasis merit
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Memperkuat sistem perencanaan berbasis data		Penguatan perencanaan terintegrasi pada setiap dokumen perencanaan
					Peningkatan kualitas dan basis data untuk pembangunan daerah
			Memperkuat pengambilan kebijakan berbasis bukti		Penguatan perencanaan melalui integrasi partisipatif dan kemampuan daerah
					Penguatan perencanaan daerah melalui kolaborasi lintas stakeholder
4			Meningkatkan perlindungan sosial dan pengembangan budaya		
			Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial		
		Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)	Meningkatkan cakupan perlindungan bagi pekerja terutama pada sektor informal dengan melibatkan dunia usaha		Penyediaan insentif untuk perlindungan pekerja sektor informal
					Pemberian fasilitas kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor informal
					Pengedukasian pentingnya perlindungan sosial bagi seluruh komunitas pekerja informal
		Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal	Memperkuat inklusivitas dan pemberdayaan ekonomi bagi para penyandang disabilitas		Pemberian pelatihan keterampilan vokasional siap kerja yang sesuai dengan penyandang disabilitas
					Pemberian insentif bagi pelaku usaha yang memberikan fasilitas layanan disabilitas menyeluruh
			Meningkatkan kualitas keluarga yang harmonis dan berbudaya		
		Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Memperkuat ketahanan keluarga hingga masyarakat melalui		Penguatan kembali peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				konseling	Pemberian fasilitas layanan konseling keluarga dan masyarakat
					Pengembangan pendidikan berkarakter serta kesehatan tingkat keluarga
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Memperkuat norma dan nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat		Penyelenggaraan forum-forum kemasyarakatan lintas agama dan budaya
					Penguatan peran sikamling dalam keamanan lingkungan
					Pengoptimalan penerangan jalan di seluruh daerah kabupaten
		Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Memperkuat keluarga melalui edukasi berkala		Penguatan penyelenggaraan bina keluarga sehat melalui layanan pra dan pasca nikah
					Pelayanan terpadu bagi kesehatan keluarga melalui KB
		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Memperkuat pelayanan berkesetaraan gender dan memberikan perlindungan anak dalam pelayanan publik		Pengembangan Kabupaten Layan Anak
					Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dan politik
					Perlindungan inklusif kepada anak
		Terwujudnya berkebudayaan maju	Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dalam ekonomi dan pembangunan		Pendataan dan perlindungan warisan budaya lokal
					Pemberdayaan komunitas budaya lokal agar lebih produktif dalam pembangunan
					Penguatan festival budaya daerah
					Pengintegrasian budaya berkarakter dalam kurikulum sekolah
5	Membangun desa dan menata kota berbasis potensi wilayah secara tematik				
				Meningkatkan desa mandiri	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Memperkuat kapasitas desa dalam tata kelola dan pembangunan berbasis potensi desa		Penguatan Ekonomi Lokal melalui BUMDes
					Penguatan ketahanan sosial dan budaya melalui nilai-nilai gotong royong
					Penguatan tata kelola serta kelembagaan desa

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pendapatan masyarakat					
		Meningkatnya kesejahteraan petani	Meningkatkan produktivitas, nilai tambah serta akses pasar bagi petani	Penguatan sistem pertanian terintegrasi di daerah	Penguatan hilirisasi serta akses pasar yang lebih baik bagi petani
					Peningkatan kapasitas kelompok tani dan koperasi tani dalam mengelola lahan pertanian
		Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	Meningkatkan produktivitas, nilai tambah serta akses pasar bagi nelayan	Penguatan dukungan sarana dan prasarana perikanan modern yang lebih modern dan terintegrasi dalam rantai pasokan	Penguatan nilai tambah melalui produk olahan ikan bersama UMKM
Menurunkan luas kawasan kumuh					
		Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Menyediakan layanan dan kualitas infrastruktur yang inklusif bersama pemerintah dan masyarakat	Penataan permukiman berbasis kawasan yang memenuhi infrastruktur dasar	Pengembangan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah
6	Melanjutkan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan meningkatkan mitigasi bencana				
		Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan			
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatkan kualitas dan ketercakupn infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan	Perawatan dan pembangunan jalan yang membangun konektivitas seluruh desa	Pemerataan akses sanitasi dan air bersih kepada seluruh masyarakat
				Penguatan ketersediaan listrik dan jaringan komunikasi yang menyeluruh	Pengintegrasian sistem transportasi wilayah menuju Stasiun Kereta Api
		Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Mengembangkan sistem transportasi publik aman dan ramah lingkungan	Pengoptimalan tertib lalu lintas Kota	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					Pengembangan Halte (Bus Stop) untuk mengoptimalkan layanan transportasi
			Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Memperkuat sistem pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas daerah dalam pengelolaan persampahan terpadu
					Pengoptimalan kawasan ruang terbuka hijau fungsional
					Pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah)
			Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan	Memperkuat pemanfaatan EBT dalam aktivitas strategis daerah	Penguatan peran masyarakat dan UMKM dalam menggunakan EBT di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu
					Pengembangan PLTS untuk kebutuhan energi masyarakat dan publik
			Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh bencana	Memperkuat pengembangan infrastruktur daerah berketahanan lingkungan dan tangguh bencana	Penguatan infrastruktur daerah peringatan dini bencana
					Pengembangan peta risiko bencana daerah
7	Mengembangkan inovasi daerah dalam mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata				
					Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
			Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM	Penguatan keterampilan digitalisasi UMKM menuju pasar yang lebih luas
					Pengintegrasian UMKM dalam rantai pasokan industri dan kepariwisataan daerah
					Pengembangan pusat promosi UMKM dengan kolaborasi lintas sektor
			Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengembangkan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal	Pengembangan destinasi wisata unggulan
					Penguatan pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat ramah wisata
					Penguatan kebudayaan melalui museum budaya dengan potensi ekonomi kreatif
			Meningkatnya daya saing	Meningkatkan produktivitas dan	Penguatan sistem logistik dan distribusi bahan baku

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			industri	nilai tambah sektor industri berkeunggulan lokal	untuk industri
					Pengembangan IKM berbasis kawasan dan keunggulan daerah
		Meningkatnya nilai tambah perdagangan		Mengembangkan sistem perdagangan daerah yang efisien, inovatif dan berorientasi ekspor	Penguatan sistem informasi harga dan distribusi untuk stabilitas dan efisiensi pasar
					Penguatan kerjasama untuk meningkatkan kualitas infrastruktur perdagangan
				Meningkatkan daya saing daerah	
		Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Meningkatkan iklim investasi yang kondusif di daerah	Promosi potensi investasi melalui katalog investasi daerah
					Pemberian insentif dan kemudahan bagi investor terutama yang memberdayakan sektor unggulan dan tenaga kerja lokal
		Meningkatnya kapasitas inovasi daerah		Memperkuat kapasitas dan ekosistem inovasi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Pemberian insentif dan penghargaan bagi perangkat daerah yang menghasilkan inovasi unggul
					Pengembangan pusat inovasi daerah untuk membangun kolaborasi kreatif bersama dunia usaha, komunitas dan akademisi
		Meningkatnya literasi digital masyarakat		Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital	Pengembangan pusat belajar digital berbasis komunitas mulai tingkat desa
					Pengintegrasian layanan publik digital yang mudah diakses masyarakat
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga		Memberdayakan pemuda sebagai pembawa perubahan serta prestasi pemuda	Pemberian kaderisasi dan pelatihan kepemimpinan bagi pemuda
					Penguatan fasilitas olahraga serta kelompok olahraga untuk memperkuat prestasi daerah

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut diatas, dirumuskan tema dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2026.

4.3 Prioritas dan sasaran Pembangunan Tahun 2026

Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Prinsip sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah hal yang penting untuk pencapaian tujuan pembangunan yang terintegrasi. RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan vertikal dan horizontal. Penyusunan RKPD mempedomani RPJMD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dan RKP Nasional melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas Pembangunan nasional dengan prioritas Pembangunan Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026 dihasilkan melalui proses panjang sistem perencanaan, diantaranya melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui BAPPEDA dan lintas OPD dalam menyusun RKPD Tahun 2026 berusaha menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui sasaran dan proritas pembangunan daerah. Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026, mengacu dan memperhatikan:

1. Permasalahan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029;
2. Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024;
3. Prioritas Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
4. Prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026;
5. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
6. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

4.3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Perencanaan Jangka panjang memuat Visi Indonesia Emas 2045 yang mengumandangkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang mampu memanfaatkan potensi negara kepulauan untuk ketangguhan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Bersatu berarti kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika. Berdaulat menunjukkan ketahanan, kesatuan, mandiri, aman dan tangguh. Maju berarti berdaya, modern, tangguh, unggul, inovatif, dan adil. Berkelanjutan berarti lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sasaran visi Indonesia Emas 2045 dengan baseline tahun 2025 adalah:

1. Pendapatan perkapita setara negara maju dengan target

Uraian	2025 baseline	2029 Target	2045 Target
GNI perkapita (USD)	5.500	7.400-7670	30.300
Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	9,1	15

Uraian	2025 baseline	2029 Target	2045 Target
Kontribusi PDB manufaktur	20,8	21,9	28

2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang dengan target

Uraian	2025 Baseline	2029 Target	2045 Target
Tingkat Kemiskinan (%)	7,8-8,0	4,5-5,0	0,5-0,8
Rasio Gini (indeks)	0.379- 0.382	0,372- 0,375	0,377- 0,320
Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5	23,3	28,5

3. Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat dengan target

Uraian	2025 Baseline	2029 Target	2045 Target
Global Power indeks	34 (2023)	29	15 besar

4. Daya saing sumber daya manusia meningkat dengan target

Uraian	2025 Baseline	2029 Target	2045 Target
Indeks Modal Manusia	0,56	0,61	0,73

5. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission dengan target

Uraian	2025 Baseline	2029 Target	2045 Target
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	62,37	93,5

Pencapaian visi indonesia tersebut diatas ditempuh melalui 8 (delapan) agenda pembangunan transformasi menyeluruh yaitu :

1. Transformasi indonesia yaitu :
 - Transformasi sosial
 - Transformasi ekonomi dan

- Transformasi tata kelola.
- 2. Landasan transformasi yaitu :
 - Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan indonesia
 - Ketahanan sosial budaya dan ekologi
- 3. Kerangka implemementasi transformasi yaitu :
 - Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
 - Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
 - Kesenambungan pembangunan.

Selanjutnya tujuh belas arah (tujuan) pembangunan harus disinkronkan dengan provinsi dan kabupaten yaitu :

Misi 1. Transformasi Sosial

- Kesehatan untuk semua
- Pendidikan berkualitas yang merata
- Perlindungan sosial yang adaaktif

Misi 2. Transformasi ekonomi

- Iptek, inovasi dan produktifitas ekonomi
- Penerapan ekonomi hijau
- Transformasi digital
- Integrasi ekonomi domestik dan global
- Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Misi 3. Transformasi Tata Kelola

- Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaaktif

Misi 4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan indonesia

- Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansi
- Stabilitas ekonomi makro
- Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan

Misi 5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi.

- Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
- Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
- Lingkungan hidup berkualitas
- Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan
- Audiensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Selanjutnya, RKP 2026 harus disinkronkan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan lima Agenda Pembangunan yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Tema RKP 2026 adalah **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**

.

Dalam dokumen Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, disebutkan bahwa Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah,

1. Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan:

- a. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026 : 5,80-6,30 %
- b. GNI per Capita : 5.870 US\$
- c. Penurunan Intensitas Emisi GRK : 37,14 %
- d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 76,67

2. Penurunan Kemiskinan:

- a. Tingkat Kemiskinan : 6,5-7,5 %
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka : 4,44-4,96 %
- c. Rasio Gini : 0,377-0,380
- d. Kemiskinan Ekstrem : 0,0-0,5 %

3. Sumber Daya Manusia Berkualitas:

- a. Indeks Modal Manusia : 0,57

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2025 tentang **Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2026** telah dinyatakan bahwa Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);

Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

4.3.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Berdasarkan konsultasi publik yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tema pembangunan provinsi Sumatera Utara yaitu "**Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan**". Prioritas pembangunan difokuskan pada implementasi Lima Misi Pembangunan Daerah,

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia:

Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat.

2. Menjaga stabilitas makro ekonomi daerah:

Mencakup upaya menjaga inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan iklim investasi yang kondusif.

3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan:

Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Mengembangkan dan menata infrastruktur yang berkualitas, estetik, dan ramah lingkungan:

Membangun infrastruktur yang mendukung konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan berkelanjutan.

5. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun masyarakat Sumatera Utara yang tangguh:

Melestarikan nilai-nilai budaya, memperkuat kerukunan sosial, dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap berbagai tantangan.

Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dalam Menyusun RKPD Tahun 2026 mengacu pada Tema RKP Tahun 2026 dan mewujudkannya pada 9 (Sembilan) Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2026 yang telah dijabarkan untuk Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	: 5,6-6,2 %
2. PDRB per kapita (juta)	: 83,2-85,7
3. Kontribusi PDRB Provinsi	: 5,2
4. Tingkat Kemiskinan	: 4,60-5,60 %
5. Tingkat PengangguranTerbuka (TPT)	: 5,06-5,59 %
6. Indeks Rasio Gini	: 0,284-0,290
7. Indeks Modal Manusia	: 0,55
8. Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	: 1,00-2,77 %
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	: 77,37

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026

Sinkronisasi dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta melihat hasil evaluasi pembangunan tahun 2024 adalah bagian penting untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan. Selain itu, kondisi terkini yang *up to date* juga tidak dapat dikesampingkan, karena perubahan dan perkembangan yang sangat cepat di era digital. Dengan mengkolaborasikan hirarki perencanaan dan konseptual

terkini maka Tema pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 adalah **“Kolaborasi dan Inovasi membangun desa menata kota menuju labuhanbatu cerdas bersinar.”**. Dengan tujuan Pembangunan Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan ketercukupan konsumsi pangan masyarakat
3. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih
4. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan perlindungan sosial
5. Meningkatkan kualitas keluarga yang harmonis dan berbudaya
6. Meningkatkan desa mandiri
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat
8. Menurunkan luas kawasan kumuh
9. Meningkatkan kualitas Pembangunan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan
10. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
11. Meningkatkan daya saing daerah

Prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 akan dicapai dengan sasaran dengan indikator kinerja pada tahun 2026 sebagai berikut :

Pada Misi 1, Prioritas yang ingin dicapai ada 2 (dua), yang pertama adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dicapai melalui 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1.	Literasi SD	Poin	50,77
2.	Literasi SMP	Poin	54,00

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
3.	Numerasi SD	Poin	38,97
4.	Numerasi SMP	Poin	38,35
5.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46
6.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,67

2. Sasaran : Meningkatkan literasi masyarakat

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	61,88

3. Sasaran : Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,09
2.	Indeks Keluarga Sehat	Poin	63,55

Prioritas kedua adalah Meningkatkan tenaga kerja yang berdaya saing yang akan dicapai melalui:

Sasaran : Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	(Rp juta/jiwa)	228,90

Pada misi 2, prioritas yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan

ketercukupan konsumsi pangan Masyarakat, yang akan dicapai melalui:

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan dan Cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	78,80

Pada misi 3, prioritas yang ingin dicapai yaitu Menciptakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, yang akan dicapai melalui 3 sasaran yaitu:

1. Sasaran : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	64,63

2. Sasaran : Terwujudnya profesionalitas ASN.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	52,69

3. Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	62,74

Pada misi 4, Prioritas yang ingin dicapai ada 2 (dua) yaitu yang pertama adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial dengan 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal).

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	23,87

2. Sasaran : Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	Persen	1,74

Prioritas yang kedua adalah Meningkatnya kualitas keluarga yang harmonis dan berbudaya, dengan 5 (lima) sasaran sebagai berikut,

1. Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	55,97

2. Sasaran : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Poin	41,83

3. Sasaran : Terwujudnya keluarga yang berkualitas

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	61,28

4. Sasaran : Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,355
2	Indeks Perlindungan Anak	Poin	65,97

5.Sasaran : Teerwujudnya berkebudayaan maju

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	61,88

Pada misi 5, Prioritas yang ingin dicapai ada 3 (tiga) yaitu yang Pertama Adalah Meningkatkan desa mandiri melalui:

1. Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Desa Membangun	Poin	0,7307

Prioritas yang Kedua Adalah Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan 2 (dua) sasaran sebagai berikut,

1. Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan petani

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Nilai Tukar Petani	Poin	133,77

2. Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Nilai Tukar Nelayan	Poin	113,74

Prioritas yang ketiga adalah Menurunkan luas kawasan kumuh melalui:

Sasaran : Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	41,83

Pada Misi 6, prioritas yang ingin dicapai adalah Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan, dengan 5 (lima) sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya akses Masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Poin	68,44

2. Sasaran : Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Rasio Konektivitas	Persen	71,89

3. Sasaran : Terwujudnya kualitas lingkungan hidup

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	70,97

4. Sasaran : Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Porsi EBT dalam Bauran Energi	Persen	41,83

5. Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh bencana

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Risiko Bencana	Poin	118,92

Pada misi 7, Prioritas yang ingin dicapai ada 2 (dua) yaitu yang pertama adalah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan dengan 4 (empat) sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	42,63

2. Sasaran : Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum	Persen	1,36

3. Sasaran : Meningkatnya daya saing industri.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	34,49

4. Sasaran : Meningkatnya nilai tambah perdagangan.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	18,62

Prioritas kedua Adalah Meningkatkan daya saing daerah dengan 4 (empat) sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran : Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	21,69

2. Sasaran : Meningkatnya kapasitas inovasi daerah.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Inovasi Daerah	Poin	56,85

- 3.Sasaran : Meningkatnya literasi digital masyarakat.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Masyarakat Digital	Poin	59,11

- 4.Sasaran : Meningkatnya peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi olahraga.

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)		SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	33,23

Sasaran makro pembangunan untuk mewujudkan **Mewujudkan Labuhanbatu Cerdas Bersinar** yang ditargetkan akan dicapai pada tahun 2026 adalah :

INDIKATOR	SATUAN	TARGET
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3
PDRB per kapita (juta)	Rp.	100,64
Kontribusi PDRB Kabupaten	%	4,45
Tingkat Kemiskinan	%	7,50-7,00
Indeks Rasio Gini	Indeks	0,251-0,250
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,57-5,86
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,60-76,20

INDIKATOR	SATUAN	TARGET
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3
Penurunan Intensitas Emisi GRK	ton CO2eq	126.382, 37
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	74,15

A Kegiatan Strategis Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026

Prioritas pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus tersinkronisasi dan mendukung prioritas pembangunan tingkat provinsi dan nasional, maka kegiatan strategis Kabupaten labuhanbatu tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3 Matriks Keterkaitan Misi, Program Hasil Terbaik Cepat dan Kegiatan Strategis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
1.	Meningkatkan sumber daya manusia dengan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk semua	Fasilitasi pemberian Makan Bergizi Gratis	Dukungan lahan untuk pembuatan dapur umum MBG di 9 Kecamatan	Unit	9	9 Kecamatan	Kecamatan dan Desa, BPKAD (Bidang Aset)	-
		Penuntasan UHC BPJS Kesehatan, penuntasan stunting, percepatan penuntasan kasus TB, fasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis, serta penuntasan Puskesmas berstandar nasional dan peningkatan standar RSUD	Peningkatan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100	15 Puskesmas, Pustu, RSUD	Dinas Kesehatan dan RSUD	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pemberian Makanan Tambahan bagi Bumil KEK, Balita Gizi Kurang :			9 Kecamatan, 23 Kelurahan, 75 Desa	Dinas Kesehatan, DPPKB, Dinas PMD, Bappeda, Kelurahan/Desa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Bumil KEK	Persentase penerima PMT	85	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Kesehatan, DPPKB, Dinas PMD	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Balita Gizi Kurang	Persentase penerima PMT	75	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Kesehatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			TB CEKAT” – Cari Cepat Kasus TB di Masyarakat	Orang	2700	15 Puskesmas, Pustu, RSUD	Dinas Kesehatan dan RSUD	APBD Kabupaten
			Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	unit	-	Rantau Selatan	Dinas Kesehatan	APBN
			Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Pelayanan Kesehatan Bergerak (Mobile Clinic CERDAS LABUHANBATU) atau (CERDAS = Cek Efisien Rutin Dan Akses Sehat Gratis LABUHANBATU)	Orang	40	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Kesehatan	APBD Kabupaten
			TAPAK SEHAT (Transformasi Akses Primer dan Kesehatan Terpadu), melalui :					
			a. Pembangunan Puskesmas ILP di daerah yang padat penduduk dan luas wilayahnya	unit	-	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Kesehatan	APBN

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			b. Penguatan Puskesmas dengan Renovasi Puskesmas menjadi Puskesmas Integrasi Pelayanan Primer	unit	3	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Kesehatan	APBN
			c. Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD					
			Pembangunan Gedung KRIS (Kelas Rawat Inap Standar)	Paket	1	Kabupaten Labuhanbatu	RSUD Rantauprapat	Pinjaman Daerah dan DAK
			Pengadaan Alat Kesehatan RSUD	Paket	1	Kabupaten Labuhanbatu	RSUD Rantauprapat	DAK
			Pembangunan Gedung Ruang Bedah, Ruang CSSD, Ruang Rawat Inap Bedah	Paket	-	Kabupaten Labuhanbatu	RSUD Rantauprapat	DAK
			Pembangunan Gedung Instalasi Pelayanan Ibu dan Anak	Paket	-	Kabupaten Labuhanbatu	RSUD Rantauprapat	DAK

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
		Pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul, Penuntasan Verifikasi data Anak Tidak Sekolah dan solusi penanganannya, Penataan Sekolah, Fasilitasi Sekolah Inklusi serta Pembangunan Perpustakaan Kabupaten	Penyediaan Lahan dan Pengusulan Sekolah Rakyat	Ha	5	Kecamatan Rantau Utara	Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan, BPKAD (Bidang Aset)	Lahan Kabupaten
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB):					
			PAUD	unit	10	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan dan Desa, BPKAD (Bidang Aset)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			SMP	unit	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan/Desa, BPKAD (Bidang Aset)	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Rehab sekolah :					
			PAUD	unit	3	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			SD	unit	10	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			SMP	unit	8	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Penanganan Sekolah yang jumlah siswanya kurang :			Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBD Kabupaten
			Penggabungan SD	Sekolah	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBD Kabupaten
			Peningkatan SD dan SMP menjadi Sekolah Unggulan:					
			SD	Sekolah	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBD Kabupaten
			SMP	Sekolah	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBD Kabupaten

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			Fasilitasi Sekolah Inklusi:					
			PAUD	Sekolah	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			SD	Sekolah	10	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			SMP		8	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Verifikasi Data Anak Tidak Sekolah dan Solusi Penanganannya	Jumlah Data	-	9 Kecamatan, 23 Kelurahan, 75 Desa	Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan/Desa	APBD Kabupaten
			Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik (BOS Daerah) :					
			PAUD (Usia 5-6)	Siswa	5650	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			Kesetaraan (Paket)	Siswa	2434	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pendidikan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembangunan Perpustakaan Kabupaten Labuhanbatu	Unit	-	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
2.	Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan	Pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan serta replikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi	Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD)	Dokumen	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pertanian	APBD Kabupaten
			Pemberian Benih Padi Unggul	Kg	12.500	7 Desa Kawasan Ketahanan Pangan Desa Berinovasi (Desa Sei Nahodaris, Sei Rakyat, Bagan Bilah, Sei Pelancang, Selat Beting, Sei Siarti	Dinas Pertanian	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian :			dan Meranti Paham), 1 Desa Kawasan Ketahanan Pangan Pertanian Terintegrasi (Desa Sei Penggantungan)		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pompa	Unit	20			APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Hand tractor	Unit	20			APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan kelengkapannya (Saluran Primer, Saluran Sekunder, Pompa Air PLTS, Bangunan Sadap, Bangunan Bagi, Plat Layanan, dan Normalisasi) :		-	Kecamatan Panai Hulu	Dinas PUPR	APBN
			Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Paya Bulak Desa Meranti Paham Kecamatan Panai Hulu	Paket	-			

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Lobu Rampah Desa Meranti Paham Kecamatan Panai Hulu	Paket	-	Kecamatan Panai Hulu	Dinas PUPR	APBN
			Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Sei Kerang Kecamatan Panai Hulu	Paket	-	Kecamatan Panai Hulu	Dinas PUPR	APBN
			Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Sei Rengas Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah	Paket	-	Kecamatan Panai Tengah	Dinas PUPR	APBN
			Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Sei Buluh Kecamatan Bilah Hilir	Paket	-	Kecamatan Bilah Hilir	Dinas PUPR	APBN

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Sei Tarolat Kecamatan Bilah Hilir	Paket	-	Kecamatan Bilah Hilir	Dinas PUPR	APBN
			Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Selat Beting Kecamatan Panai Tengah	Paket	-	Kecamatan Panai Tengah	Dinas PUPR	APBN
			Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Nahodaris Kecamatan Panai Hulu	Paket	-	Kecamatan Panai Hulu	Dinas PUPR	APBN
			Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Selat Besar Kecil Kecamatan Bilah Hilir	Paket	-	Kecamatan Bilah Hilir	Dinas PUPR	APBN

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani	km	-	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pertanian	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembangunan Kilang Padi (Rice Milling Unit) dan Pembuatan Beras Kemasan Labuhanbatu	Unit	-	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pertanian	APBN, Kemitraan BUMDesMa
			Penangkaran dan Penanaman Bibit Padi Unggul dan Fortifikasi :			Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pertanian	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Penangkaran dari BUMN (SHS)	Lahan (ha)	50	Sei Nahodaris	Dinas Pertanian	Kemitraan dengan BUMN
			Penangkaran dari APBN/APBD Provinsi	Lahan (ha)	50	Sei Rakyat	Dinas Pertanian	APBN, APBD Provinsi

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			Pompanisasi Sumur Dalam Tenaga Surya	Unit	5	Kawasan Ketahanan Pangan Desa Berinovasi dan Pertanian Terintegrasi	Dinas Pertanian	APBN
			Pembangunan Pompa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan pemeliharannya	Unit	1	Kawasan Ketahanan Pangan Desa Berinovasi dan Pertanian Terintegrasi	Dinas Pertanian	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Cakupan Penyuluh Pertanian (%)	40	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pertanian	APBN, APBD Kabupaten
			Pembayaran premi asuransi usaha tani padi	Ha/Musim Tanam	1000	Kawasan Ketahanan Pangan Desa Berinovasi dan Pertanian Terintegrasi	Dinas Pertanian	APBN, APBD Kabupaten, CSR
			Pemberian Bibit Ternak Sapi	Ekor	130	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			Pemberian Bibit Ternak Domba Betina	Ekor	30	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pemberian Bibit Ternak Domba Jantan		4	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pemberian Bibit Ternak Ayam	Ekor	200	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pemberian Bibit Ternak Itik	Ekor	200	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembelian Benih (Semen Beku) Sapi Unggul: Limousin, Simental, Brahman, Ongole, Angus, dan Belgian Blue untuk inseminasi buatan	Dosis	6000	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			N2 Cair	Liter	3000	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			Penyusunan Roadmap Peternakan Kabupaten Labuhanbatu	Dokumen	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembuatan Kandang Ternak Sapi, Kambing dan Domba	Unit	-	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembuatan Pabrik Pakan Ternak	Unit	-	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembibitan dan penanaman rumput makanan ternak ruminansia	Ha	-	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Rehab Puskesmas	Paket	1	Kecamatan Panai Hulu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembangunan Puskesmas	Paket		Kecamatan Bilah Hulu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pengadaan Obat-obatan hewan	Paket	80	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembangunan Pasar Hewan			Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Peternakan	APBN

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			Pemberian Bibit Perikanan Budidaya (Lele, Nila, Mas, Gurami, Patin)			Kawasan Kampung Budidaya Berkah (Desa Pangkatan, Kec. Pangkatan)		
			- Lele	Ekor	200.000		Dinas Kelautan dan Perikanan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			- Nila	Ekor	200.000		Dinas Kelautan dan Perikanan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			- Mas	Ekor	-		Dinas Kelautan dan Perikanan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			- Gurami	Ekor	-		Dinas Kelautan dan Perikanan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			- Patin	Ekor	150,000		Dinas Kelautan dan Perikanan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			Pemberian alat tangkap bagi nelayan	Paket	55	Kawasan Kampung Nelayan Berkah (Kelurahan Sei Berombang, Desa Sei Sanggul, Desa Sei Sakat dan Desa Sei Baru)	Dinas Kelautan dan Perikanan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Peningkatan perekonomian nelayan melalui sumber diversifikasi olahan hasil tangkapan nelayan	Kali	4		Dinas Kelautan dan Perikanan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun	Ha	1.000	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pertanian	APBN
			Pengembangan Kebun Induk Kelapa Genjah Hijau Erabolo Labuhanbatu	Ha	-	Desa Meranti Paham	Dinas Pertanian	APBD Kabupaten, APBN, Kerjasama dengan BRIN

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			Sarana Prasarana Perkebunan (Pupuk, Pestisida)	Ha	100	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pertanian	APBN
			Dukungan terhadap hilirisasi kelapa sawit	Jumlah industri hilirisasi kelapa sawit	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pertanian, Dinas Perindag, Dinas PMPTSP, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup	APBD Kabupaten, Investasi Swasta
			Penyusunan RAD Kelapa Sawit Berkelanjutan	Dokumen	-	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pertanian	DBH Sawit
			Replikasi Penerapan budidaya Kelapa Sawit Berkelanjutan	Desa	15	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Pertanian, Dinas PMD, Balitbang	APBD Kabupaten
3.	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Penataan Perangkat Daerah, PNS dan optimalisasi pendapatan dan belanja daerah agar lebih efektif dan efisien	Penataan Perangkat Daerah	Perda	1	Seluruh OPD	Kabag Orta, BKPP	APBD Kabupaten
			Penataan Jabatan Fungsional pada setiap perangkat daerah	Jabatan Fungsional yang disetujui Kemenpan RB	43	Seluruh OPD	Kabag Orta, BKPP, Seluruh OPD	APBD Kabupaten

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			Peningkatan Kompetensi PNS melalui Pelatihan (Struktural dan Fungsional)	Jam/ PNS/Tahun	10	Seluruh PNS Kabupaten Labuhanbatu	BKPP	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
			Optimalisasi Pencapaian PAD (Pajak dan Retribusi Daerah)	Capaian PAD (%)	75	Kabupaten Labuhanbatu	Bapenda, OPD Penyumbang PAD	APBD Kabupaten
			Optimalisasi APBD dalam Mendukung Kegiatan Strategis Daerah	Persentase KSD yang didukung APBD (%)	40	Kabupaten Labuhanbatu	Bappeda, BPKAD	APBD Kabupaten
4.	Meningkatkan perlindungan sosial dan pengembangan budaya	Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Peningkatan UCI BPJS Tenaga Kerja, pemberian asuransi nelayan dan bantuan untuk disabilitas dan orang terlantar	Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	51,34		Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kabag Pemerintahan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembayaran premi asuransi nelayan	Orang	150	Kawasan Kampung Nelayan Berkah (Kelurahan Sei Berombang, Desa Sei Sanggul, Desa Sei Sakat dan Desa Sei Baru)	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			Pemberian Alat Bantu Disabilitas	Penyandang disabilitas	5	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Sosial	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Penyediaan Fasilitas Rumah Singgah Sementara	Unit	-	Kecamatan Rantau Utara	Dinas Sosial	APBD Kabupaten, CSR
			Pemberian BLT	Cakupan Masyarakat Miskin (%)	60			
		Pelestarian budaya daerah	Renovasi Gedung Kesenian Rantauprapat	Paket	-	Kecamatan Rantau Utara	Disporabudpar	CSR
			Renovasi Gedung Nasional Rantauprapat dan Pembangunan Museum Sejarah dan Budaya Labuhanbatu	Paket	-	Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar, Dinas Pendidikan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
5.	Membangun desa dan menata kota	Penataan Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh	Unit	35	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Perkim	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
	berbasis potensi wilayah secara tematik		Pembangunan Jamban dan Septik Tank (Penuntasan Desa dan Kelurahan STOP BABS)	Desa dan Kelurahan	17	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembangunan instalasi dan jaringan air bersih	Sambungan Rumah	2150	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pembangunan SPAM IKK Pangkatan	m2	-	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Mendukung pembangunan perumahan murah untuk generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah	Unit	50	Rantau Utara, Rantau Selatan, dan Bilah Hulu	Dinas Perkim	Kemitraan dengan Swasta
			Peningkatan Jalan Ruas Jl. Ahmad Yani-Jl. Sisingamangaraja Rantauprapat	km	6,1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	APBN

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			Drainase dalam kota Rantauprapat	km	10	Kecamatan Rantau Utara dan Kecamatan Rantau Selatan	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup	APBD Kabupaten
			Perda RPPLH	Dokumen	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Lingkungan Hidup	APBD Kabupaten
			TPST Perlayuan	Ha	5	Kecamatan Rantau Utara	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD (Bidang Aset)	APBN, APBD Kabupaten
			TPST	Ha	-	Sei Berombang/Pasar Tiga, Negeri Lama/Tj. Sarang Elang, Pangkatan/Pemata ng Seleng	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD (Bidang Aset)	APBN, APBD Kabupaten

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			TPS3R	Unit	3	Sei Penggantungan, Sei Jawi-Jawi, Sei Rakyat, Sei Kasih, Gunung Selamat, Desa Perkebunan Sennah, Sei Siarti, Tj. Harapan, N4 Aek Nabara, Siringoringo, Pulo Padang, Lingga Tiga, Afdeling 2 Rantauprapat, Pangkatan, Aek Buru Selatan, Kp. Dalam	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD (Bidang Aset)	APBN, APBD Kabupaten
			Revitalisasi Bank Sampah	Unit	15	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMD, Desa/Kelurahan	APBD Kabupaten, Dana Desa, BUMDes
			Pengadaan Sarana Persampahan			Kabupaten Labuhanbatu		
			Truk Sampah	Unit	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Lingkungan Hidup	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			Arm-roll	Unit	5	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Lingkungan Hidup	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Betor Sampah	Unit	3	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Lingkungan Hidup	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Pengaktifan Pusat Daur Ulang	Unit	1	Kabupaten Labuhanbatu	Kemitraan dengan Komunitas Peduli Sampah Lestari Bersinar	Kemitraan dengan Komunitas
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Ha	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
			Truk Tinja	Unit	-	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Labuhanbatu 2025-2045	Dokumen	-	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	APBN, APBD Kabupaten
			Penyusunan Revisi RDTR Rantauprapat 2022-2042	Dokumen	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	APBN, APBD Kabupaten

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			Penyusunan RDTR Aek Nabara 2027-2047	Dokumen	-	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	APBN, APBD Kabupaten
			Revitalisasi Taman Binaraga Rantauprapat:		-	Kabupaten Labuhanbatu		
			Lapangan Senam	Paket	-	Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar	CSR
			Lapangan Basket	Paket	-	Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar	CSR
			Amphiteather	Paket	-	Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar	CSR
			Taman Anak	Paket	-	Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar	CSR
			Selasar	Paket	-	Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar	CSR
			Trotoar	Paket	-	Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar	CSR
			Terminal dalam Kota Rantauprapat	Unit	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Perhubungan	APBD Kabupaten

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Unit	5	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Perhubungan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten
			LPJU	Titik	100	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Perhubungan	APBD Kabupaten
		Pembangunan Desa	Revitalisasi BUMDes dan Pembentukan BUMDesma (BUMDes Bersama)	Jumlah BUMDesma	1	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PMD	Dana Desa, APBD Kabupaten
			Pembentukan Satgas Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih	Keputusan Bupati	-	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PMD dan Dinas Koperasi	APBD Kabupaten
6.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan meningkatkan mitigasi bencana	Peningkatan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan (pertanian, peternakan dan perikanan) serta mendukung akses menuju infrastruktur/proyek	Peningkatan Jalan Sei Rakyat -Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah	km	7	Kecamatan Panai Tengah	Dinas PUPR	Inpres (APBN)
			Peningkatan Jalan Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir menuju Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir	km	-	Kecamatan Bilah Hilir	Dinas PUPR	Inpres (APBN)

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
		nasional	Peningkatan Jalan Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir menuju Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir	km	-	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	Inpres (APBN)
			Peningkatan Jalan Sei Rakyat-Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah	km	-	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	Inpres (APBN)
			Peningkatan Jalan Sei Berombang-Sei Tawar	km	-	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	Inpres (APBN)
			Peningkatan Jalan Sidodadi (Simpang Meranti)-Sidorejo II (Meranti) Kecamatan Bilah Hulu	km	-	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas PUPR	Inpres (APBN)
		Peningkatan Mitigasi Bencana	Penyusunan Peta Kawasan Rawan Bencana	Peta	-	Kabupaten Labuhanbatu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	APBD Kabupaten

NO.	MISI	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS)	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	SATUAN	TARGET 2026	LOKUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
			Penambahan armada pemadam kebakaran	Truk	-	Kabupaten Labuhanbatu	Satpol PP	APBN, APBD Kabupaten, CSR
7	Mengembangkan inovasi, ekonomi kreatif, dan pariwisata	Pengembangan Inovasi Daerah, pembinaan UMKM serta pengembangan pariwisata	Peningkatan inovasi daerah dan replikasi inovasi daerah	Jumlah inovasi daerah	35	Seluruh OPD	Balitbang, Seluruh OPD	APBD Kabupaten
			Pembinaan UMKM kreatif dan UMKM kuliner	Peningkatan level UMKM	10	Kabupaten Labuhanbatu	Dinas Kop UKM, Dinas Perindag, Disnaker	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Revisi Riparkab	Perda	1	Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar	APBD Kabupaten
			Penyusunan Masterplan Destinasi Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu	Dokumen	1	Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar	APBD Kabupaten
			Penataan Kota Tua Labuhanbilik	Paket	1	Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR
			Penataan Wisata Pantai Kahona	Paket	1	Kabupaten Labuhanbatu	Disporabudpar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR

B Fokus Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Kemiskinan ekstrem diukur dengan menggunakan absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Berdasarkan Bank Dunia, Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem. Ada tiga hal yang bisa dipahami penyebab kemiskinan ekstrem yaitu kondisi sosial budaya, keterbatasan sumber daya dan keterisolasian, rendahnya Pendidikan, Kesehatan dan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja. Lokasi dan sebaran Masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem adalah :

- Tinggal di Kawasan hutan daerah terisolasi
- Berada di wilayah sengketa
- Bertempat tinggal di daerah yang bukan hunian (kolong jembatan, rumah liar)

Pemerintah telah menetapkan bahwa data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) bersumber dari Pendataan Keluarga (PK)-BKKBN hasil 2021, data P3KE ini sudah dilakukan harmonisasi dengan Data penerima program DTKS, sudah

diharmonisasikan dengan OMSPAN Kemenkeu dan sudah diharmonisasikan dengan data SIAK Kemendagri. Data ini sekarang sudah dirangkingkan sehingga sudah memiliki peringkat kesejahteraan (Desil 1, 2, 3 dan 4). Data P3KE ini berisi 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan Nasional. Berisi data (miskin ekstrem, miskin & rentan miskin) yang sudah berdasarkan *by name by address* dan *by NIK*.

Desil 1, penduduk dengan kesejahteraan 10% paling rendah (disebut kemiskinan ekstrem)

Desil 2, penduduk dengan kesejahteraan 11-20 % paling rendah

Desil 3, penduduk dengan kesejahteraan 21-30 % paling rendah

Desil 4, penduduk dengan kesejahteraan 31-40 % paling rendah

Berdasarkan data P3KE tahun 2023 jumlah kemiskinan ekstrem (Desil 1) di Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 9.445 KK dan berada pada posisi ke-12 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Strategi kebijakan yang diambil untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem adalah:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
2. Peningkatan pendapatan Masyarakat miskin
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

C Fokus Penanggulangan Stunting di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Percepatan penurunan stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas

melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting. Intervensi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting. Pelaksanaan penanganan stunting dirangkum dalam 8 aksi konvergensi stunting yang terdiri dari analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan kepala daerah tentang peran desa, pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting serta review kinerja tahunan. Pada tahun 2024, persentase penurunan stunting di Kabupaten Labuhanbatu adalah sebesar 25,40% dari yang ditargetkan sebesar 14%, sehingga realisasi capaian kinerjanya adalah sebesar 55,12%.

Gerakan Anti Stunting-Penurunan Prevalensi Untuk Labuhanbatu (GAS-PUL) melalui Kampung Nusa (Kampung Nutrisi Keluarga Cegah Stunting) merupakan kawasan desa yang menjadi kawasan desa berinovasi dengan kolaborasi seluruh unsur-unsur yang ada, sebagai berikut :

- Aparat desa memiliki lahan/taman yang dikelola oleh TP-PKK Desa dan Kecamatan,
- Kader Posyandu, dan Ayah Peduli ASI (APA) menanam tanaman Torbangun,
- Hasil daun torbangun dikelola oleh TPG Puskesmas dan Kader Posyandu menjadi olahan “MIE TORBANG” atau mie torbangun.
- Di Kampung Nusa juga telah terbentuk “Duta Stunting” yang bertugas untuk memantau perkembangan selama masa periode 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan),
- Duta Stunting juga rutin membawa ibu hamil pemeriksaan kehamilan dan USG di Puskesmas.
- Inovasi lainnya yaitu penanaman padi Inpari Nutri Zink yang hasilnya diberikan kepada keluarga berisiko stunting di Kampung Nusa,

- Pengembangan PAUD holistik terintegratif yang bersinergi dengan posyandu,
- Sosialisasi “GEMAR IKAN” atau gerakan memasyarakat makan ikan di SMP/MTS,
- Pelaksanaan dapur DASHAT untuk pemberian PMT kepada keluarga berisiko stunting,
- Bantuan Dinas PUPR berupa bantuan Jamban dan PAMSIMAS.
- Inovasi Bapak Asuh Anak Stunting seperti PT. HSJ di Kampung Nusa Desa Tanjung Haloban
- Sosialisasi KAMPUNG NUSA oleh Serikat Perempuan Indonesia (SPI).

Selain KAMPUNG NUSA juga dilaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung penanggulangan stunting, antara lain :

1. Kampung KB dengan prioritas pelaksanaan program pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan resiko kejadian stunting.
2. Kampung Literasi, di Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu dengan prioritas Kawasan giat membaca berbasis inklusi social.
3. Penanaman Padi Inpari Nutri Zink di Kawasan desa berinovasi Desa Sei Nahodaris.
4. Kampung Nelayan Maju dengan konsep peningkatan produktifitas jumlah hasil penangkapan ikan serta pengolahan ikan oleh nelayan.
5. Pekan Tambal Asik, dengan prioritas pemberian makanan tambahan bagi balita dan anak usia dini.
6. BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting).
7. PASTI, Percepatan dan antisipasi stunting polres labuhanbatu.
8. MOTAN, Mobil Stunting hadir untuk mengatasi kendala setiap OPD dalam melakukan intervensi program stunting di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Seluruh program penanggulangan stunting tersebut diatas telah dilaksanakan pada tahun 2025 dan tetap berlanjut tahun 2026 untuk mencapai target sebesar 12,79%.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2026 mengacu pada Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Labuhanbatu dan kondisi terkini. Penetapan sasaran prioritas pembangunan daerah dicapai melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan Provinsi, Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan masyarakat. Sumber dana untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut juga berasal dari berbagai sumber, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk setiap prioritas baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu maupun dari sumber dana lain, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel lampiran.

Program dan kegiatan beserta pendanaannya direncanakan melalui proses perencanaan berjenjang yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Program dan kegiatan tahun 2026 yang direncanakan dapat dilihat pada tabel ***lampiran 5.1***.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Pagu Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Labuhanbatu

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BATASAN PAGU (Rp)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.584.481.976
2	Sekretariat Daerah Kabupaten	27.752.420.780
3	Kecamatan Rantau Utara	13.673.761.385
4	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.999.579.943
5	Kecamatan Rantau Selatan	10.813.630.180
6	Dinas Lingkungan Hidup	13.513.820.960
7	Dinas Pangan	2.886.108.169
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.905.949.194
9	Dinas Pertanian	10.769.718.205
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.794.089.122
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.118.093.399
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.798.143.384
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.819.892.143
14	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5.464.568.526
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.425.043.235
16	Dinas Sosial	7.399.796.525
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	16.155.987.945
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.828.202.967
19	Kecamatan Bilah Hilir	2.829.547.687
20	Sekretariat DPRD	43.354.019.213
21	Dinas Pendidikan	403.651.509.972
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.202.587.179
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.358.322.398
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.305.564.194
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27.108.615.761
26	Dinas Tenaga Kerja	3.727.411.150
27	Badan Pendapatan Daerah	14.971.869.963
28	Dinas Pertanahan	2.206.122.787
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	163.260.372.127
30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	4.560.416.481
31	Kecamatan Panai Hilir	1.971.033.815
32	Kecamatan Pangkatan	1.841.558.028
33	Dinas Perhubungan	21.453.014.539
34	Kecamatan Bilah Hulu	2.833.365.828
35	Satuan Polisi Pamong Praja	9.543.394.236
36	Dinas Kesehatan	199.326.487.140
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.378.144.347
38	Kecamatan Panai Tengah	2.394.653.971
39	Kecamatan Bilah Barat	2.104.965.748
40	Kecamatan Panai Hulu	1.767.588.012
41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.244.667.666

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BATASAN PAGU (Rp)
42	Dinas Peternakan	3.107.857.094
43	Inspektorat Daerah	13.368.393.626
44	Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat	174.695.375.000

Dalam mendukung Program Hasil Terbaik Cepat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, maka Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan program dan kegiatan yang tentunya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Dukungan dimaksud dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2 Dukungan Kabupaten Labuhanbatu terhadap PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVUSU		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
2. Program Berobat Gratis (Probis) mela lui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	2026	Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara untuk 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1.Dinas Sosial (Pembinaan kepada Dinsos Kabupaten/Kota untuk melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya), 2.Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data kependudukan Provsu) 3.Diskominfo (Publikasi Kegiatan),	- Dukungan penganggaran APBD Kabupaten untuk UHC/PBPU yaitu pada Tahun 2025 sebesar 80%, tahun 2026 sebesar 77,5%, tahun 2027 sebesar 75%, tahun 2028 sebesar 72,5%, tahun 2029 dan 2030 sebesar 70%. - Melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya. - Dinas Dukcapil (Penyediaan data kependudukan)
4. Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS)	2026	Pembangunan integrasi portal aplikasi : 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 4. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat. Lokasi Kegiatan: • Pemerintah Provinsi Sumatera	Dinas Kominfo	DPMPSTP, Dinas Pendidikan Dinas, Kesehatan Bapenda, Disperindag ESDM, BPSDM, Biro Adpem BUMD: PDAM, Bank Sumut	1.Penyiapan kebijakan/regulasi. 2.Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM. 3.Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan 4.Penentuan lokasi: 1.Penyiapan dan penguatan infrastruktur digital. 2.Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM. 3.Penyiapan data-data aplikasi 4. Penentuan lokasi

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
5 a. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)	2026	1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED). 2.Penyusunan Leger jalan. 3.Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Komoditas Unggulan: Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan target: jalan 202,84 km jembatan 202,90 m.	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/ AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas Perhubungan terkait Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi.	1.Dukungan penanganan akses jalan dalam koridor pembangunan jalan provinsi yang mendukung kawasan prioritas. 2.Dukungan penyediaan lahan pada rencana pelebaran yang tidak sesuai dengan Ruang Milik Jalan (RUMIJA).

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
6. Bantuan hukum dan perlindungan rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).	2026	- Pembentukan <i>kelambagaan prestice</i>, Bimbingan Teknis Paralegal Desa dan Edukasi dan Sosialisasi <i>Prestice</i> di 25 kabupaten (Asahan, Labuhanbatu, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba) - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba. - Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan. - Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per kabupaten/kota, dilaksanakan di Kota Medan)	Biro hukum	Dians PMD, Capil memberikan data/pemetaan desa prioritas kegiatan PRESTICE yaitu desa dengan karakteristik konflik yang tinggi. (Diskominfo) Pyblikasi	1. <i>Replikasi kegiatan PRESTICE</i> 2. Edukasi dan Sosialisasi <i>PRESTICE</i> di tingkat Kabupaten sampai dengan ke level Kecamatan dan Desa. 3. Pendampingan dari bagian hukum dan tindak pidana ringan yang ditangani oleh <i>PRESTICE</i>

Selain itu, Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung 17 (tujuh belas) Program Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Dukungan Program Daerah Kabupaten Labuhanbatu terhadap 17 (tujuh belas) Program Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL					
1. Pemenuhan 100% Fasilitasi Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara	2026	1.Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2.Pemeliharaan & <i>Maintenance</i>	Dinas Pendidikan	Disperindag ESDM (pendampingan terhadap akses listrik), Dinas Kominfo (pendampingan terhadap akses internet dan publikasi kegiatan).	Pembangunan akses jalan yang baik ke sekolah yang akan dibangun akses listrik dan layanan internet.

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	2026	Pelaksanaan Fisik Tahap I – 150 Ruang Kelas (2026) di 21 Kabupa ten/Kota •Medan, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, T anjungbalai, Labuhanbatu, Pema tangsiantar, Samosir, Toba, Sibol ga, Padangsidimpuan, Mandailin g Natal, Tapanuli Selatan, Padan gsidimpuan, Padang Lawas Utar a, Nias, Nias Selatan, Gunungsito li, Nias Utara, Nias Barat	Dinas Pendidi kan	PUPR (Appraisal/Peni laian Kerusakan, Pen dampingan, Monitorin g dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publi kasi kegiatan)	Pembangunan infrastruktur aks es jalan yang baik dari dan menu ju sekolah yang akan dilakukan kegiatan rehabilitasi ruangan kel as rusak
PP2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERKARYA DAN BERPRESTASI					
6. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030	2026	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2026 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2026	Dispora	Dinas Pendidikan/Ca bang Dinas Pendidika n dan Satuan Pendidi kan (pembinaan, edu kasi dan sosialisasi k	-Melakukan sosialisasi terkait pel aksanaan kegiatan penyelenggar aan liga olahraga pelajar sumut untuk cabang olahraga sepak bol a dan voli

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
		Provinsi Sumatera Utara		epada pelajar untuk d apat menjadi atlet pel ajar) Dinas Kominfo (Publi kasi kegiatan)	- Melaksanakan <i>side event</i> pada saat pelaksanaan liga olahraga (p ameran UMKM) dan sejenisnya
7. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030	2026	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2026 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2026-2027 Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang	Dispora	Dinas pendidikan / C abang Dinas Pendidik an (Edukasi dan Sosi alisasi bagi Pelajar Dif abel untuk dapat men data dan membina atl et sesuai potensi dan minat siswa) Dinas Kominfo (Publi kasi kegiatan)	NPC Kabupaten/Kota dan Dispor a Kabupaten/Kota memperkuat perekrutan dan pembinaan para atlet disabilitas pelajar di Kabupa ten/Kota
PP 3 KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU					

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (<i>Sumut e-Health Integration system</i>)	2026	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2026 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota		Dinas Kominfo (Penyediaan Web, Server dan Publikasi Kegiatan)	-Penyediaan data kepesertaan JKN Kabupaten/Kota -Sosialisasi dan edukasi <i>platform</i> kepada faskes tingkat Kabupaten/Kota
13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	2026	Perluasan kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.645 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kabupaten/Kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas	DISNAKER	- Dinas Sosial - Dinas Sosial berperan dalam memberikan data dukung DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan penerima t	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Mendukung pelaksanaan agar

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
		Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		masuk dalam kategori penerima bantuan. • Pendataan dan Validasi Calon Penerima, Mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran BPJS. • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil • Penyediaan dan Verifikasi Data Identitas • Menyediakan data kependudukan yang valid (NIK, KK, KTP) sebagai prasyarat utama pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan. • Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan sistem BPJS, DTKS (Dinas Sosial), dan lembaga lain untuk memastikan data pekerja rentan	bisa mencapai target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sebesar 60% sesuai RPJMD 2025-2029 2. Memberikan sosialisasi untuk masyarakat, khususnya untuk tenaga kerja rentan dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan 3. Pengalokasian DBH sawit dan APBD dengan persentase pembagian 80 persen Kabupaten/Kota dan 20 persen provinsi utk perlindungan pekerja rentan miskin ekstrem desil 1 dan 2

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
				terverifikasi secara administratif. • Dukungan Pemutakhiran Data DTKS, Bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data identitas dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang digunakan untuk menetapkan penerima bantuan iuran BPJS. • Membantu mempercepat proses registrasi atau koreksi data calon penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap. • BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan berperan menyelenggarakan perlindungan sosial bagi pekerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
				(JKK): Perlindungan atas risiko kecelakaan selama bekerja. • Jaminan Kematian (JKm): Santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal. • Jaminan Hari Tua (JHT): Tabungan jangka panjang bagi pekerja saat pensiun. • Jaminan Pensiun (JP): Penghasilan berkala untuk pekerja setelah pensiun. • Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Bantuan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK. • Kominfo: Publikasi Kegiatan	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi	2026	Penyusunan dokumen appraisal/ penilaian kerusakan bekerja sama dengan Dinas PUPR Penyusunan dokumen perencanaan (jasa konsultan perencanaan) untuk 13 panti sosial Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi		PUPR (Dokumen appraisal, pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk revitalisasi panti sosial) Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan Kerja bagi sasaran Penghuni Panti) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- Kabupaten/Kota mendukung pelaksanaan pelatihan bimbingan mental, dan pendidikan paket A/ B/C bagi penerima manfaat yang dirujuk dari panti sosial provinsi khususnya panti anak dan remaja - Kabupaten/Kota bersama Provinsi melakukan pemantauan, evaluasi atas keberlanjutan penerima manfaat.

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi	2026	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 Barang Milik Daerah yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil inventarisasi • Penyusunan Regulasi penggunaan web aplikasi pemanfaatan Barang Milik Daerah • Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM penilai barang	BKAD	Bapenda Provsu: Dukungan dalam proses bisnis pendapatan melalui pemanfaatan aset BMD dengan kerja sama ekonomi Bappelitbang Provsu: Dukungan dalam penyusunan konsep dan perencanaan Diskominfo: Dukungan dalam penyediaan web aplikasi dan promosi OPD Pengguna BMD: Dukungan dalam inventarisasi dan pengamanan aset serta pemeliharaan BMD	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pengamanan BMD dalam penerbitan SKT lahan (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan) dari Pemerintah Setempat (Kelurahan atau Kepala Desa)

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
21. Pengawasan Konservasi Laut SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut)	2026	Laporan Patroli dan Peralatan + Aplikasi e-Mawas • Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.	DISKANLA	• BAPPELITBANG: Integrasi program SEMESTA dalam perencanaan daerah. • Dinas Lingkungan Hidup Provsu: Kebijakan dan pemantauan kualitas lingkungan laut. • Dinas Perhubungan Provsu: Dukungan transportasi laut dan keselamatan pelayaran patroli. • Satpol PP Provsu:	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan Nelayan Kabupaten/Kota - Klasterisasi - Sosialisasi dan Edukasi

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
				Penegakan perda terkait konservasi laut. • Dinas Pariwisata Provsu: Sinergi dengan wisata bahari berkelanjutan. • Dinas Kominfo Provsu: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat. • Dinas Koperasi & UKM Provsu: Penguatan kelembagaan nelayan pengawas. • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu: Kesiapsiagaan dan tanggap darurat di laut. • Inspektorat: Pengawasan dan pendampingan jalannya program	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
23. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)	2026	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumate	DISPERINDAG ESDM	TPH : Pembinaan Kelompok Petani dalam penggunaan PLTS . • Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat: Pengawasan Pelaksanaan • Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan untuk Tahun 2025- 2030: 1. Data Kelompok Tani (CPCL) 2. Data penentuan lokasi 3. Pengadaan lahan 4. Data produksi pertanian; kondisi air 5. Data <i>readiness criteria</i>

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
27. Fasilitas Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	2026	Mulai pelaksanaan Temu Pembiayaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta monitoring awal terhadap usaha penerima kredit. • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH bertindak sebagai penghubung antara kelompok tani dengan lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, serta lembaga penjaminan kredit. Melalui penyediaan data kelompok tani, pelatihan manajemen usaha tani, serta pembentukan kelembagaan petani yang kuat, dinas membantu petani memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar layak mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan	a) Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran sentral dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pembinaan koperasi tani dan UMKM berbasis pertanian. Dinas ini dapat memfasilitasi akses permodalan bagi kelompok tani melalui penguatan koperasi simpan pinjam, pelatihan manajemen usaha tani, hingga menjembatani kerja sama antara koperasi dan lembaga keuangan. b) Disperindag ESDM berkontribusi dalam mendorong hilirisasi produk pertanian dan menjaga stabilitas harga hasil tani. Melalui penguatan rantai nilai dan pasar hasil tani, dinas ini dapat membuka	Memetakan kelompok tani yang layak dan potensial untuk memperoleh akses permodalan, berdasarkan data luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta rekam jejak kelembagaan kelompok

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
			an skema pembiayaan pertanian lainnya.	peluang tambahan pendapatan bagi petani yang dapat digunakan sebagai modal atau premi asuransi. c) Dinas Kominfo memainkan peran dalam penyebarluasan informasi terkait program bantuan iuran premi asuransi dan akses permodalan. Melalui berbagai saluran komunikasi digital dan non-digital, Kominfo dapat menjamin transparansi program, meningkatkan literasi digital kelompok tani, dan mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan permodalan dan asuransi pertanian. e) Dinas Pemdesdukcapil memiliki peran strategis dalam verifikasi dan validasi data kependudukan	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
				serta kelembagaan desa sebagai basis penyaluran bantuan. Melalui data kependudukan dan basis kelompok tani di desa, Pemdudukcapil memastikan agar bantuan permodalan maupun iuran premi asuransi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani. f) Diskominfo (Publika si)	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
34. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMK M kreatif	2026	Desain dan pengembangan platform e-commerce; Kurasi awal 100 produk UMKM; Kemitraan dengan platform logistik & payment gateway. Manajemen Operasional platform e-commerce; Promosi dan sosialisasi platform e-commerce; • PLUT	DISKOP UMK M	KOMINFO: Publikasi Media DISKOP UKM: Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan DISKOP UKM: Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan lanjutan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan UMKM binaan Kabupaten/Kota - Kurasi Produk UMKM - Klasterisasi UMKM yang dapat dimasukkan ke dalam Galeri - <i>Capacity Building</i>

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
35. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	2026	1. Inovasi <i>Business Registration System Policy TPB/SDGs</i> 2. Diseminasi Skema BRS TPB/S DGs (Kolaborasi dengan Dinas Ko perasi dan UMKM pada acara FY P, BRS SDGs dijadikan kurikulum) 3. Menyusun Laporan Monev TPB /SGDs Tahun 2025 4. Finalisasi Draf RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 melalui desk per pilas TPB/SDGs 5. <i>Launching</i> Aplikasi e-Monev 6. Pelaksanaan skema <i>Declaration and Registration System BRS TPB/SDGs</i> 7. Diseminasi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 8. Penyusunan Rancang Bangun aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI)	Bappelitbang	Seluruh Perangkat Daerah	1. Penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Kabupaten/Kota se-Sumut tahun 2025-2030 2. Dukungan pelaksanaan skema BRS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs : identifikasi UMKM/IMK serta pelaku usaha 3. Dukungan pelaksanaan North Sumatera SDGs Action Awards 4. Dukungan proses penginputan E- Monev Kabupaten/Kota 5. Peningkatan Kapasitas untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
		9. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review</i> <i>(VLR)</i> Kabupaten/Kota 10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2026 Sosialisasi <i>North Sumatra</i> <i>SDGs Action Award 2027</i> (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev)			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
36 kerja sama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis	2026	- Reviu Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara	Inspektorat	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Perangkat Daerah yang memiliki Proyek Strategis	Inspektorat Kabupaten/Kota : Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan Proyek Strategis yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota
PP 11. TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT					

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
37. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan	2026	- Pemanfaatan <i>SADAINA Reborn</i> - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu Data tingkat Daerah - Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data SDGs	Dinas Kominfo	Seluruh OPD menginput data statistik sektoral	Replikasi aplikasi, menyediakan SDM, menyiapkan regulasi terkait
PP 12. INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN, JEMBATAN, DAN IRIGASI YANG LANGSUNG BERDAMPAK PADA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL					

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
38. Pembangunan Ruas Jalan Baru Penghubung Wilayah Terisolir atau Strategis yang Merupakan kewenangan Provinsi	2026	Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan prioritas pada ruas-ruas yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat layanan, serta memperkuat jalur distribusi antar kabupaten/kota • Penanganan sepanjang total 51,96 km pada 9 ruas jalan provinsi belum tembus yang masih dalam kondisi tanah dan belum layak dilalui. Ruas-ruas tersebut menghubungkan wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara,	Dinas PUPR	Dinas Kominfo, untuk publikasi kegiatan, Dinas LHK mendukung proses penyusunan dokumen lingkungan, AMDAL dan izin pinjam pakai Hutan, Dinas Perhubungan untuk penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	1. Memberikan dukungan administratif atas pembangunan jalan yang berada di wilayah kewenangannya, mendukung penyediaan lahan pada trase jalan serta perizinan 2. Menyelaraskan program jalan dengan perencanaan pembangunan daerah dan usulan prioritas lokal. 3. Melaksanakan koordinasi teknis lapangan dan penyedia data kondisi eksisting jalan serta kebutuhan daerah.

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
		Kabupaten Samosir			
46. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati	2026	Penyusunan dokumen DPPT dan pembebasan lahan	DLHK	1. Biro Pem Otda - SK Penlok 2. BPN - Sertifikat Lahan 3. Diskominfo - Publikasi Media	1. Dukungan terhadap pengadaan lahan 2. Penetapan Taman Kehati pada RTRW Kabupaten/Kota

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
48. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan bagi Pengelola BUMDES	2026	- Pelaksanaan kegiatan peningka tan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDe sma - Monitoring dan Evaluasi kegiat an •Kabupaten Tapanuli Tengah, Ka bupaten Tapanuli Utara, Kabupat en Nias, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten D airi, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabu paten Humbang Hasundutan, Ka bupaten Samosir, Kabupaten Pad ang Lawas Utara, Kabupaten Pad ang Lawas, Kabupaten Labuhanb atu Utara, Kota Gunungsitoli, Kot a Padangsidimpuan, Kabupaten Karo, Kabupaten Toba, Kabupate n Labuhanbatu Selatan, Kabupat en Tapanuli Selatan,		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan bagi pengelola BUMDES/Masyarakat Desa).	- Menugaskan tenaga pendamping desa atau penyuluh ekonomi untuk mendampingi operasional BUMDES. - Memfasilitasi akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran digital. - Memfasilitasi sertifikasi kompetensi pengelola BUMDES melalui lembaga pelatihan resmi.

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
		Kabupaten Labuhanbatu (20 Kabupaten/Kota)			
PP 16. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN					

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1	2	3	4	5	6
49. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota	2026	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Biro KESRA	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Inspektorat (pendampingan menyeluruh dan tinjauan terhadap tata kelola pemberian bantuan hibah rumah ibadah)	-

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kabupaten Labuhanbatu diwajibkan menetapkan target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan segenap unsur pemangku kepentingan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Target pencapaian ini menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan public secara luas. Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai serta skenario dan asumsi perencanaan pembangunan daerah, dan hasil evaluasi capaian kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama 5 tahun terakhir.

Penguatan peran pemerintah daerah dalam menyusun tata kelola pemerintahan di daerahnya adalah salah satu pemetaan potensi dan pendalaman peran (role position) pemerintah daerah yang memiliki nilai strategis dalam menjalankan pembangunan manusia. Otonomi daerah adalah sebuah konsep besar yang memberikan ruang inovasi bagi daerah otonom (kabupaten/kota) untuk mengenali dan menggali potensi daerahnya masing masing. Bertitik tolak dari peran pemerintah daerah tersebut, maka perlu dirumuskan langkah-langkah strategis yang mampu mengusung isu-isu sentral daerah dalam sebuah langkah kebijakan daerah.

6.1 Perjanjian Kinerja

Pada dokumen perjanjian kinerja telah dialokasikan sejumlah anggaran untuk mendukung pencapaian target-target kinerja. Alokasi anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja. Perangkat Daerah akan melaksanakan program dan kegiatan yang telah tercantum dalam dokumen penganggaran masing-masing Perangkat Daerah. Penghematan anggaran ini akan mengefisiensikan penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja.

Benchmarking capaian sasaran kinerja adalah suatu proses mengidentifikasikan “sasaran dan indikator kinerja” terhadap proses dan target sebagai tolok ukur kinerja Kabupaten Labuhanbatu. Tujuan utama dari Benchmarking adalah untuk memahami dan mengevaluasi sasaran indikator untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu lembaga/institusi. Benchmarking kinerja Kabupaten Labuhanbatu mengacu kepada capaian pada indikator RPJMD Kabupaten Labuhanbatu dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal dimana aspek kinerja yang menjadi benchmarking adalah kinerja kesehatan, kinerja pendidikan, kinerja ketenagakerjaan, kinerja sosial/kemiskinan, dan kinerja ekonomi dengan mengkomparasikannya dengan capaian kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan secara nasional.

Tabel 6.1 Benchmarking Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten Labuhabatu 2021-2024

No	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun Kinerja			
					2021	2022	2023	2024
1	Kinerja Kesehatan	1	Balita Gizi Buruk Yang Ditemukan	anak	26	14	11	7
		2	Jumlah Kematian Bayi	kasus	14	20	20	7
		3	Jumlah Kematian Ibu	kasus	12	10	6	3
		4	Penggunaan Alat KB	orang	60,183	27,555	34,864	41,706
		5	Jumlah Kasus AIDS	kasus	33	23	35	22
		6	Kasus Positif	kasus	209	274	441	230

No	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun Kinerja			
					2021	2022	2023	2024
			Malaria					
		7	Jumlah Pasien TB (semua tipe) yang dilaporkan	kasus	667	895	1,049	1,155
		8	Angka Harapan Hidup	tahun	72.21	72.55	72.88	73.13
2	Kinerja Pendidikan	1	Angka Melek Huruf 15-24 tahun	%	73.16	73.96	74.70	99.91
		2	Angka Partisipasi Kasar SD	%	107,75	109,21	108,60	103,49
		3	Angka Partisipasi Kasar SMP	%	92.28	86.55	98.69	94.28
		4	Angka Partisipasi Kasar SMA	%	99.79	98.12	94.46	87.17
		5	Angka Melanjutkan SMP, SMA, PT	%	80.79	83.00		
3	Kinerja Ketenagakerjaan	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.66	6.90	5.99	5.90
		2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	61.84	63.51	64.84	65.46
4	Kinerja Sosial / Kemiskinan	1	Persentase Penduduk Miskin	%	8.74	8.26	7.99	7.84
		2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	indeks	1.32	0.69	1.40	0.83
		3	Indeks keparahan kemiskinan	indeks	0.29	0.11	0.37	0.13
5	Kinerja Ekonomi	1	PDRB atas Dasar Harga Berlaku	Rp juta	37.606.880,00	41.809.008,33	45.762.600,00	50.801.780,00
		2	Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Berlaku	%	8.52	11.17	9.46	11.01
		3	PDRB atas Dasar Harga Konstan	Rp juta	24.147.560,00	25.305.985,43	26.579.280,00	27.924.860,00
		4	Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan	%	3.85	4.80	5.03	5.06

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Realisasi kinerja merupakan salah satu dasar untuk menentukan perkiraan target kinerja pada tahun berikutnya. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perencanaan. Namun, dalam menetapkan dan mengevaluasi indikator Indikator

Kinerja, perlu dilihat tujuan dan sasaran berdasarkan misi kepala daerah terpilih. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat utama pengukuran kinerja. Untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dibutuhkan indikator Kinerja Utama. Oleh karena itu, sasaran strategis dengan indikator kinerja didalamnya dijadikan dasar penentuan target kinerja. Dengan demikian, seluruh Organisasi Perangkat Daerah dapat menetapkan program dan kegiatan yang tepat sasaran dan menghasilkan output yang terukur dan dapat dievaluasi. Tujuan dan Sasaran Strategis IKU tersebut diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029

No	Indikator	Baseline		Target	Target 2026
		2023	2024	2025	2026
1	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	77,96	76,94	78,50	78,80
2	Indeks Infrastruktur (Poin)	64,47	-	67,09	68,44
3	Indeks Risiko Bencana (Poin)	124,98	151,20	121,05	118,92
4	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,69	75,20	76,6-76-2	75,34
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,99	5,90	5,75-5.86	5,40
6	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,06	5,3	5,89
7	Indeks Daya Saing Daerah (Poin)	3,00	3,43	3,50	3,65
8	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,6980	0,7072	0,7188	0,7307
9	PDRB Per Kapita (Rp juta)	89,06	97,59	100,65	101,65
10	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	3,29	3,80	4,10	4,35
11	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	56,33	62,94	63,79	64,63
12	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,99	7,84	7,5-7	5,79
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	78,34	80,00	81,72	82,21

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Labuhanbatu

No	Indikator	Baseline		Target					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Aspek Geografi dan Demografi								
1	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	77,96	76,94	78,50	78,80	79,10	79,40	79,70	80,00
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	7,38	7,07	6,50	5,90	5,35	4,86	4,41	4,00
3	Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh/Kapita)	-	-	1.474,00	1.534,10	1.596,64	1.661,74	1.729,49	1.800,00
4	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,30	-	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45
5	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Aman (%)	11,00	-	15,00	17,23	19,79	22,74	26,12	30,00
6	Indeks Risiko Bencana (Poin)	124,98	151,20	121,05	118,92	116,84	114,79	112,77	110,79
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	64,47	67,62	70,00	70,97	71,96	72,96	73,97	75,00
8	Penurunan Emisi gas Rumah Kaca	-	-	126.382,37	139.883,21	154.826,29	171.365,67	189.671,87	209.933,64
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	0,40	-	5,00	6,23	7,76	9,67	12,04	15,00
10	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15,30	-	30,00	32,53	35,28	38,26	41,49	45,00
11	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	2,00	-	12,00	13,55	15,29	17,26	19,49	22,00
12	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,14	1,41	1,24	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,06	5,46	5,89	6,36	6,87	7,41	8,00
2	PDRB Per Kapita (Rp juta)	89,06	97,59	97,80	101,65	105,66	109,82	114,14	118,63
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,99	7,84	6,00	5,79	5,58	5,38	5,19	5,00
4	Gini Ratio (Poin)	0,244	0,251	0,231	0,230	0,229	0,227	0,226	0,225
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,99	5,90	5,50	5,40	5,29	5,19	5,10	5,00
6	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,69	75,20	75,28	75,34	75,48	75,63	75,77	75,91

No	Indikator	Baseline		Target					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Usia Harapan Hidup (Tahun)	72,88	73,13	73,87	74,09	74,32	74,55	74,77	75,00
8	Prevalensi stunting (%)	20,20	25,4	13,00	12,79	12,59	12,39	12,19	12,00
9	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,49	9,50	9,71	9,67	9,63	9,58	9,54	9,50
10	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,25	13,26	13,45	13,46	13,47	13,48	13,49	13,50
11	Literasi SD	-	-	49,53	50,77	52,03	53,33	54,67	56,03
12	Literasi SMP	-	-	52,68	54,00	55,35	56,73	58,15	59,60
13	Numerasi SD	-	-	37,47	38,97	40,52	42,14	43,83	45,58
14	Numerasi SMP	-	-	36,88	38,35	39,89	41,48	43,14	44,86
15	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	51,09	13,16	60,00	62,74	65,60	68,60	71,73	75,00
16	Indeks Masyarakat Digital (Poin)	46,76	45,78	57,34	59,11	60,94	62,82	64,76	66,76
17	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	79,11	-	85,00	85,98	86,97	87,97	88,98	90,00
18	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	18,30	-	23,45	23,87	24,29	24,72	25,15	25,60
19	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	78,34	80,0	81,72	82,21	82,71	83,21	83,71	84,22
20	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	78,34	-	60,00	61,88	63,82	65,81	67,87	70,00
21	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Poin)	54,29	60,38	60,50	61,28	62,07	62,87	63,68	64,50
22	Indeks Perlindungan Anak (Poin)	60,55	-	65,00	65,97	66,96	67,96	68,97	70,00
23	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	90,83	91,01	91,50	92,19	92,88	93,58	94,29	95,00
24	Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)	70,39	59,07	65,00	68,26	71,68	75,27	79,04	83,00
25	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	0,427	0,403	0,370	0,355	0,340	0,326	0,313	0,300
26	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	-	-	30,00	33,23	36,80	40,76	45,14	50,00

III Aspek Daya Saing Daerah

1	Angka Ketergantungan (Per 100 Penduduk)	47,86	47,86	47,65	47,68	47,76	47,88	48,04	48,04

No	Indikator	Baseline		Target					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	33,76	32,53	34,24	34,49	34,74	34,99	35,24	35,50
3	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (%)	1,28	1,24	1,32	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
4	Rasio Kewirausahaan (%)	7,07	7,84	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64,84	65,46	70,00	70,97	71,96	72,96	73,97	75,00
6	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	51,34	54,55	55,21	56,85	58,54	60,28	62,07	63,91
7	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	1,08	1,03	1,10	1,24	1,40	1,57	1,77	2,00
8	Indeks Akses Keuangan Daerah (poin)	-	4,24	4,32	4,34	4,36	4,38	4,39	4,40
9	Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB ADHB (%)	0,10	0,16	2,00	2,62	3,44	4,51	5,91	7,75
10	Total Kredit/PDRB ADHB (%)	0,21	0,22	4,00	5,06	6,41	8,11	10,27	13,00
11	Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Rp miliar)	87,41	48,73	96,37	101,19	106,25	111,56	117,14	123,00
12	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	-	-	20,00	21,69	23,52	25,51	27,66	30,00
13	Indeks Masyarakat Digital (Poin)	-	57,34	59,11	60,94	62,82	64,76	66,76	57,34
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)	23,27	23,14	24,13	23,92	23,71	23,51	23,30	23,10
15	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	-	-	42,81	43,16	43,52	43,88	44,24	44,61
16	KONtribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	-	17,96	18,29	18,62	18,95	19,30	19,65	20,00
17	Indeks Infrastruktur (Poin)	64,47	-	67,09	68,44	69,82	71,23	72,67	74,13
18	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (poin)	-	40,00	41,83	43,73	45,73	47,82	50,00	40,00
19	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (%)	-	-	96,66	96,83	97,00	97,16	97,33	97,50
20	Persentase Desa Mandiri (%)	2,67	7,50	4,00	4,43	4,91	5,44	6,02	6,67
21	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,0015	0,0011	1,25	1,41	1,58	1,78	2,00	2,25
22	Inflasi (%)	-	3,36	2,30	2,28	2,26	2,24	2,22	2,20

No	Indikator	Baseline		Target					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IV	Aspek Pelayanan Umum								
A	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif								
1	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	56,33	62,94	63,79	64,63	65,48	66,32	67,17	67,80
2	Indeks SPBE (Poin)	2,94	-	2,94	2,99	3,04	3,09	3,15	3,20
3	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	3,29	3,88	3,92	3,96	4,00	4,04	4,08	4,12
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	-	-	4,00	4,13	4,27	4,41	4,55	4,70
5	Indeks Integritas Nasional (Poin)	74,32	65,47	78,00	78,78	79,58	80,38	81,18	82,00
B	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial								
1	Persentase Penegakan Perda (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Capaian Aksi HAM (%)	80,97	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	-	-	70,00	71,89	73,84	75,84	77,89	80,00
4	Indeks Rasa Aman (Poin)	-	-	55,00	58,98	63,25	67,83	72,74	78,00
5	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Poin)	-	-	60,00	63,55	67,32	71,30	75,53	80,00
C	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan								
1	Indeks Daya Saing Daerah (Poin)	3,00	3,43	3,60	3,68	3,75	3,83	3,92	4,00
Indikator Kinerja Kunci									
A	Pendidikan								
1	APM SD	98,77	98,84	99,00	99,20	99,40	99,60	99,80	100,00
2	APM SMP	84,56	84,28	85,00	85,98	86,97	87,97	88,98	90,00
3	Literasi SD	47,14	-	49,53	50,77	52,03	53,33	54,67	56,03
4	Literasi SMP	50,14	-	52,68	54,00	55,35	56,73	58,15	59,60

No	Indikator	Baseline		Target					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Numerasi SD	34,64	-	37,47	38,97	40,52	42,14	43,83	45,58
6	Numerasi SMP	34,10	-	36,88	38,35	39,89	41,48	43,14	44,86
7	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	10,49	11,48	12,25	13,40	14,66	16,04	17,54	19,19
8	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	63,54	-	65,71	66,41	67,12	67,83	68,55	69,28
B Kesehatan									
1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	56,49	-	34,00	26,06	19,98	15,32	11,74	9,00
2	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	44,22	-	75,00	76,90	78,85	80,85	82,90	85,00
3	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	89,40	-	91,00	91,40	91,79	92,19	92,60	93,00
C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Jalan dalam Kondisi Baik (%)	54,16	49,54	50,00	53,48	57,20	61,19	65,44	70,00
2	Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	13,25	-	25,00	30,72	37,74	46,37	56,97	70,00
3	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak (%)	91,88	-	93,00	93,40	93,79	94,19	94,60	95,00
4	Akses Rumah Tangga terhadap Sanitas Layak (%)	84,79	-	87,00	88,54	90,12	91,72	93,34	95,00
D Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase Rumah Layak Huni (%)	69,71	-	75,00	75,97	76,96	77,96	78,97	80,00
2	Persentase Kawasan Kumuh (%)	-	-	10,00	7,25	5,25	3,81	2,76	2,00

No	Indikator	Baseline		Target					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
E	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
1	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	80,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Kasus Narkoba (%)	64,95	-	50,23	48,05	45,96	43,96	42,05	40,22
3	Persentase Ormas yang Dibina (%)	4,00	-	60,00	61,88	63,82	65,81	67,87	70,00
F	Sosial								
1	Indeks Kesejahteraan Sosial (Poin)	-	-						
2	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	0,00	-	1,00	1,74	3,01	5,23	9,07	15,75
3	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	40,08	-	70,00	71,89	73,84	75,84	77,89	80,00
G	Tenaga Kerja								
1	Rasio Lulusan Perguruan Tinggi (%)	10,49	11,48	12,25	13,40	14,66	16,04	17,54	19,19
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	TPAK Perempuan (%)	44,53	47,66	48,00	48,79	49,60	50,41	51,25	52,09
2	Indeks Perlindungan Khusus Anak (Poin)	76,70	-	70,00	70,97	71,96	72,96	73,97	75,00
3	Jumlah kasus KDRT (kasus)	27	-	20	15	10	5	0	0
I	Pangan								
1	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	85,00	-	90,00	90,98	91,97	92,97	93,98	95,00
2	Ketersediaan pangan utama (ton)	62.093,22	-	65.000,00	65.970,58	66.955,65	67.955,43	68.970,14	70.000,00
J	Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	24,70	-	25,00	25,25	25,50	25,76	26,02	26,28

No	Indikator	Baseline		Target					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Indeks Kualitas Udara	83,94	-	86,01	86,40	86,79	87,17	87,56	87,95
3	Indeks Kualitas Air	-	-	90,00	90,90	91,81	92,73	93,65	94,59
K Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Rasio penduduk ber-KTP (%)	-	-	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Kepemilikan Akte Kelahiran (Per 1.000 Penduduk)	-	-	50,00	54,93	60,34	66,29	72,82	80,00
L Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Indeks Desa Membangun (%)	0,6980	0,7072	0,7188	0,7307	0,7427	0,7549	0,7674	0,7800
2	Indeks Desa (%)	-	-	67,00	68,68	70,39	72,15	73,96	75,80
M Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Total Fertility Rate (Rata-Rata Anak Per Wanita)	2,35	2,33	2,20	2,04	1,89	1,75	1,62	1,50
2	Rasio Akseptor KB (%)	55,62	64,53	68,00	68,40	68,79	69,19	69,60	70,00
N Perhubungan									
1	Rasio Konektivitas (%)	-	-	75,00	77,25	79,57	81,95	84,41	86,95
2	Persentase kepemilikan KIR (%)	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Pemasangan rambu-rambu (%)	0,00	-	70,00	75,18	80,73	86,70	93,11	100,00
O Komunikasi dan Informatika									
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	-	-	80,00	83,65	87,47	91,46	95,64	100,00
P Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,28	-	0,78	0,86	0,95	1,05	1,16	1,28

No	Indikator	Baseline		Target					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Kontribusi UKM terhadap PDRB (%)	-	-	40,00	42,63	45,43	48,42	51,61	55,00
3	Persentase Koperasi Aktif (%)	32,87	-	40,00	43,38	47,04	51,02	55,33	60,00
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	-	-	50,00	53,48	57,20	61,19	65,44	70,00
5	Proporsi jumlah UKM non pertanian (%)	94,74	-	95,25	95,36	95,48	95,59	95,71	95,82
Q Penanaman Modal									
1	Persentase Peningkatan Investasi (%)	-	-	20,00	21,69	23,52	25,51	27,66	30,00
2	Jumlah investor PMDN berskala nasional (Perusahaan)	-	-	12	13	15	16	18	20
3	Jumlah investor PMA berskala nasional (Perusahaan)	-	-	5	6	7	8	9	10
R Kepemudaan dan Olahraga									
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	49,00	-	60	61,88	63,82	65,81	67,87	70
2	Persentase Wirausaha Muda (%)	-	-	30	32,53	35,28	38,26	41,49	45
3	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi (%)	-	-	80	83,65	87,47	91,46	95,64	100
S Kebudayaan									
1	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	-	-	14,29	17,80	22,17	27,62	34,41	42,86
T Perpustakaan									
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan (Orang)	19.850	-	21.000	21.745	22.517	23.316	24.143	25.000
4	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat (Orang)	-	-	5	7	9	11	15	20

No	Indikator	Baseline		Target					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
U	Kearsipan								
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	72,70	-	80,00	83,65	87,47	91,46	95,64	100,00
V	Pariwisata								
1	Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang	-	-	50	57	66	76	87	100
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Orang)	-	-	250.000	274.640	301.709	331.445	364.113	400.000
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang)	-	-	300	382	486	618	786	1000
4	Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	-	-	5,00	5,35	5,72	6,12	6,54	7,00
W	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan								
1	Produksi Perikanan (ton)	9.316,05	9.634,57	9.800,00	9.839,68	9.879,52	9.919,51	9.959,68	10.000
2	Nilai Tukar Nelayan (Poin)	-	-	110,00	113,74	117,60	121,60	125,73	130,00
3	Proporsi PDRB Sub-Sektor Perikanan (%)	0,48	-	0,72	0,78	0,85	0,92	1,00	1,08
X	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan								
1	Nilai Tukar Petani (Poin)	-	-	130,00	133,77	137,66	141,66	145,77	150,00
2	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	27,96	29,48	27,81	26,77	25,78	24,82	23,89	23,00
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Rp juta/kapita)	150,39	165,43	170,00	175,62	181,42	187,41	193,60	200,00
4	Produksi Padi (ton)	103.488,70	-	105.206,46	106.352,65	107.511,43	108.682,78	109.866,90	111.064,00
5	Produksi Beras (ton)	-	-	60.346,42	61.003,88	61.668,56	62.340,44	63.019,66	63.706,31
6	Produksi Perikanan (ton)	9.316,05	9.634,57	9.800,00	9.839,68	9.879,52	9.919,51	9.959,68	10.000

No	Indikator	Baseline		Target					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Y	Perdagangan								
1	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	75,00	-	80,00	80,98	81,96	82,96	83,98	85,00
Z	Perindustrian								
1	Proporsi jumlah IKM (%)	0,98	-	1,26	1,33	1,40	1,48	1,56	1,65
Z	Perencanaan Pembangunan								
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	-	-	60,00	62,74	65,60	68,60	71,73	75,00
2	Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
AA	Keuangan								
1	RoA BUMD (%)	-	-	0,50	0,63	0,80	1,02	1,29	1,63
2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (Level)	WTP	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
AB	Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan								
1	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	-	-	60,00	63,55				80,00
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	-	-	70,00	75,18	80,73	86,70	93,11	100,00

No	Indikator	Baseline		Target					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	-	-	60,00	66,45	73,60	81,52	90,29	100,00
AC Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	-	-	70,00	73,50	77,18	81,03	85,09	89,34
2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	-	-	68,75	78,13	81,25	87,50	93,75	100,00
AD Pengawasan									
1	Indeks MCP KPK (Poin)	74,56	-	80,00	80,59	81,19	81,79	82,39	83,00
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	-	-	90,00	91,92	93,87	95,87	97,91	100,00
AE Sekretariat Daereah									
2	Nilai Evaluasi SAKIP (Poin)	CC	-	B	B	B	B	B	BB

BAB VII

PENUTUP

Rancangan Akhir RKPD tahun 2026 merupakan bagian dari proses perencanaan dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan jangka tahunan untuk tahun 2026, sekaligus berfungsi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memantau pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026. Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengakomodir Perencanaan Bottom-Up dan Top-Down. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 memuat rencana kerja tahun 2026 seluruh perangkat daerah pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 memperhatikan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025-2029, dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2026 serta RPJMN Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Diharapkan komitmen dari seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa/Kelurahan serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu**

Tim Penyusun